



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin sehingga penanggulangan bersifat lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa agar kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih terarah, telah disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan Pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan kemiskinan untuk 4 (empat) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud penetapan RPKD adalah :
 - a. untuk memberikan arah bagi PD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan empat tahun kedepan; dan
 - b. untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
2. Tujuan penetapan RPKD adalah :
 - a. sebagai salah satu referensi dalam penyusunan Renstra PD, Renja, RKPD dan perencanaan penganggaran berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. memberikan arah untuk pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

RPKD adalah :

- a. bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Kabupaten dengan mempertimbangkan RPJPD; dan
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam menanggulangi kemiskinan.

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPKD meliputi :

- a. Bab I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum, peran TKPK dalam penyusunan RPKD dan sistematika penulisan;
- b. Bab II : Kondisi Umum Daerah
Memuat letak geografis, demografis, akses Kabupaten Musi Banyuasin kepada pelayanan publik, informasi sosial budaya, perekonomian dan capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
- c. Bab III : Profil Kemiskinan – Identifikasi Masalah
Memuat informasi kondisi kemiskinan daerah berdasarkan referensi atau hasil kajian dengan menyebutkan sumber yang digunakan;
- d. Bab IV : Prioritas Program
Memuat informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah; dan
- e. Bab V : Prioritas Wilayah
Memuat lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan.

BAB V
ISI RPKD
Pasal 5

Isi beserta uraian RPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 6 Juni 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 6 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH**

RPKD

KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tahun 2023-2026

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026**

**SAMBUTAN KETUA TKPKD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

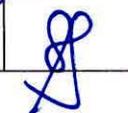
Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Musi Banyuasin mempersembahkan Buku Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026. Buku ini disusun sebagai analisis penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan di Kabupaten.

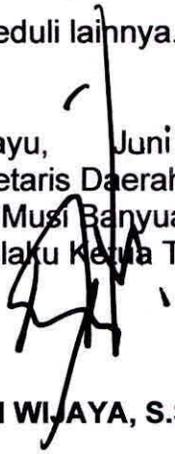
Buku ini menguraikan rencana penanggulangan kemiskinan seperti yang menjadi mandat dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dimana penanggulangan kemiskinan itu sendiri dirumuskan bukan sekedar perbaikan (klaster) tetapi juga mengembangkan kelompok program khas daerah yang sesuai dengan kearifan lokal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bersama ini kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan kelompok peduli lainnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paraf	
Asisten II	
Plt. Kepala BAPPEDA	

Sekayu, Juni 2023
Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin
Selaku Ketua TKPKD


MUSNI WIJAYA, S.SOS., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Guna mendukung target pengurangan angka kemiskinan menjadi satu digit serta meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, maka dibentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan ditingkat pusat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), sedangkan di daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. TKPK Daerah memiliki tugas melakukan koordinasi kebijakan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah yang mempunyai fungsi diantaranya yaitu melakukan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan suatu dokumen yang berisi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dokumen RPKD yang disusun telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (RPD). Untuk itu dokumen RPKD dilegalisasi oleh Kepala Daerah dan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam rangka integrasi kedalam RPD. Sebagai implikasi, maka berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di dalam dokumen RPKD dapat selalu tercermin di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya memperoleh dukungan pembiayaan melalui alokasi APBD di setiap Tahun Anggaran secara proporsional sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal di Kabupaten Musi Banyuasin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekayu, Juni 2023

Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin

Selaku Sekretaris TKPKD


SUNARYO, S.STP., MM.

NIP. 19750219 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman		
HALAMAN JUDUL			
SAMBUTAN KETUA TKPKD	ii		
KATA PENGANTAR	iii		
DAFTAR ISI	iv		
DAFTAR TABEL	vii		
DAFTAR GRAFIK	ix		
DAFTAR GAMBAR	xi		
BAB I	PENDAHULUAN	I-1	
	1.1	Latar Belakang	I-1
	1.2	Maksud dan Tujuan	I-2
	1.3	Dasar Hukum	I-3
	1.4	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH	II-1	
	2.1	Geografis dan Demografis	II-1
	2.1.1	Kondisi Geografis	II-1
	2.1.2	Kondisi Demografis	II-11
	2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-15
	2.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-15
	2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-15
	2.2.1.2	PDRB Perkapita	II-17
	2.2.1.3	Indeks Gini	II-17
	2.2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia	II-18
	2.2.1.5	Kemiskinan	II-19
	2.2.1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-22
	2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-24
	2.2.2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-24
	2.2.2.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-25
	2.2.2.3	Angka Partisipasi Murni (APM)	II-25
	2.2.2.4	Angka Melek Huruf	II-26
	2.2.2.5	Usia Harapan Hidup	II-27
	2.2.2.6	Angka Kesakitan	II-28
	2.2.2.7	Angka Kematian Bayi	II-29
	2.2.2.8	Prevalensi Bayi Stunting	II-30
	2.2.2.9	Jumlah Angkatan Kerja	II-30
	2.3	Aspek Pelayanan Umum	II-30
	2.3.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar	II-32
	2.3.1.1	Pendidikan	II-32
	2.3.1.1.1	Ketersediaan Sekolah	II-32
	2.3.1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah	II-32
	2.3.1.2	Kesehatan	II-33
	2.3.1.3	Ketenagakerjaan	II-39
	2.3.1.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-40
	2.3.1.5	Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-41
	2.3.1.6	Sosial	II-42
BAB III	PROFIL KEMISKINAN – IDENTIFIKASI MASALAH		
	3.1	Bidang Konsumsi Pengeluaran	III-1

	3.1.1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	III-1
	3.1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	III-3
	3.1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	III-5
	3.1.4	Jumlah Penduduk Miskin	III-7
	3.1.5	Garis Kemiskinan	III-9
	3.1.6	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	III-11
	3.1.7	Rasio Gini	III-12
	3.2	Bidang Ketenagakerjaan	III-16
	3.2.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-16
	3.2.2	Jumlah Angkatan Kerja	III-18
	3.2.3	Persentase Setengah Menganggur	III-20
	3.2.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	III-22
	3.2.5	Tingkat Kesempatan Kerja	III-24
	3.3	Bidang Pendidikan	III-28
	3.3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	III-28
	3.3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	III-30
	3.3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	III-32
	3.3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	III-34
	3.3.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	III-36
	3.3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	III-38
	3.3.7	Angka Putus Sekolah Usia 7-12	III-40
	3.3.8	Angka Putus Sekolah Usia 13-15	III-42
	3.3.9	Angka Putus Sekolah Usia 16-18	III-43
	3.4	Angka Kesehatan	III-48
	3.4.1	Angka Morbiditas	III-48
	3.4.2	Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan	III-50
	3.4.3	Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri	III-52
	3.4.4	Angka Harapan Hidup	III-54
	3.5	Bidang Kawasan Permukiman	III-57
	3.5.1	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	III-57
	3.5.2	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	III-59
	3.5.3	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	III-61
	3.6	Bidang Ketahanan Pangan	III-65
	3.6.1	Produksi Pasdi	III-65
	3.6.2	Produktivitas Padi	III-66
	3.6.3	Produksi Jagung	III-67
	3.6.4	Produktivitas Jagung	III-68
BAB IV		PRIORITAS PROGRAM	IV-1
	4.1	Prioritas Intervensi	IV-1
	4.1.1	Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar	IV-1
	4.1.2	Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin	IV-3
	4.1.3	Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro	IV-6
	4.2	Analisis Struktur APBD	IV-7
	4.3	Isu Strategis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin	IV-11
BAB V		PRIORITAS WILAYAH	V-1
	5.1	Akses Ke Energi Listrik	V-2
	5.2	Akses Ke Pasar	V-3

5.3	Akses Ke Puskesmas	V-4
5.4	Akses Ke Rumah Sakit	V-5
5.5	Akses Ke SD Sederajat	V-6
5.6	Akses Ke SMP Sederajat	V-7
5.7	Akses Ke SMA Sederajat	V-8
5.8	Aksesibilitas Jalan	V-9

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	II-1
Tabel 2.2	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan	II-2
Tabel 2.3	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin	II-3
Tabel 2.4	Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin	II-3
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	II-5
Tabel 2.6	Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-12
Tabel 2.7	Indikator Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 dan 2020	II-13
Tabel 2.8	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-14
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	II-16
Tabel 2.10	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Periode 2017-2022 (dalam Milyar Rupiah)	II-17
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2022	II-20
Tabel 2.12	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-24
Tabel 2.13	Angka Partispasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Non formal Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-25
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf Tahun 2021	II-26
Tabel 2.15	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2021	II-26
Tabel 2.16	Usia Harapan Hidup 2014-2021	II-28
Tabel 2.17	Angka kesakitan dan rata-rata lama sakit tahun 2014-2021	II-29
Tabel 2.18	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan angka Kematian Bayi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-29
Tabel 2.19	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2021	II-30
Tabel 2.20	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jam kerja di Kabupaten Musi Banyuasin	II-31
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2021	II-32
Tabel 2.22	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2021	II-33

Tabel 2.23	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-34
Tabel 2.24	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2020	II-35
Tabel 2.25	Rasio dokter persatuan penduduk	II-37
Tabel 2.26	Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Pemukiman Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.29	Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-43
Tabel 2.30	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021	II-43
Tabel 3.1	Hasil Analisis Bidang Konsumsi Pengeluaran	III-13
Tabel 3.2	Hasil Analisis Bidang Ketenagakerjaan	III-26
Tabel 3.3	Hasil Analisis Bidang Pendidikan	III-45
Tabel 3.4	Hasil Analisis Bidang Kesehatan	III-55
Tabel 3.5	Hasil Analisis Bidang Kawasan Permukiman	III-63
Tabel 3.6	Hasil Analisis Bidang Ketahanan Pangan	III-67
Tabel 4.1	Pemetaan Hasil ToC Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar	IV-2
Tabel 4.2	Pemetaan hasil ToC Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin	IV-4
Tabel 4.3	Hasil Pemetaan ToC Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro	IV-7
Tabel 4.4	Isu Strategis	IV-11
Tabel 5.1	Rangkuman Lokasi Prioritas Kemiskinan	V-10
Tabel 5.2	Realisasi dan Target Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin	V-11
Tabel 5.3	Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026	V-12

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2021	II-18
Grafik 2.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 -2021	II-19
Grafik 2.3	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Musi Banyuasin	II-19
Grafik 2.4	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Muba Tahun 2011- 2021	II-22
Grafik 2.5	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Tahun 2011 – 2021	II-23
Grafik 2.6	Progres pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2021	II-39
Grafik 3.1	Persentase Penduduk Miskin (P0)	III-1
Grafik 3.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	III-3
Grafik 3.3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	III-5
Grafik 3.4	Jumlah Penduduk Miskin	III-7
Grafik 3.5	Garis Kemiskinan	III-9
Grafik 3.6	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	III-11
Grafik 3.7	Rasio Gini	III-12
Grafik 3.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-16
Grafik 3.9	Jumlah Angkatan Kerja	III-18
Grafik 3.10	Persentase Setengah Menganggur	III-20
Grafik 3.11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	III-22
Grafik 3.12	Tingkat Kesempatan Kerja	III-24
Grafik 3.13	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	III-28
Grafik 3.14	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	III-30
Grafik 3.15	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	III-32
Grafik 3.16	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	III-34
Grafik 3.17	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	III-36
Grafik 3.18	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	III-38
Grafik 3.19	Angka Putus Sekolah Usia 7-12	III-40
Grafik 3.20	Angka Putus Sekolah Usia 13-15	III-42
Grafik 3.21	Angka Putus Sekolah Usia 16-18	III-43
Grafik 3.22	Angka Morbiditas	III-48
Grafik 3.23	Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan	III-50
Grafik 3.24	Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri	III-52
Grafik 3.25	Angka Harapan Hidup	III-54
Grafik 3.26	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	III-57
Grafik 3.27	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	III-59
Grafik 3.28	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	III-61
Grafik 3.29	Produksi Padi	III-65
Grafik 3.30	Produktivitas Padi	III-66
Grafik 3.31	Produksi Jagung	III-67
Grafik 3.32	Produktivitas Jagung	III-68
Grafik 4.1	ToC Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar	IV-1
Grafik 4.2	ToC Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan	IV-3

	Masyarakat Miskin	
Grafik 4.3	ToC Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro	IV-6
Grafik 4.4	Tren APBD Kabupaten Musi Banyuasin Per-Urusan Tahun 2018-2022	IV-7
Grafik 4.5	Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	IV-8
Grafik 4.6	Tren Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020	IV-9
Grafik 4.7	Tren Belanja Langsung Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020	IV-10
Grafik 4.8	Tren Belanja Tidak Langsung Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020	IV-10

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 5.1 Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	V-1
Gambar 5.2 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Energi Listrik	V-2
Gambar 5.3 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Pasar	V-3
Gambar 5.4 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Puskesmas	V-4
Gambar 5.5 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Rumah Sakit	V-5
Gambar 5.6 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SD Sederajat	V-6
Gambar 5.7 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SMP Sederajat	V-7
Gambar 5.8 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SMA Sederajat	V-8
Gambar 5.9 Peta Prioritas Wilayah Terhadap Aksesibilitas Jalan	V-9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang saat ini bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global dimana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan, terlepas apakah itu negara berkembang maupun negara sedang berkembang. Sementara negara majupun sangat tertarik membahas kemiskinan dikarenakan kemiskinan negara berkembang berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik negara maju.

Pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

Peningkatan peranan Pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan pendidikan, kesehatan, akses air bersih melalui Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang berhadapan langsung dengan masyarakat miskin, kemudian mengambil kebijakan untuk mendorong percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan kelembagaan dengan membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Secara kelembagaan yang khusus berkonsentrasi pada penanggulangan kemiskinan di daerah telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin. Tim tersebut harus mampu mengawal berjalannya semua program penanggulangan kemiskinan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang tepat. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta

Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. TKPKD yang dikomandoi oleh Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat menjadi lokomotif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah selain itu juga menjaga sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan dokumen perencanaan sektoral yang memuat tentang kondisi kemiskinan, permasalahan dan strategi serta rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak dan sektoral. RPKD disusun bersamaan dengan Rencana Pembangunan Daerah, diharapkan dapat memberikan warna dalam upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Musi Banyuasin dimaksudkan untuk :

1. Mempertegas komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan berbagai pihak lainnya dalam menghadapi masalah kemiskinan.
2. Memperkaya analisis dan pemahaman terhadap masalah kemiskinan serta potensi-potensi yang ada dengan melibatkan seluruh stakeholders.
3. Memperluas kesempatan dan keterlibatan *stakeholders* dalam perencanaan program baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Mendorong Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk lebih proaktif, peduli dan memiliki kemampuan dalam penyusunan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin.
5. Mendorong kemandirian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menerapkan pembangunan partisipatif melalui sinergi penyusunan program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah :

1. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Membangun konsesus bersama untuk mengatasi kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan dalam perumusan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan.
3. Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama tujuan penanggulangan kemiskinan.
4. Sebagai dasar kebijakan dalam penanganan kemiskinan di daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah, didayagunakan untuk menyusun langkah (rencana aksi) yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui serangkaian program dan kegiatan dalam satu wadah koordinasi yang lebih mantap, komprehensif, akseleratif dan berkelanjutan
5. Terintegrasinya RPKD kedalam RKPD dan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin secara bertahap dan berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar Hukum Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026;
 11. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 13/KPTS-BAPPEDA/2023 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Memuat latar belakang, tujuan, dasar hukum, peran TKPK dalam penyusunan RPKD dan sistematika penulisan;

Bab II : Kondisi Umum Daerah

Memuat letak geografis, demografis, akses Kabupaten Musi Banyuasin kepada pelayanan publik, informasi sosial

budaya, perekonomian dan capaian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;

Bab III : Profil Kemiskinan Daerah

Memuat informasi kondisi kemiskinan daerah berdasarkan referensi atau hasil kajian dengan menyebutkan sumber yang digunakan;

Bab IV : Prioritas Program

Memuat informasi prioritas program terhadap kondisi kemiskinan daerah;

Bab V : Lokasi Prioritas

Memuat lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program prioritas untuk penanggulangan kemiskinan;

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Geografis dan Demografis

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Banyuasin sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Selatan, letaknya diapit oleh Provinsi Jambi di sebelah Utara, Kabupaten Muara Enim di sebelah Selatan, Kabupaten Musi Rawas di sebelah Barat dan Kabupaten Banyuasin di sebelah Timur. Secara geografis terletak pada posisi antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45' Bujur Timur. Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km² atau sekitar 15 persen dari luas Provinsi Sumatera Selatan, terbagi atas 15 wilayah kecamatan dan 240 desa / kelurahan. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas terbesar yaitu 4847 Km², sedang Kecamatan Lawang Wetan merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 232 Km².

Dilihat dari persentase luas wilayah di setiap kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Bayung Lencir, Batang Hari Leko dan Babat Toman mempunyai persentase yang terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

**Tabel 2.1
Nama dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin**

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah terhadap total (%)
1	Sanga Desa	317,00	2,22
2	Babat Toman	1.291,00	9,05
3	Batang Hari Leko	2.107,79	14,77
4	Plakat Tinggi	247,00	1,73
5	Lawang Wetan	232,00	1,63
6	Sungai Keruh	330,12	2,31
7	Sekayu	701,60	4,92
8	Lais	755,53	5,30

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah terhadap total (%)
9	Sungai Lilin	374,26	2,62
10	Keluang	400,57	2,81
11	Babat Supat	511,02	3,58
12	Bayung Lencir	4.847,00	33,98
13	Lalan	1.031,00	7,23
14	Tungkal Jaya	821,19	5,76
15	Jirak Jaya	298,88	2,10
Jumlah		14.265,96	100

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 Kecamatan, Sekayu merupakan Ibukota Kabupaten yang menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten. Kecamatan Lalan merupakan daerah yang Musi paling jauh jaraknya ke pusat Kabupaten, disusul oleh Kecamatan Bayung Lencir, Tungkal Jaya dan Sanga Desa. Berikut ini disajikan tabel jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel. 2.2
Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (Km)
01. Babat Toman	Babat	41
02. Plakat Tinggi	Sido Rahayu	43
03. Batanghari Leko	Tanah Abang	30
04. Sanga Desa	Ngulak I	73
05. Sungai Keruh	Tebing Bulang	33
06. Sekayu	Sekayu	1
07. L a i s	Lais	42
08. Sungai Lilin	Sungai Lilin	65
09. Keluang	Keluang	25
10. Bayung Lencir	Bayung Lencir	137
11. Lalan	Bandar Agung	200
12. Lawang Wetan	Ulak Paceh	25

13. Babat Supat	Babat Banyuasin	52
14. Tungkal Jaya	Peninggalan	82
15. Jirak jaya	Jirak	63

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Secara Administrasi Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 15 Kecamatan dan 240 Desa/Kelurahan. Jumlah Desa/Kelurahan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Nama Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Sanga Desa	17	2
2	Babat Toman	11	2
3	Batang Hari Leko	16	-
4	Plakat Tinggi	15	-
5	Lawang Wetan	15	-
6	Sungai Keruh	22	-
7	Sekayu	10	4
8	Lais	15	-
9	Sungai Lilin	13	2
10	Keluang	13	1
11	Babat Supat	16	-
12	Bayung Lencir	21	2
13	Lalan	27	-
14	Tungkal Jaya	16	-
15	Jirak Jaya	12	-
Jumlah		227	13

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

1. Klimatologi

Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan antara 48,60 - 396,50 mm sepanjang tahun 2020. Curah hujan Musi paling banyak pada bulan April 2020. Hari hujan pada tahun 2020 menunjukkan variasi antara 10 - 18 hari, dengan hari hujan Musi paling banyak pada bulan Januari 2020. Penyinaran matahari bervariasi dari 37,93%-76,53% dengan penyinaran matahari tertinggi di bulan Agustus 2020.

2. Topografi

Pola topografi ini sedikit banyak mempengaruhi bentuk tata guna lahan yang ada, kondisi pola topografi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 16 sampai dengan 68 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.4
Tinggi Wilayah Di Atas Permukaan Laut (DPL)
Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin

Kecamatan	Tinggi DPL (m)
01. Babat Toman	17
02. Plakat Tinggi	22
03. Batanghari Leko	21
04. Sanga Desa	26
05. Sungai Keruh	24
06. Sekayu	16
07. L a i s	21
08. Sungai Lilin	14
09. Keluang	33
10. Bayung Lencir	23
11. Lalan	20
12. Lawang Wetan	18
13. Babat Supat	37
14. Tungkal Jaya	32
15. Jirak Jaya	68

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

3. Hidrologi

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah rawa dan sungai besar serta kecil seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Batanghari Leko dan lain-lain. Untuk aliran Sungai Musi yang berada di bagian Timur dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Disamping itu daerah ini juga terdiri dari lebak dan danau-danau kecil. Guna memenuhi keperluan penduduk dalam hal pemenuhan air bersih, keberadaan sungai dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air baku.

4. Daerah Aliran Sungai

Kelestarian fungsi sumber daya air, berdasarkan pada letak atau posisinya sumber daya air dibedakan menjadi air tanah dan air permukaan. Air permukaan terdiri dari sungai, danau, rawa-rawa dan perairan laut, sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin beserta debit rata-rata hariannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama DAS	Panjang Sungai (KM)	Luas DAS (Ha)	Debit (M3/dtk)
Sungai Ibul (Anak Sungai Musi)	35	14.500	3,3
Sungai A. Calik (Anak Sungai A.Banyuasin)	57	96.400	28
Sungai Dawas (Anak Sungai A. Calik)	50	6.500	1,6
Sungai Supat (Anak Sungai A. Calik)	32	22.600	5,1
Sungai Keluang (Anak Sungai A. Calik)	19	9.400	2,1
Sungai Tungkal (Anak Sungai A. Calik)	82	149.500	33,6
Sungai Lalan (Anak Sungai A.Banyuasin)	243	830.300	196,8
Sungai Merang (Anak Sungai Lalan)	66	83.900	24,4
Sungai Bohar (Anak Sungai Lalan)	20	10.000	2,2
Sungai Medak (Anak Sungai Lalan)	72	108.300	25,7
Sungai Tungkal (Anak Sungai Lalan)	25	5.900	1,9
Sungai Serdang (Anak Sungai Lalan)	34	8.300	2,4
Sungai Meranti (Anak Sungai Lalan)	28	15.100	4,4
Sungai Kepahiang (Anak Sungai Lalan)	16	13.300	3,9
Sungai Mangsang (Anak Sungai Lalan)	18	7.400	1,8
Sungai Mendis (Anak Sungai Lalan)	19	3.900	0,9
Sungai Batang Hari Leko (Anak Sungai	176	374.600	103,9

Musi)			
Sungai Kapas (Anak S. Batang Hari Leko)	63	71.300	16,9
Sungai Meranti (Anak S. Batang Hari Leko)	38	26.400	8,8
Sungai Putat (Anak S. Batang Hari Leko)	38	20.100	8,6
Sungai A. Aur (Anak S. Batang Hari Leko)	19	12.700	5,4
Sungai Rampasan (Anak S. Batang Hari Leko)	19	11.600	4,9
Sungai Angit (Anak S. Batang Hari Leko)	13	5.300	2,3
Sungai Kukui (Anak S. Batang Hari Leko)	15	10.200	4,3
Sungai Lalang (Anak S. Batang Hari Leko)	25	21.900	5,2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Musi Banyuasin, 2020

5. Rawa

Kabupaten Musi Banyuasin tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Organosol : Di dataran rendah atau rawa-rawa yang sebagian terdapat di Bayung Lencir, Lais dan Lalan.
2. Klei Humus : Penyebarannya mengikuti Organosol terdapat di sebagian daerah Bayung Lencir, Lalan, Sungai Lilin, Batanghari Leko, Sekayu, Babat Toman, Lawang Wetan dan Sanga Desa.
3. Alluvial : Terdapat di sepanjang Sungai seperti daerah Sungai Lilin, Sekayu, Babat Supat, Lais, Batanghari Leko, Babat Toman, Keluang dan Sanga Desa.
4. Podzolik : Sebagian Besar terdapat di daerah Sungai Keruh, Plakat Tinggi, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lais, Sungai Lilin.

6. Kawasan Lindung

1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan Lindung Kademba dan Kawasan Hutan Lindung Sungai Jernih dengan luas kurang lebih 16.233 (enam belas ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar, yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Sanga Desa.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya yaitu Kawasan Rawa Gambut Muara Medak dengan luas kurang lebih 24.768 (dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Bayung Lencir.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan Sempadan sungai di Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, Sungai Dawas dengan luas kurang lebih 11.134 (sebelas ribu seratus tiga puluh empat) hektar, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan seluas 30 (tiga puluh) persen dari luas perkotaan dengan luas RTH sebesar kurang lebih 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima) hektar.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri atas :

- Suaka Margasatwa (SM) Bentayan dengan luas kurang lebih 16.553 (enam belas ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Tungkal Jaya.
- Suaka Margasatwa (SM) Dangku dengan luas kurang lebih 47.978 (empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Keluang, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Tungkal Jaya.
- Suaka Margasatwa (SM) Buaya Senyulong seluas kurang lebih 13.871 (tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh satu) hektar yang terletak di Kecamatan Bayung Lencir.
- Taman Nasional Sembilang dengan luas kurang lebih 2.906 (dua ribu sembilan ratus enam) hektar terletak di Kecamatan Lalan.
- Taman Nasional Sembilang Laut (perairan) dengan luas kurang lebih 214 (dua ratus empat) hektar yang terletak di kecamatan Lalan.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi :

- Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir,

Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Sekayu.

- Kawasan rawan banjir terletak di kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, dan Kecamatan Batanghari Leko.
- Kawasan yang pernah terjadi dan rawan terjadinya longsor didinding sungai ini seperti Kecamatan Sekayu, Lais dan Sanga Desa.
- Angin Puting Beliung pernah terjadi beberapa kali seperti misalnya di Kecamatan Sekayu.

6. Kawasan Budidaya

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi, meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas kurang lebih 94.980 (sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko dan Kecamatan Bayung Lencir.
- Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas kurang lebih 409.719 (empat ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Babat Supat dan Kecamatan Tungkal Jaya.
- Hutan Produksi Konveksi (HPK) dengan luas kurang lebih 66.408 (enam puluh enam ribu empat ratus delapan) hektar yang berada di Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan Lalan, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Tungkal Jaya.

b. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi :

- Kawasan budidaya tanaman pangan dengan luas kurang lebih 125.062 (seratus dua puluh lima ribu enam puluh dua) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan,

Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan.

- Kawasan budidaya tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayur – sayuran dengan luas kurang lebih 3.031 (tiga ribu tiga puluh satu) hektar yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang dan Kecamatan Lalan. Selain itu juga terdapat tanaman buah – buahan dengan luas kurang lebih 3.262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) hektar yang tersebar di beberapa kecamatan.

c. Kawasan peruntukan perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan adalah pertanian tanaman tahunan seluas kurang lebih 581.811 (lima ratus delapan puluh satu delapan ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

d. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan adalah peruntukan pengembangan peternakan besar yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Lilin sedangkan peternakan kecil terletak di Kecamatan Bayung Lencir.

e. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan, meliputi :

- Kawasan peruntukan perikanan tangkap;

Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Lalan.

- Kawasan peruntukan perikanan budidaya

Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan

Batanghari Leko, Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

- Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Kawasan pengembangan sarana dan prasarana perikanan berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

f. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan pertambangan batubara, yang berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.

g. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah industri kecil yang berupa industri pangan yang terletak di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir. Industri sandang yang terletak di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Keluang. Industri kimia dan logam terletak di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Sungai Lilin.

h. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi :

1. Danau Ulak Lia/*Ulak Lia Lake*, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu;
2. Danau Konger/*Konger Lake*, Desa Sungai Dua, Kecamatan Sungai Keruh;
3. Pulau Pandak dan Pulau Panjang Kecamatan Sanga Desa;
4. Sungai Kubu/*Kubu River*, Desa Karang Agung, Kecamatan Lalan;
5. Agro Wisata Perkebunan Gambir/*Gambir Estate*, Desa Toman Kecamatan Babat Toman;
6. Tambang Minyak Tradisional, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman;
7. Tambang Minyak Modern Desa Bonot Kecamatan Lais;
8. Kebudayaan Suku Anak Dalam Kecamatan Bayung Lencir;
9. Goa Jepang Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa;
10. Candi Sereka Desa Sereka Kecamatan Babat Toman.

i. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan jasa serta pusat pemerintahan meliputi : Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Babat Toman.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan Peruntukan Permukiman meliputi :

- Permukiman Perkotaan

Permukiman perkotaan sebagaimana seluas kurang lebih 22.517 (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh belas) hektar dikembangkan di kawasan perkotaan Sekayu, kawasan perkotaan Sungai Lilin, kawasan perkotaan Bayung Lencir dan kawasan perkotaan Babat Toman.

- Permukiman Perdesaan

Permukiman perdesaan di seluruh kecamatan dengan luas kurang lebih 13.542 (tiga belas ribu lima ratus empat puluh dua) hektar terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Tungkal Jaya dan Kecamatan Babat Supat.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan Data yang disadur dari laman BPS tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebanyak 633.124 jiwa. Angka ini terus meningkat dari 2021 dengan jumlah penduduk sebanyak 627.070 jiwa, maka Kabupaten Musi Banyuasin memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,31 persen. Dilihat dari jumlah penduduknya, Kabupaten Musi Banyuasin termasuk salah satu kabupaten/kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan yang mungkin akan menyebabkan terjadinya bonus demografi penduduk yang pada akhirnya dikhawatirkan akan meningkatkan angka pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Bertambahnya penduduk dari tahun ke tahun ternyata tidak diikuti dengan pemerataan penyebaran penduduk. Apabila dilihat dari persebarannya, Kecamatan Sekayu merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di

Kabupaten Musi Banyuasin yakni sebanyak 93.424 jiwa atau 14,75 persen dari total jumlah penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Sedangkan Kecamatan Jirak Jaya merupakan daerah dengan jumlah penduduk Musi paling sedikit sebanyak 19.739 jiwa atau 3,00 persen. Kepadatan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 tercatat sebesar 43,91 jiwa/km² meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,38 jiwa/km². Dengan luas wilayah sebesar 14.686,96 km², maka setiap 1 km² rata-rata ditempati penduduk sebanyak 44 orang pada tahun 2022. Sebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa Kecamatan Sungai Lilin dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 168,76 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Plakat Tinggi dengan masing-masing kepadatan penduduk sebesar 133,16 jiwa/km² dan 112,00 jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Batang Hari Leko (9,36 jiwa/km²), Kecamatan Bayung Lencir (15,82 jiwa/km²) dan Kecamatan Babat Toman (28,66 jiwa/km²).

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin belum merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sekayu (14,74%), Kecamatan Bayung Lencir (11,55%), Kecamatan Sungai Lilin (10,16%), Kecamatan Lais (8,59%) dan Kecamatan Tungkal Jaya (7,86%). Kelima kecamatan ini dihuni oleh sekitar 52,9 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk Musi paling sedikit adalah Kecamatan Jirak Jaya (3,03%), Kecamatan, Batanghari Leko (3,22%) dan Sungai Keruh (3,77%).

Tabel 2.6
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Sanga Desa	317	19	33.505	2,53	105,69
2.	Babat Toman	1.291	14	37.000	2,61	28,66
3.	Batang Hari Leko	2.107,79	16	19.739	2,69	9,36
4.	Plakat Tinggi	247	15	27.665	2,18	112
5.	Lawang Wetan	232	15	25.730	2,34	110,91

6.	Sungai Keruh	629	11	23.470	2,59	71,10
7.	Jirak Jaya	421	12	19.183	2,57	64,18
8.	Sekayu	701,60	14	93.424	2,16	133,16
9.	Lais	755,53	16	53.485	2,01	70,79
10.	Sungai Lilin	374,26	15	63.159	2,02	168,76
11.	Keluang	400,57	14	33.543	2,02	83,74
12.	Babat Supat	511,02	16	36.516	2,12	71,46
13.	Bayung Lencir	4.847	23	76.685	2,74	15,82
14.	Lalan	1.031	27	39.489	2,26	38,30
15.	Tungkal Jaya	821,19	16	50.531	2,30	61,53
	Jumlah	14.686,96	243	633.124	2,31	44,38

Sumber : Disdukcapil Kab. Muba, 2021

Komposisi penduduk Kabupaten Musi Banyuasin didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk usia 0-14 tahun sebanyak 28,97 persen dan penduduk usia 15- 64 tahun sebesar 66,49 persen, lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun yang hanya sebesar 4,53 persen.

Tabel 2.7
Indikator Kependudukan Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2010 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2010	2020
Jumlah penduduk (jiwa)	561.458	622.206
Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2010-2020 (%)	-	1
Kepadatan penduduk (jiwa/Km ²)	39,36	43,61
Sex Ratio (L/P) %	105,66	106,27
% Penduduk menurut kelompok umur :		
0-14 Tahun	31,78	28,97
15-64 Tahun	64,62	66,49
+65 Tahun	3,59	4,53

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Data persebaran penduduk antara lain berguna untuk melihat tingkat pemerataan/ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah, potensi jumlah sumber daya manusia di suatu wilayah dan potensi daya dukung sumber daya alam terhadap jumlah penduduk.

Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara wilayah lain hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada tekanan sosial dan lingkungan, misalnya tidak seimbang penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan dan lain-lain. Pada sisi sebaliknya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 2.8
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Sekayu	47.343	46.081	93.424	103.00
2.	Lais	28.146	26.707	54.853	105.00
3.	Sungai Keruh	12.560	11.929	24.489	105.00
4.	Batang Hari Leko	11.587	10.498	22.085	110.00
5.	Sanga Desa	17.743	16.966	34.709	104.00
6.	Babat Toman	19.244	18.224	37.468	106.00
7.	Sungai Lilin	32.661	30.970	63.631	105.00
8.	Keluang	17.321	16.536	33.857	105.00
9.	Bayung Lencir	41.460	37.107	78.567	112.00
10.	Plakat Tinggi	14.085	13.627	27.712	103.00
11.	Lalan	21.175	19.057	40.232	111.00
12.	Tungkal Jaya	26.613	24.385	50.998	109.00
13.	Lawang Wetan	13.821	13.210	27.031	104.00
14.	Babat Supat	18.373	17.739	36.112	104.00
15.	Jirak Jaya	10.211	9.453	19.664	108.00
	J u m l a h	332.343	312.489	644.832	

Sumber : Disdukcapil, 2021

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 sebesar 106,00 persen, yang artinya terdapat 106 orang laki-laki untuk setiap 100 orang perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk laki-laki sebesar 51,52 persen, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk perempuan sekitar 48,48

persen. Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan rasio jenis kelamin di level kecamatan secara umum selaras dengan level Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin diukur dari perkembangan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, kemiskinan dan indeks Pembangunan Manusia. Aspek utama dalam mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan salah satunya adalah aspek kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan analisis pada fokus utama pembangunan yang secara langsung berkaitan dengan aspek ini yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Musi Banyuasin tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,42 persen (*y-on-y*). Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan antara lain Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,25 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 2,17 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,07 persen. Sedangkan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami kontraksi sebesar 2,98 persen.

Struktur PDRB Kabupaten Musi Banyuasin menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Musi Banyuasin masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Musi Banyuasin yaitu sebesar 66,53 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,25 persen; Komponen PK-P sebesar 5,98 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,80 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,02 persen. Sementara itu, Komponen Net Ekspor bernilai negatif, yang artinya pada tahun 2021 nilai

impor sebagai faktor pengurang lebih besar daripada nilai ekspor, yang dalam PDRB Musi Banyuasin Net Ekspor memiliki peran sebesar 2,58 persen.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha	Tahun 2020 Terhadap Tahun 2019 (y-on-y)	Tahun 2021 Terhadap Tahun 2020 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2021 (y-on-y)
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,47	4,21	0,55
B. Pertambangan dan Pengalihan	-1,65	2,70	1,60
C. Industri Pengolahan	1,27	2,65	0,21
D. Pengadaan listrik dan Gas	13,09	6,41	0,00
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,97	0,41	0,00
F. Konstruksi	2,55	3,64	0,25
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,37	7,75	0,24
H. Transportasi dan Pergudangan	-1,33	-0,33	0,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,29	6,67	0,01
J. Informasi dan Komunikasi	14,16	9,35	0,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	2,83	0,05
L. Real Estate	4,62	7,74	0,13
M. Jasa Perusahaan	0,45	0,64	0,00
N. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,16	6,22	0,18
O. Jasa Pendidikan	2,04	6,55	0,12
P. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,63	7,78	0,03
Q. Jasa Lainnya	6,94	2,83	0,02
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	-0,04	3,42	3,42

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2018 sebesar 60.861,46 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 66.089,04 milyar rupiah dan tahun 2020 sebesar 66.515,38 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Musi Banyuasin dengan migas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010 yaitu tahun 2018 sebesar 42.670,21 milyar rupiah, tahun 2019 sebesar 44.620,40 milyar rupiah dan tahun 2020 sebesar 44.604,66 milyar rupiah.

2.2.1.2 PDRB Perkapita.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020) PDRB per kapita Atas Harga Berlaku (ADHB) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 85.017,39 Milyar lalu meningkat menjadi Rp. 101.488,07 Milyar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Atas Harga Konstan (ADHK) dengan migas Kabupaten Musi Banyuasin juga menunjukkan tren yang meningkat. Tahun 2016 PDRB per kapita sebesar Rp. 64.647,20 Milyar lalu meningkat menjadi Rp. 68.057,05 Milyar pada tahun 2020. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.10
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan
Atas Dasar Harga Konstan dengan Migas Periode 2017-2022
(dalam Milyar Rupiah)

PDRB PerKapita	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ADHB	88.950,20	95.300,78	102.135,05	101.488,07	116.007,34	130.679,83
ADHK	65.642,82	66.815,75	68.957,08	68.057,05	72.744,72	82.736,54

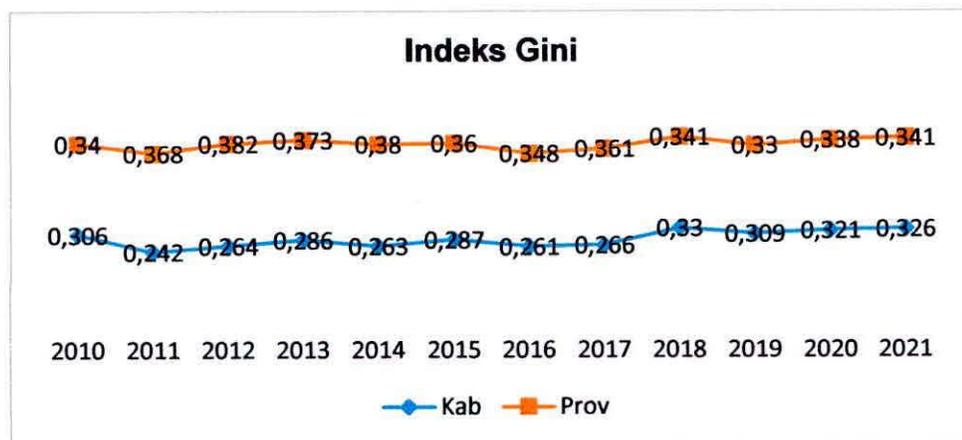
Sumber : BPS Kab. Muba, 2021

2.2.1.3 Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Indeks Gini menunjukkan pemerataan yang sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Berdasarkan data BPS, bahwa indeks gini di Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2011-2021 cenderung fluktuatif. Secara umum selama periode tersebut ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin cenderung meningkat. Beberapa penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Musi Banyuasin, antara

lain distribusi pengeluaran penduduk kaya semakin meningkat dibandingkan penduduk miskin, perbedaan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan, pendapatan pekerja informal yang sangat rendah dibandingkan pekerja formal, harga komoditas yang fluktuatif seperti karet dan sawit, perbedaan kesempatan mengakses pendidikan dan kesehatan serta krisis global.

Grafik 2.1
Indeks Gini Kabupaten Musi Banyuasin dan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 – 2021



Sumber : BPS Kab. Muba, 2021

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan, indeks gini Kabupaten Musi Banyuasin lebih baik atau dengan kata lain bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Musi Banyuasin lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan Kabupaten Musi Banyuasin adalah 0,326 menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,321. Namun demikian ketimpangan ini harus terus dikurangi dengan meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

2.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan 4 (empat) variabel pokok yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Riil. Indeks Pembanguana Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin terus memperlihatkan perkembangan yang positif . Dalam kurun waktu tahun 2013 - 2021, tren IPM Kabupaten Musi Banyuasin terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meningkat sebesar 3,92 poin yang menunjukkan semakin baiknya pembangunan manusia di Kabupaten Musi Banyuasin walaupun masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Sumatera

Selatan. Untuk tahun 2013 capaian IPM Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 64,18 dan terus meningkat menjadi 68,10 pada tahun 2021.

Grafik 2.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2013-2022



2.2.1.5 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan daerah digambarkan secara umum, dengan menggunakan indikator kemiskinan konsumsi (satu dimensi) yaitu : (i) Persentase Penduduk Miskin (P0); (ii) Jumlah Penduduk Miskin; (iii) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); (iv) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indikator-indikator tersebut dianalisis untuk melihat posisi relatif capaiannya dibandingkan wilayah lain yang setingkat baik dalam satu Provinsi maupun secara Nasional, serta perkembangannya dari tahun ke tahun untuk melihat *trendnya*. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2010 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.3
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Musi Banyuasin



Apabila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, Kabupaten Musi Banyuasin telah menurunkan angka kemiskinan sebesar 4,22 tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Musi Banyuasin selama ini sudah cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, tetap diperlukan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan 1 digit menurunkan proporsi penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan
Tahun 2013-2022

No.	Kab/Kota	Penduduk Miskin (%)									
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Musi Rawas Utara				20,00	19,49	19,12	19,12	19,47	20,11	18,45
2.	Lahat	18,61	18,02	18,02	17,11	16,81	16,15	15,92	15,95	16,46	15,61
3.	Musi Banyuasin	18,02	17,38	18,35	17,27	16,75	16,41	16,52	16,13	15,84	15,19
4.	Ogan Komering Ilir	15,82	15,3	17,08	16,03	15,75	15,28	15,01	14,73	14,68	13,23
5.	Musi Rawas	17,85	17,28	15,13	14,3	14,24	13,76	13,37	13,5	13,89	13,34
6.	Ogan Ilir	13,86	13,38	14,43	13,8	13,58	13,19	13,31	13,36	13,82	12,33
7.	Empat Lawang	13,1	12,89	13,33	12,54	12,44	12,25	12,3	12,63	13,35	12,03
8.	Lubuk Linggau	14,37	13,9	15,16	13,99	13,12	13,02	12,95	12,71	13,23	12,68
9.	PALI				14,26	14,53	13,81	13,47	12,62	12,91	11,76
10.	Ogan Komering Ulu	12,31	11,96	13,22	13,29	12,95	12,61	12,77	12,75	12,62	11,61
11.	Muara Enim	14,26	13,76	14,54	13,56	13,19	12,56	12,41	12,32	12,32	11,12
12.	Prabumulih	11,23	10,86	12,12	11,44	11,42	11,39	11,61	11,59	12,2	11,28
13.	Palembang	13,36	12,93	12,85	12,04	11,4	10,95	10,9	10,89	11,34	10,48
14.	OKU Selatan	11,57	11,21	11,58	10,95	10,98	10,64	10,53	10,85	11,12	10,56
15.	Banyuasin	12,28	11,88	12,54	11,72	11,47	11,32	11,32	11,17	10,75	10,00
16.	OKU Timur	10,28	10,13	11,24	11,29	11	10,57	10,43	10,43	10,6	10,05
17.	Pagar Alam	9	8,9	9,64	9,19	8,89	8,77	8,9	9,07	9	8,47

Sumber : BPS, 2021

Upaya penurunan tingkat kemiskinan memang menghadapi kendala yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan pokok sedangkan disisi lain merosotnya harga komoditas utama Kabupaten Musi Banyuasin seperti karet dan sawit, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan pendapatannya dari komoditas tersebut sehingga menurunkan daya beli masyarakat. Disamping itu juga disebabkan meningkatnya garis kemiskinan

dan tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan yang selama ini terjadi pada penduduk miskin di Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, ataupun ketrampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas bagi penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan tidak mempunyai tanah garapan, atau walaupun ada, relatif kecil sekali. Sehingga mendorong mereka untuk menjadi buruh tani/perkebunan atau pekerja kasar di luar pertanian/perkebunan. Namun, karena bekerja di pertanian/perkebunan berdasarkan Musiman, kesinambungan pekerjaan mereka menjadi kurang terjamin, Banyak di antara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya, di dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar saat ini membuat tingkat upah mereka menjadi rendah sehingga mengurung mereka selalu hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini mengakibatkan pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara itu, mereka juga tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan mereka berMusi paling ke lintah darat. Permasalahan selanjutnya adalah tingkat pendidikan golongan miskin umumnya rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian juga dengan anak-anak mereka, tidak dapat menyelesaikan sekolah mereka karena harus membantu orangtua mereka mencari nafkah tambahan sehingga mengakibatkan banyak penduduk miskin tidak mempunyai ketrampilan dan pendidikan.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan sebagai lokasi Fokus Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem. Miskin Ekstrem adalah kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan USD1,9 PPP per hari atau Rp. 11.941 perkapita per hari (Rp. 358.233,- per kapita per bulan). Setidaknya, ada tiga hal yang bisa dipahami sebagai penyebab kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi sosial budaya,

keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, rendahnya pendidikan, kesehatan dan keterbatasan akses terhadap lapangan kerja.

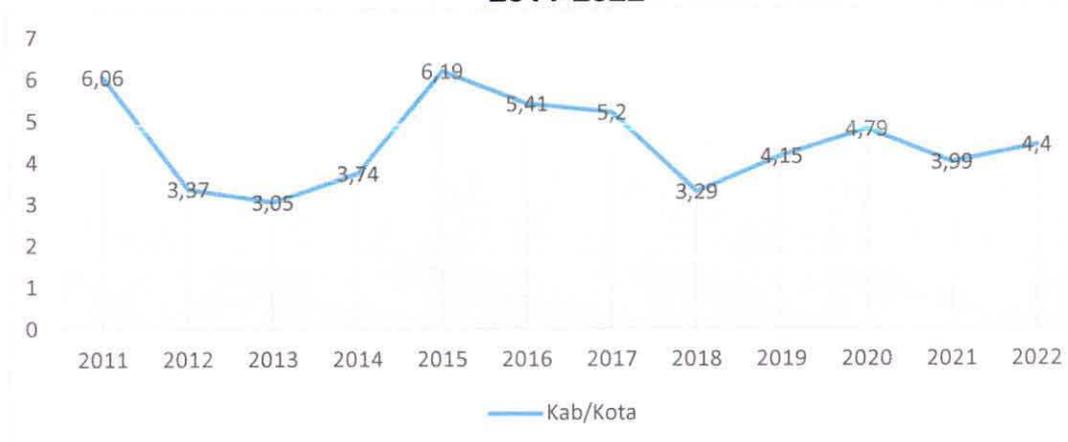
Bapak Presiden memberikan arahan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 di seluruh Indonesia atau 6 tahun lebih cepat dibandingkan target yang ada di SDGs. Oleh sebab itu seluruh elemen harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar Kementerian/Lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2011 sampai dengan 2022 terus berfluktuasi. Dari 6,06 persen pada tahun 2011 menjadi 4,4 persen pada tahun 2022. Tingkat pengangguran 3,99 persen artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang yang menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan oleh :

- a. Tingkat pendidikan dan kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- b. Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang mengakibatkan sedikitnya kesempatan.

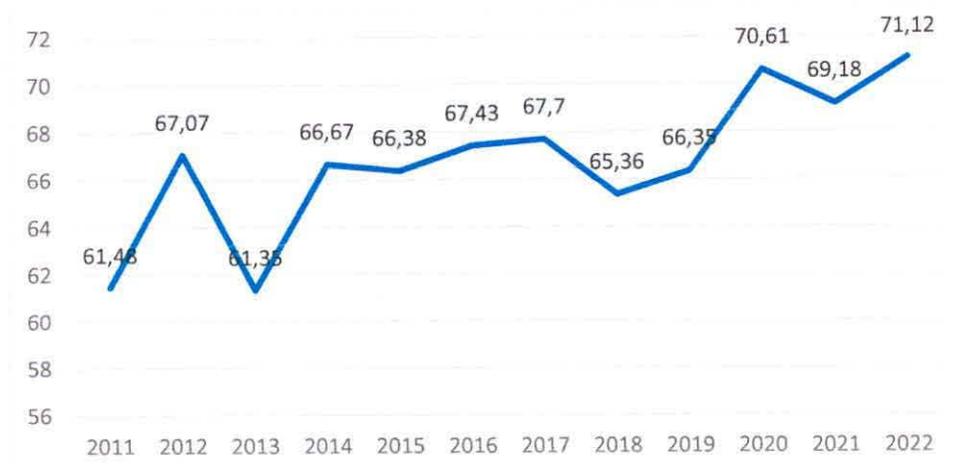
Grafik 2.4
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Muba Tahun 2011-2022



Sumber : BPS Kab. Muba, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan grafik di bawah ini dapat dilihat perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2011 yaitu sebesar 61,48 persen, tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 67,07 persen, tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Musi Banyuasin mengalami pengurangan sebesar 5,72 persen menjadi 61,35 persen, kemudian tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,32 persen menjadi 66,67 persen. Selanjutnya terjadi kenaikan sampai dengan tahun 2017 yaitu 67,70 persen, di tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 65,36 persen dan tahun 2019 terjadi kenaikan menjadi 66,35 persen. Pada Tahun 2020 meningkat menjadi 70,61 persen dan terjadi penurunan menjadi 69,18 di Tahun 2021 dan Kembali meningkat menjadi 71,12 pada tahun 2022.

Grafik 2.5
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Musi Tahun 2011 – 2022



Sumber : BPS Kab. Muba, 2022

Penciptaan dan perluasan lapangan kerja produktif diupayakan dapat terlaksana secara mantap seiring dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka memperluas lapangan kerja produktif dan mengurangi pengangguran, telah diupayakan berbagai kegiatan melalui beberapa program di bidang ketenagakerjaan. Program-program tersebut telah berhasil memperluas lapangan kerja baru maupun meningkatkan kualitas pekerja. Namun, upaya-upaya tersebut harus terus dilakukan karena pertumbuhan

tenaga kerja baru memasuki persaingan dunia kerja yang menuntut keahlian cukup tinggi.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Kualitas SDM di suatu wilayah sangat tergantung dari kualitas pendidikan masyarakatnya. Bahkan hal ini tertuang dalam UUD 1945 dimana dikatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan merupakan salah satu tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu program pendidikan mempunyai peranan besar dalam memajukan bangsa, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Pembangunan manusia dibidang pendidikan seharusnya menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di daerah. Terutama pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, SDM berkualitas turut mempengaruhi mutu pembangunan daerah. Berbagai indikator yang dapat dijadikan potret pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin akan dibahas pada bagian ini.

Rata-rata lama sekolah adalah jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas). Semakin lama rata-rata lama bersekolah penduduk, berarti semakin baik tingkat pendidikan penduduk tersebut. Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk di Musi Banyuasin adalah 7,59 tahun. Artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 (tingkat VII).

Tabel 2.12
Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah	7,59	7,6	7,61	7,62	7,63

Dalam perkembangannya, rata-rata lama sekolah tampak mengalami peningkatan hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 7,63 artinya mayoritas penduduk dewasa di Musi Banyuasin adalah berpendidikan tamat SMP kelas 1 atau kelas 2.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk menunjukkan seberapa proporsi dari penduduk kelompok usia tertentu yang sedang/masih bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia yang bersesuaian. Angka partisipasi sekolah ini dapat digunakan

untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

2.2.2.2 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Pada Tahun 2021 APK SD 111,3, SMP 95,13 dan SMA 78,59.

2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok tersebut. APM SD sebesar 99,43 lebih besar dari APM SMP dan SMA.

Dalam tabel 2.13 dapat dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2021.

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka Partisipasi Kasar (APK) Formal dan Non formal Penduduk
menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APS			
7-12 Tahun	99,62	99,22	99,43
13-15 Tahun	99,20	93,48	96,09
16-18 Tahun	69,77	64,34	67,22
APM			
SD	99,62	99,22	99,43
SMP	88,49	80,75	84,28
SMA	62,23	56,03	59,32
APK			
SD	110,01	112,16	111,03
SMP	106,20	85,84	95,13
SMA	81,45	75,35	78,59

Sumber : BPS Kab. Muba, 2021

2.2.2.4 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan indikator lain yang merupakan penilaian Musi paling dasar dari tingkat intelektualitas. Pada Tahun 2021 Angka Melek Huruf Latin di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 98,11 persen, artinya sebesar 98,11 persen penduduk sudah mampu membaca dan menulis dan masih ada sebesar 1,89 persen penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang belum bisa baca-tulis. Untuk Angka Melek Huruf lainnya masih di angka 42,96 persen.

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf Tahun 2021

Karakteristik	Angka Melek Huruf	
	Huruf Latin	Huruf Lainnya
Jenis Kelamin		
Laki-laki	99,34	42,45
Perempuan	96,82	43,50
Kelompok Pengeluaran		
40 % Terbawah	97,58	44,13
40% Tengah	98,07	42,41
20 % Teratas	99,05	42,05
Musi Banyuasin	98,11	42,96

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Tabel 2.15
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Tahun 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak Bersekolah lagi	Jml
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat		
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	3,25	14,68	4,55	7,06	70,46	100
Perempuan	4,48	14,17	4,59	5,88	70,88	100
Kelompok Pengeluaran						
40 % Terbawah	4,51	18,21	6,01	6,44	64,84	100
40% Tengah	3,30	13,41	3,63	6,32	73,35	100
20 % Teratas	3,66	9,17	3,62	6,89	76,67	100
Musi Banyuasin	3,85	14,43	4,57	6,48	70,66	100

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Berdasarkan status pendidikan penduduk Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk tidak/belum pernah bersekolah sebesar 3,85 persen, yang masih bersekolah (duduk dibangku SD, SMP dan SMA) sebanyak 25,48 persen dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 70,66 persen.

2.2.2.5 Usia Harapan Hidup

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin terutama pada tingkat Puskesmas dan Pustu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

Usia harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi usia harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin terutama pada tingkat Puskesmas dan Pustu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk.

Pada tabel dibawah terlihat angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2014 sampai dengan 2021 selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya . Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan derajat kesehatan penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin. Angka Harapan Hidup tahun 2020 adalah 68,75 yang artinya rata-rata penduduk Musi Banyuasin akan hidup mencapai umur 68 tahun. Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 69,98 berarti terjadi peningkatan hidup menjadi 69 tahun.

Tabel 2.16
Usia Harapan Hidup Tahun 2014-2021

Tahun	Angka Harapan Hidup
2014	67,99
2015	68,09
2016	68,11
2017	68,14
2018	68,33
2019	68,54
2020	68,75
2021	69,98

Sumber : Badan Pusat Statistik , 2021

2.2.2.6 Angka Kesakitan

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk saat waktu tertentu. Status kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat produktivitas penduduk. Sebagai contoh pekerja yang tidak mengalami gangguan kesehatan akan dapat bekerja dengan jam lebih lama dan bekerja lebih optimal.

Status kesehatan penduduk secara keseluruhan dapat dilihat dengan menggunakan indikator angka kesakitan dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan adalah adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya sebagaimana biasanya. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita sakit terhadap total penduduk.

Secara umum angka kesakitan selama lima tahun mengalami penurunan tetapi pada tahun 2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2014 angka kesakitan sebesar 10,73 dan di tahun 2018 turun menjadi 9,24 dan terjadi kenaikan menjadi 11,7 pada tahun 2019 dan 12,15 di tahun 2020. Hal ini disebabkan selama dua tahun ini ada wabah pandemi dan penyakit-penyakit lain. Di tahun 2021 angka kesakitan menjadi 6,79. Sudah ada perbaikan kesehatan dan kembali hidup normal seperti biasa. Rata-rata lama sakit penduduk pada tahun 2019 sampai 2021 adalah 3,5 hari atau antara 3 sampai 4 hari.

Tabel 2.17
Angka kesakitan dan rata-rata lama sakit
tahun 2014-2021

Tahun	Angka Kesakitan	Rata-rata lama sakit
2014	10,73	NA
2015	12,8	NA
2016	9,97	NA
2017	9,33	3
2018	9,24	3,5
2019	11,07	3,5
2020	12,15	3
2021	6,79	3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

2.2.2.7 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat juga dikatakan sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2021 sebanyak 2 kasus dari 1000 kelahiran hidup. Terjadi pengurangan dari tahun sebelumnya yaitu 5 kasus pada tahun 2020.

Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan pelayanan neonatal diyakini dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Dalam penanganannya mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Tabel 2.18
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan angka Kematian Bayi Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Bayi Lahir Hidup	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi
1.	2017	14.757	49	3,3
2.	2018	13.930	51	3,7
3.	2019	13.887	45	3,2
4.	2020	12.862	58	4,5
5.	2021	12.170	36	2,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

2.2.2.8 Prevalensi Balita Stunting

Capaian prevalensi Balita stunting Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan data Riskesdas dan SSGI masih cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas Tahun 2018 angka prevalensi Musi Banyuasin sebesar 30,8 sudah dibawah capaian Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. Di tahun 2019 menjadi 23,04 yang juga sudah di bawah Provinsi dan Nasional. Namun penurunannya rendah sekali di Tahun 2021. Pada tabel dibawah ini terlihat capaian prevalensi stunting dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.19
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Musi Banyuasin 2018-2022

Pemerintah	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kabupaten Musi Banyuasin	30,8	23,04	NA	23,00	17,7
Provinsi Sumatera Selatan	31,7	28,98	NA	24,8	18,6
Pusat/Nasional	30,8	27,67	NA	24,4	21,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

2.2.2.9 Jumlah Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan aspek demografis penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan penduduk itu sendiri. Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2022 sebesar 4,40%. Capaian Kinerja Indikator Pengangguran terbuka didapat dari perbandingan jumlah pengangguran terbuka Usia Angkatan Kerja sebanyak 15.241 Orang dan jumlah Penduduk Angkatan Kerja sebanyak 346.278. Untuk kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Banyuasin selama periode tahun 2019-2022 cenderung

fluktuatif dengan persentase lebih rendah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 4,15%. Kemudian meningkat di tahun 2020 menjadi 4,79%, tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 3,99% dan Kembali meningkat menjadi 4,40 pada 2022.

Tabel 2.20
Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan dan jam kerja di Kabupaten Musi Banyuasin.

No.	Kegiatan Utama	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Angkatan Kerja	303.317	333.854	331.326	346.278
	- Bekerja	290.744	317.868	318.096	331.037
	- Pengangguran	12.573	15.986	13.230	15.241
2.	Bukan Angkatan Kerja	153.811	138.952	147.576	140.621
	- Sekolah	36.769	33.275	-	31.783
	- Mengurus Rumah Tangga	103.388	89.069	-	95.041
	- Lainnya	13.654	16.608	-	13.797
	Jumlah	457.128	472.806	478.902	486.899
	Tingkat Partisipasi AK	66,35	70,61	69,18	71,12
	Tingkat Pengangguran	4,15	4,79	3,99	4,40

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Peningkatan angka pengangguran terbuka tersebut berbanding lurus dengan peningkatan angka pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional pada tahun yang sama sebagai salah satu dampak dari kondisi pandemi Covid-19. Usaha-usaha pembinaan terhadap pengrajin akan terus dilanjutkan untuk masa-masa yang akan datang mengingat jumlah dan ragam kegiatan pengrajin cukup banyak di daerah ini yang memerlukan bimbingan dan penyuluhan.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan terdiri dari :

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Ketersediaan Sekolah

Kondisi pendidikan sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan tenaga pengajar. Sejalan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, perluasan daya tampung ruang kelas dan penyediaan fasilitas belajar siswa menjadi persyaratan keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar.

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah dan Murid Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2021

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)				Jumlah Murid (orang)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
TK/RA	196	224	224	NA	8.632	10.084	10.533	NA
SD/MI	500	502	488	481	89.764	88.589	89.518	83.443
SLTP/MTs	191	195	188	162	34.220	34.725	34.609	31.228
SMU/SMK/MA	99	101	100	N/A	25.308	26.848	28.084	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin dan Dikbud 2021

Pada tahun 2020 jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin secara umum jumlahnya cukup memadai dengan TK/RA sebanyak 224 unit, SD/MI sebanyak 488 unit, SLTP/MTs sebanyak 188 unit, SMU/SMK/MA sebanyak 100 unit, Poltek Sekayu sebanyak 1 unit dengan 3 program, AKPER sebanyak 1 unit dan Sekolah Tinggi Swasta sebanyak tiga unit dengan lima Program. Sementara jumlah murid tahun 2020 untuk tingkat TK/RA sebanyak 10.533 unit, SD/MI sebanyak 89.518 orang, SLTP/MTs sebanyak 34.609 orang dan SMU/SMK/MA sebanyak 28.084 orang.

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Sekolah

Pada tahun 2021 Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7- 12 tahun di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 99,43. Artinya pada kelompok usia 7-12 tahun hanya terdapat sebesar 0,57 persen penduduk yang tidak bersekolah. Sedangkan angka partisipasi sekolah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada kelompok usia 13-15 lebih rendah dibanding kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 96,09 dan pada usia 16-18 tahun sebesar 67,22.

Angka Partisipasi Sekolah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin untuk setiap jenjang pendidikan masih fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 sebanyak 99,67 persen penduduk kabupaten Musi Banyuasin usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan SD dan sebanyak 96,43 persen penduduk

Kabupaten Musi Banyuasin usia 13-15 tahun mengenyam pendidikan SMP. Namun hanya 67,41 persen penduduk usia 16-18 tahun yang mengenyam pendidikan SMA.

Tabel 2.22
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2021

Angka Partisipasi Sekolah	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
7-12	99,85	99,80	99,67	99,43
13-15	96,38	97,44	96,43	96,09
16-18	67,66	66,81	67,41	67,22

Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin dan Dikbud 2022

2.3.1.2 Kesehatan

Aspek kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan yang makin menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Angka harapan hidup merupakan indikator untuk mengukur tingkat kualitas hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk suatu wilayah menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan penduduk di wilayah tersebut. Usaha peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama pada tingkat puskesmas dan pustu diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunan kematian bayi sehingga akan meningkatkan pula angka harapan hidup penduduk Kabupaten Musi Banyuasin.

Salah satu usaha Pemerintah untuk meningkatkan derajat dan status kesehatan penduduk adalah dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan mempermudah jangkauan pelayanan kesehatan. Jumlah sarana kesehatan yang ada yaitu 3 Rumah Sakit Umum, 29 Puskesmas (sudah terakreditasi), 122 Puskesmas Pembantu, 282 Poskesdes, 538 Posyandu dan ditambah sarana pelayanan lain dan kefarmasian seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIK/ PENGELOLA		
		PEM.KAB/ KOTA	SWASTA	JUMLAH
1	2	5	8	9
Rumah sakit				
1	Rumah sakit umum	3		3
2	Rumah sakit khusus	-		-
Puskesmas dan jaringannya				
1	Puskesmas rawat inap	6		6
2	Puskesmas non rawat inap	23		23
3	Puskesmas keliling			
4	Puskesmas pembantu	122		122
5	POSKEDES			282
6	POSYANDU			538
Sarana pelayanan lain				
1	Rumah bersalin		1	1
2	Balai pengobatan/klinik	2	38	40
3	Praktik dokter bersama		2	2
4	Praktik dokter perorangan		42	42
5	Praktik pengobatan tradisional			-
6	Bank darah rumah sakit	1		1
7	Unit transfusi darah	1		1
8	Pusling/Ambulance			19
Sarana produksi dan distribusi kefarmasian				
1	Industri farmasi			-
2	Industri obat tradisional			-
3	Usaha kecil obat tradisional			-
4	Produksi alat kesehatan			-
5	Pedagang besar farmasi			-
6	Apotek	31	34	65
7	Toko obat		9	9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

Pada Tahun 2021 dari 15 Kecamatan yang ada terdapat Puskesmas Rawat Inap berjumlah 6 Puskesmas yang berarti 20,7% dari Jumlah

Puskesmas yang ada dan Puskesmas Non Rawat Inap (Rawat Jalan) berjumlah 23 Puskesmas yang berarti 79,3% dari jumlah Puskesmas yang ada.

Berdasarkan jumlah tenaga kesehatan pada 29 Puskesmas yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diuraikan sebagai berikut ; jumlah Puskesmas yang sudah sesuai standar dengan capaian diatas 50 % adalah sebagai berikut ; Dokter Umum (21) 75%, Puskesmas yang memiliki tenaga perawat yang sesuai standar (21) 75%, Jumlah Puskesmas yang memiliki Bidan dan sesuai standar (26) 92,86%, Puskesmas yang sesuai Standar yang memiliki tenaga Promkes (22) 78,57%, Puskesmas yang sesuai Standar yang memiliki Apoteker/Tenaga Teknis Kefarmasian (22) 57,14%, sedangkan Puskesmas yang memiliki standar yang capaiannya masih dibawah 50% adalah Puskesmas yang sesuai standar yang memiliki tenaga Laboratorium Medik (9) 32,14%, dan yang memiliki tenaga Gizi yang sesuai standar (12) 42,86%, sementara masih terlihat Puskesmas capaiannya masih sangat rendah yang sesuai Standar adalah tenaga Dokter Gigi dan Tenaga Kesehatan Lingkungan.

Tabel 2.24
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenisnya Tahun 2021

No	Puskesmas	Tenaga Kesehatan						Jumlah
		Dokter Umum/ Spesialis	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Sanitarian	Lainnya	
1	Puskesmas Ngulak	2	-	13	13	-	15	43
2	Puskesmas Babat Toman	1	-	13	18	1	20	53
3	Puskesmas Ulak Paceh	1	-	14	14	-	11	40
4	Puskesmas Tanah Abang	1	-	7	4	1	4	16
5	Puskesmas Lubuk Bintialo	2	-	3	5	1	1	12
6	Puskesmas Bukit Selabu	-	-	4	6	1	1	12
7	Puskesmas Cinta Karya	1	-	7	8	-	7	23
8	Puskesmas Suka Damai	1	-	7	5	-	13	26
9	Puskesmas Sido Rahayu	-	-	3	9	-	7	19
10	Puskesmas Tebing Bulang	2	-	8	6	-	2	18
11	Puskesmas Jirak	1	-	14	5	-	5	25
12	Puskesmas Balai Agung	3	1	9	16	2	9	41
13	Puskesmas Lumpatan	2	-	10	20	-	15	48

No	Puskesmas	Tenaga Kesehatan						Jumlah
		Dokter Umum/ Spesialis	Dokter Gigi	Bidan	Perawat	Sanitarian	Lainnya	
14	Puskesmas Lais	2	1	13	20	-	12	48
15	Puskesmas Gardu Harapan	-	-	12	6	-	12	30
16	Puskesmas Teluk Kijing	1	-	4	7	-	7	19
17	Puskesmas Tanjung Kerang	3	-	22	11	2	9	47
18	Puskesmas Sungai Lilin	2	-	17	18	2	13	50
19	Puskesmas Sri Gunung	1	-	9	11	0	1	22
20	Puskesmas Karya Maju	1	-	10	5	-	8	21
21	Puskesmas Mekar Jaya	-	-	10	14	-	5	19
22	Puskesmas Bayung Lencir	2	-	18	10	-	6	36
23	Puskesmas Sukajaya	1	-	4	2	-	-	13
24	Puskesmas Peninggalan	-	-	9	4	1	7	21
25	Puskesmas Sumber Harum	-	-	5	4	-	5	14
26	Puskesmas Berojaya Timur	-	-	8	2	0	0	10
27	Puskesmas Bandar Agung	1	-	4	4	1	11	21
28	Puskesmas Karang Mukti	1	-	19	7	1	8	26
29	RSUD Sungai Lilin	9	2	8	14	3	21	57
30	RSUD Bayung Lencir	8	1	4	5	-	15	35
31	RSUD Sekayu	28	2	89	211	9	179	518
32	Dinkes	3	-	6	21	3	60	93

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Beberapa Puskesmas masih kekurangan Tenaga Kesehatan sesuai dengan yang tercantum pada Permenkes Nomor 43 Tahun 2019. Kekurangan Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Dokter Umum kurang 7 orang, Dokter Gigi 28 orang, Perawat 16 orang, Bidan 9 orang, Kesehatan Lingkungan 20 orang, Gizi 18 orang dan Tenaga Lab. Medik 18 orang, Promkes 6 orang dan Apoteker sebanyak 5 orang. Kekurangan Tenaga Kesehatan yang Musi paling besar adalah dokter gigi dan yang Musi paling sedikit adalah Bidan dan Tenaga Promosi Kesehatan. Puskesmas yang sesuai standar yang memiliki Tenaga Kesehatan sudah berada di angka 53,97%.

Tabel 2.25
Rasio dokter persatuan penduduk

No.	Aspek	Satuan	Tahun 2020
1.	Rasio Dokter Umum	Per 100.000 penduduk	7,61
2.	Rasio Dokter Spesialis	Per 100.000 penduduk	0,5
3.	Rasio Dokter Gigi	Per 100.000 penduduk	0,66
4.	Rasio Bidan	Per 100.000 penduduk	NA
5	Perawat	Per 100.000 penduduk	44,66

Sumber : Dnas Kesehatan, 2020

Sarana kesehatan lingkungan yang dijadikan indikator dalam penilaian lingkungan sehat selain air minum yang layak yaitu adalah kepemilikan jamban. Persentase Keluarga yang memiliki sanitasi Jamban yang memenuhi syarat di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 telah mencapai 104,7% dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat serta kebiasaan penduduk yang baik masalah buang air di sungai dan faktor ekonomi masyarakat yang masih baik. Sedangkan Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 telah mencapai hasil yang sangat baik yaitu mencapai 83,8%.

Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

Dari 244 Desa dan Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020, Desa yang telah melaksanakan STBM mencapai 241 Desa atau sebesar 98,77%, namun baru terdapat 6 desa yang memenuhi syarat desa STBM diakibatkan rendahnya kesadaran untuk hidup sehat serta kurangnya tenaga Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerja Kabupaten Musi Banyuasin dan

kedepannya dengan penambahan Tenaga Kesling serta program-program Kesling yang ada dapat memaksimalkan Pencapaian Desa yang melaksanakan STBM sehingga dapat terciptanya Desa yang memenuhi syarat disebut desa STBM yang nantinya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat agar mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, telah dilaksanakan *Universal Health Coverage* (UHC). Pelayanan kesehatan secara “Gratis” di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2002 dan seluruh penduduk ditanggung dalam asuransi kesehatan yang meliputi Asuransi wajib bagi PNS, Asuransi tenaga kerja, Asuransi masyarakat miskin atau Jamkesmas dan Asuransi Muba Semesta. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat mencakup semua penduduk, untuk Peserta PBI didaftarkan oleh Dinas Kesehatan ke BPJS sedangkan untuk Non PBI antara lain PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara dan Pegawai Pemerintah Non PNS diatur oleh Pemerintah Pusat. Setiap Peserta yang telah terdaftar akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan.

Pada tahun 2019 Kabupaten Musi Banyuasin sudah mendapatkan *Universal Health Coverage* (UHC) dengan kepesertaan sampai dengan Desember 2019 sebanyak 94,72 persen. Di Tahun 2021 kepesertaan UHC Kabupate Musi Banyuasin sebesar 97,25 persen. Berdasarkan data dibawah ini, distribusi peserta JKN-KIS berdasarkan segmentasinya Penerima Bantuan luran melalui pendanaan APBD/Jamkesda sebanyak 266.361 orang, Penerima Bantuan luran melalui pendanaan APBN sebanyak 190.374 orang, Pekerja Penerima Upah (PPU) (ASN, TNI, POLRI, Pekerja Swasta, BUMN, BUMD) sebanyak 122.204 orang, Pekerja Bukan Penerima Upah/Pekerja Informal (PBPU) sebanyak 29.345 orang, Bukan Pekerja (BP) sebanyak 2.909 orang. Jumlah seluruhnya 611.193 (97,25 persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 628.485 orang.

Grafik 2.6
Progres pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Muba, 2021

2.3.1.3 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan Nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja atau tenaga kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Ukuran ini secara kasar dapat menerangkan kecenderungan tenaga kerja agar aktif bekerja atau mencari kerja yang sifatnya mendatangkan kesempatan berpenghasilan baik berupa uang atau barang. Makin besar angka TPAK mengindikasikan peningkatan kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja dan

berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan faktor utama yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 2.26
Penduduk Musi Banyuasin Usia 15 Tahun ke atas
Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angkatan Kerja Bekerja	285.123	298.957	303.317	333.864	331.326
Menganggur	15.983	8.212	12.573	15.986	13.230
Bukan Angkatan Kerja	139.425	143.045	153.811	138.952	147.576
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,64	65,36	66,35	70,61	69,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,75	3,29	4,15	4,79	3,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Muba, 2021

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah angka pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Dari tabel di atas, tingkat pengangguran di Musi Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 4,79 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 sampai 5 orang yang menganggur atau dari 333.864 angkatan kerja terdapat 15.986 orang yang menganggur. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 2,75 persen, lalu terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 yaitu menjadi sebesar 4,79 persen. Dan turun kembali menjadi 3,99 persen pada tahun 2021.

2.3.1.4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Secara umum kinerja infra struktur daerah menunjukkan kinerja yang positif. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin terus berorientasi pada visi yang ingin dicapai dimana diharapkan kondisi jalan dan jembatan yang mantap, aman dan nyaman di Kabupaten Musi Banyuasin dengan menyelenggarakan program dan kegiatan diseluruh bidang kebinamargaan secara berkesinambungan dan berkelanjutan berbasis kinerja. Disamping penanganan jalan lintas Kabupaten, juga telah

dilakukan pula peningkatan jalan sebagai pendukung Kawasan Industri, yaitu peningkatan dan rehabilitasi jalan antara desa dalam kecamatan.

Total panjang jalan Kabupaten tahun 2020 sebesar 1.074,07 km dimana berdasarkan jenis permukaannya sebesar 454,06 km adalah jalan diaspal, 155,33 km adalah jalan beton, 347,18 km adalah jalan kerikil dan 117,50 km masih merupakan jalan tanah. Pada tahun 2020 panjang jalan dalam kondisi mantap sepanjang 621,51 km dibandingkan dengan panjang seluruh jalan Kabupaten Musi Banyuasin sepanjang 1.073,77 km. Dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja utama sudah menggunakan data panjang jalan terbaru, sehingga capaian kinerjanya belum mencapai target. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pekerjaan Umum diukur dengan indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	54,33	49,88	56,72	57,88	72,29
2.	Proporsi Rumah Tinggal Bersanitasi (%)	70,00	78,30	81,23	80	81,26

Sumber : Dinas PU PR Kab. Muba, 2021

2.3.1.5 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah perumahan yang ada terus bertambah. Masalah utama kawasan perumahan dan pemukiman adalah terjadinya penurunan kualitas pelayanan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Adanya keterbatasan proporsi penduduk yang menerima manfaat dari fasilitas pelayanan air bersih dan air limbah, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah. Sementara perkembangan perumahan dan permukiman semakin bertambah cepat. Disamping itu kenyataan yang ada bahwa perkembangan infrastruktur menurun karena kemampuan keuangan pemerintah dalam pembiayaan fasilitas perkotaan dan fasilitas pelayanan umum.

Berbagai upaya peningkatan kualitas perumahan dan kesehatan lingkungan telah dilakukan dalam masalah ini. Salah satu pemecahannya

adalah peningkatan akses terhadap lingkungan pemukiman yang tidak memadai, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas, terutama pada penyediaan pelayanan fasilitas listrik, air bersih dan pengelolaan air limbah yang sesuai dengan lingkungan perumahan dan permukiman yang ada.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Pemukiman
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	63,46	65,47	59,91	67,93	87,51
2.	Rumah tangga bersanitasi (%)	57,65	58,75	73,14	83,83	81,26
3.	Rumah layak huni (%)	84	84,32	84,39	84,45	84,37
4.	Rumah tangga pengguna listrik (%)	95,78	98,3	98,9	98,55	98,55

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 2021

Secara umum urusan perumahan dan kawasan pemukiman menunjukkan hasil yang positif. Karena urusan perumahan dan kawasan pemukiman terkait dengan infrastruktur yang cenderung memerlukan anggaran tinggi, maka untuk percepatan penyelesaian permasalahan, dalam perspektif kedepan penting mencari pembiayaan selain APBD, dapat melalui kerjasama Pemerintah dan swasta, CSR atau pendanaan lainnya.

2.3.1.6 Sosial

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dan dipelihara oleh Negara. Pemerintah memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Panti asuhan merupakan salah satu sarana untuk hal tersebut.

Panti asuhan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 12 unit yang tersebar di Kecamatan Sekayu, Babat Toman, Sanga Desa, Sungai Keruh, Sungai Lilin, Babat Supat dan Lawang Wetan. Dibawah ini disampaikan Panti Sosial yang menjadi binaan Dinas Sosial pada tahun 2021.

Tabel 2.29**Daftar Nama Panti Asuhan Binaan Dinas Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021**

No.	Jenis Pelayanan	Nama Panti Asuhan	Jumlah Penghuni
1.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan At Taqwa	41 orang
2.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Hari Kurnia	40 orang
3.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan Nurul Huda	23 orang
4.	Panti Asuhan Anak	Panti Asuhan El Nuza	42 orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Muba, 2021

Jumlah Penyandang Masalah Sosial di Kabupaten Musi Banyuasin yang Musi paling banyak adalah fakir miskin dan penyandang disabilitas yang menjadi tugas berat. Dari tahun ke tahun Kabupaten Musi Banyuasin tetap memprioritaskan untuk pelayanan masalah sosial dasar terutama untuk kelompok ini.

Adapun penduduk Kabupaten Musi Banyuasin yang mengalami masalah sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021**

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Terlantar	146
2.	Anak Balita Terlantar	4
3.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	68
4.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	628
5.	Bekas Warga Binaan Lapas	9
6.	Pemulung	1
7.	Pengemis	2
8.	Tuna Susila	124
9.	Lanjut Usia Terlantar	2
10.	Anak yg memerlukan perlindungan khusus	3
11.	Penyandang Disabilitas	1.012
12.	Fakir Miskin	196.620
13.	Penerima Bantuan Bencana Alam	153
14.	Penerima Bantuan Bencana Sosial	655

Sumber : Dinas Sosial Kab. Muba, 2021

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat di wilayahnya. Pemenuhan rasa aman akan berdampak positif pada proses pembangunan di berbagai sektor. Rasa aman yang dibutuhkan masyarakat adalah rasa aman dari segala bentuk kerawanan dan masalah sosial berupa berbagai penyakit sosial serta rasa aman dari adanya bencana alam. Kerjasama yang harmonis dari Satpol PP, Kesbangpol, Kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah senantiasa digalang dalam rangka meminimalisir terjadinya berbagai kerawanan sosial/penyakit masyarakat.

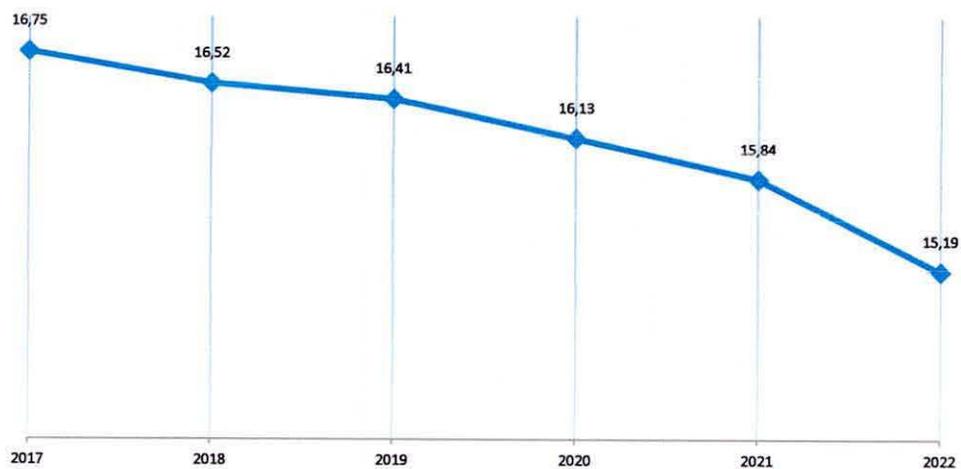
BAB III
PROFIL KEMISKINAN – IDENTIFIKASI MASALAH

3.1. Bidang Konsumsi Pengeluaran
3.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

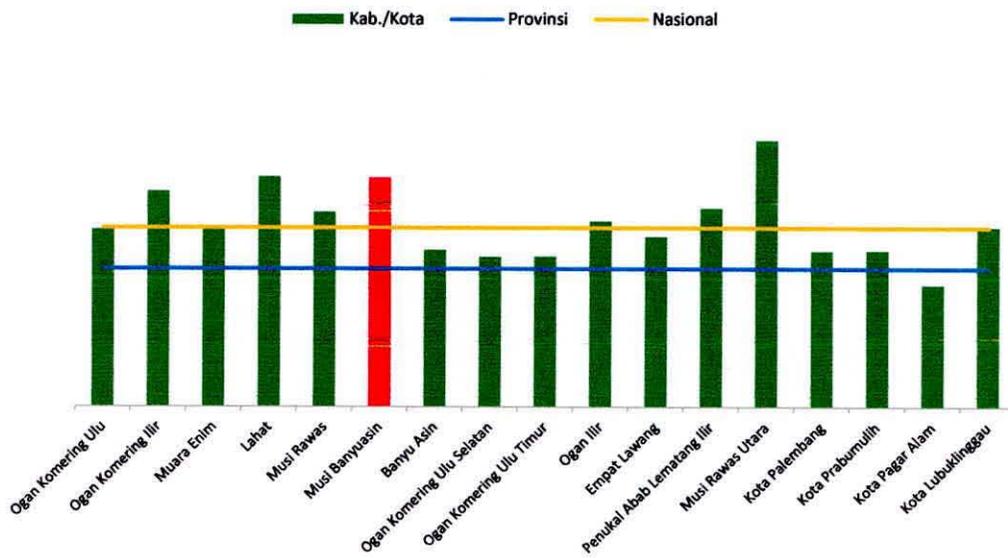
Grafik 3.1
Persentase Penduduk Miskin (P0)



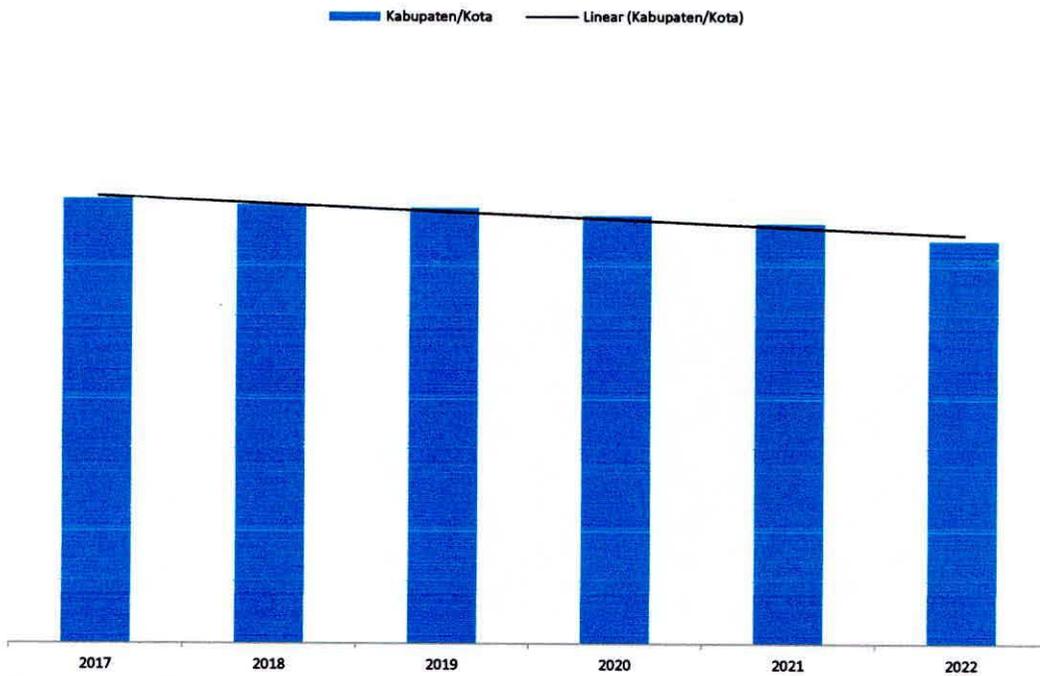
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Indeks Persentase Kemiskinan 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional tahun 2022



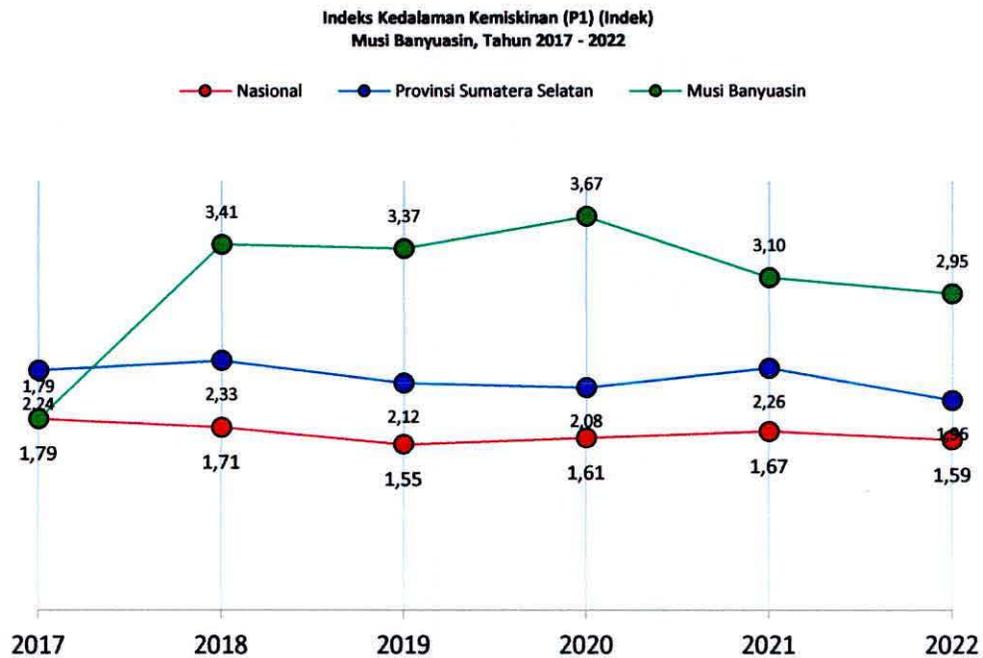
Analisis Efektivitas



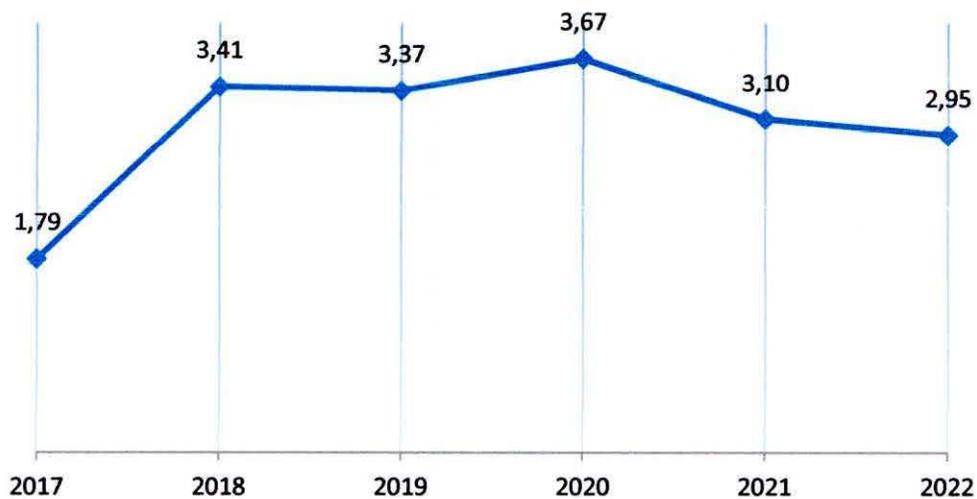
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.1.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

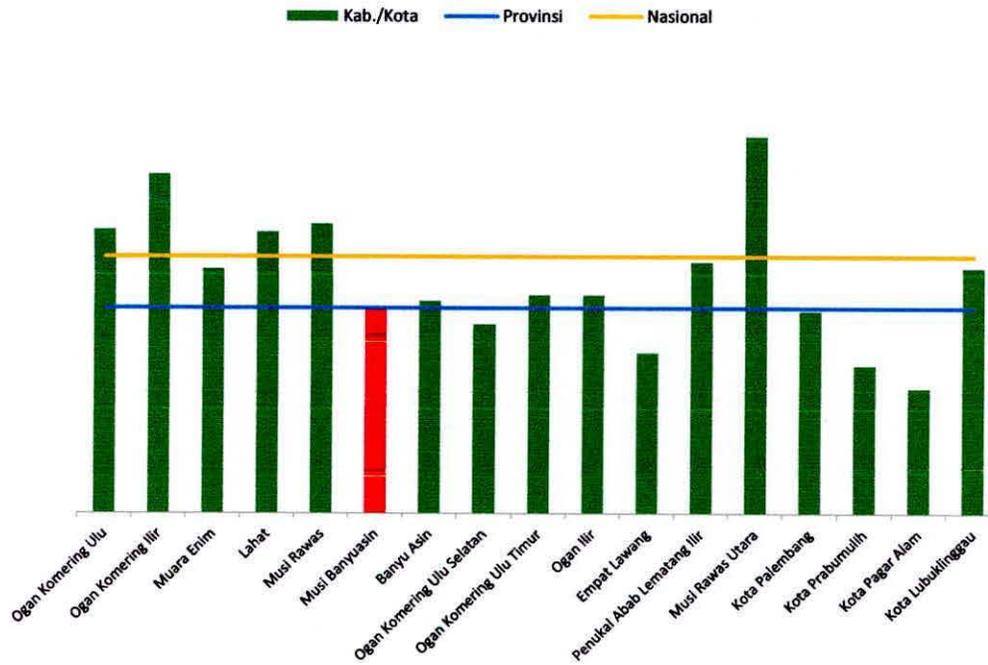
Grafik 3.2
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)



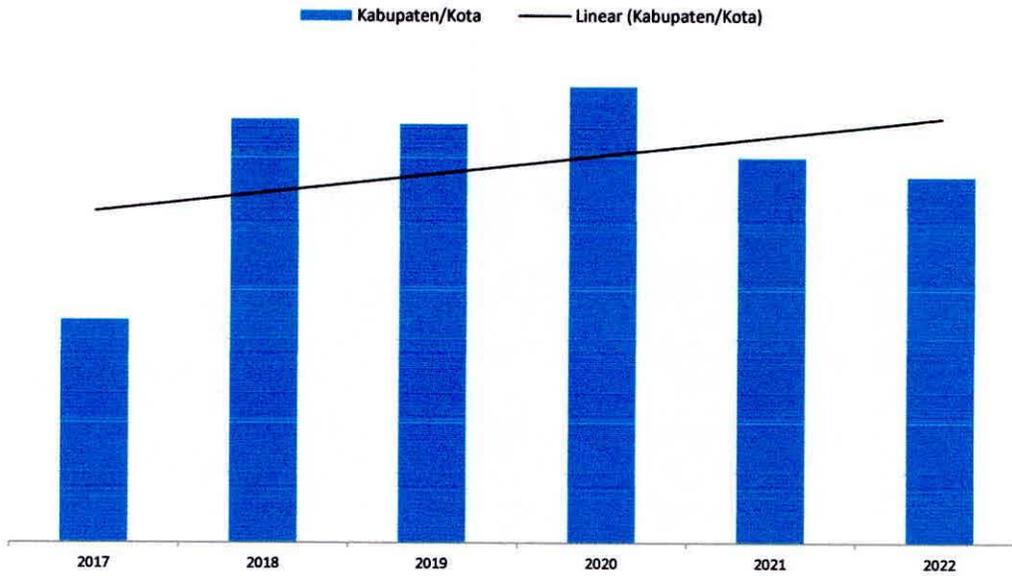
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Indeks Kedalaman Kemiskinan 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional tahun 2022



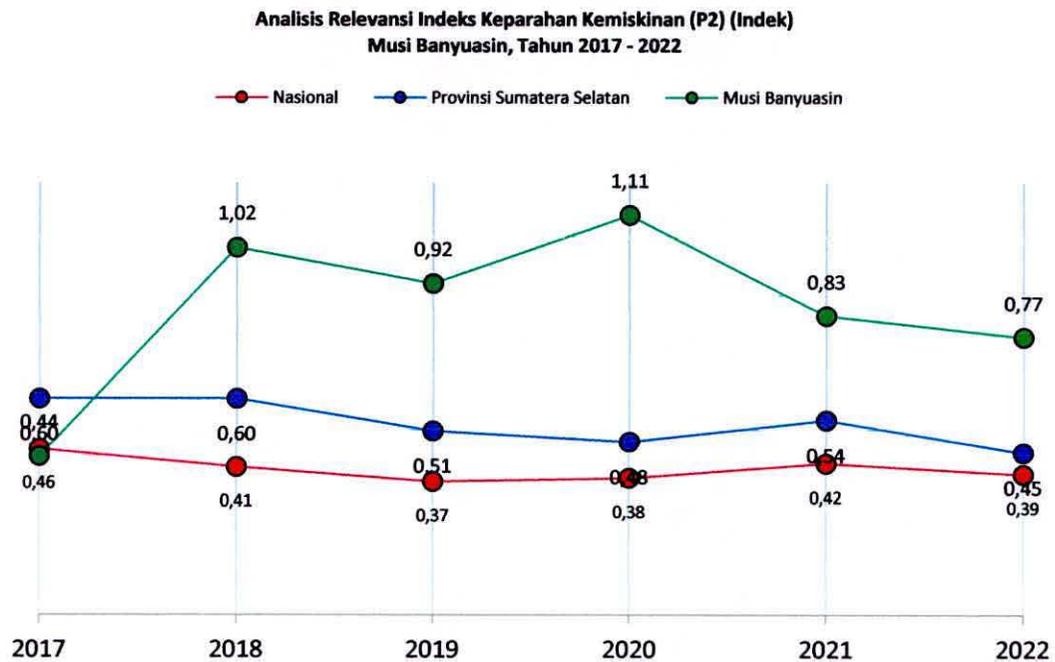
Analisis Efektivitas



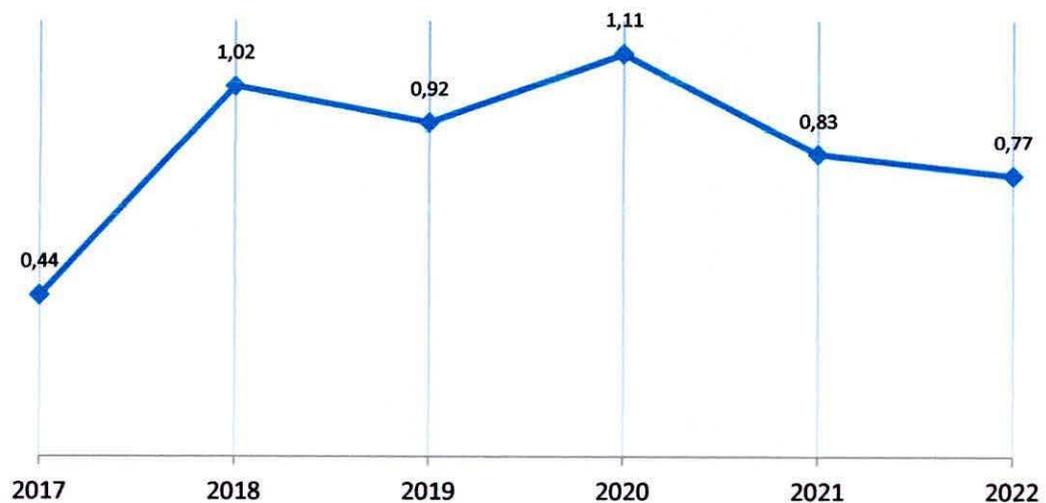
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.1.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

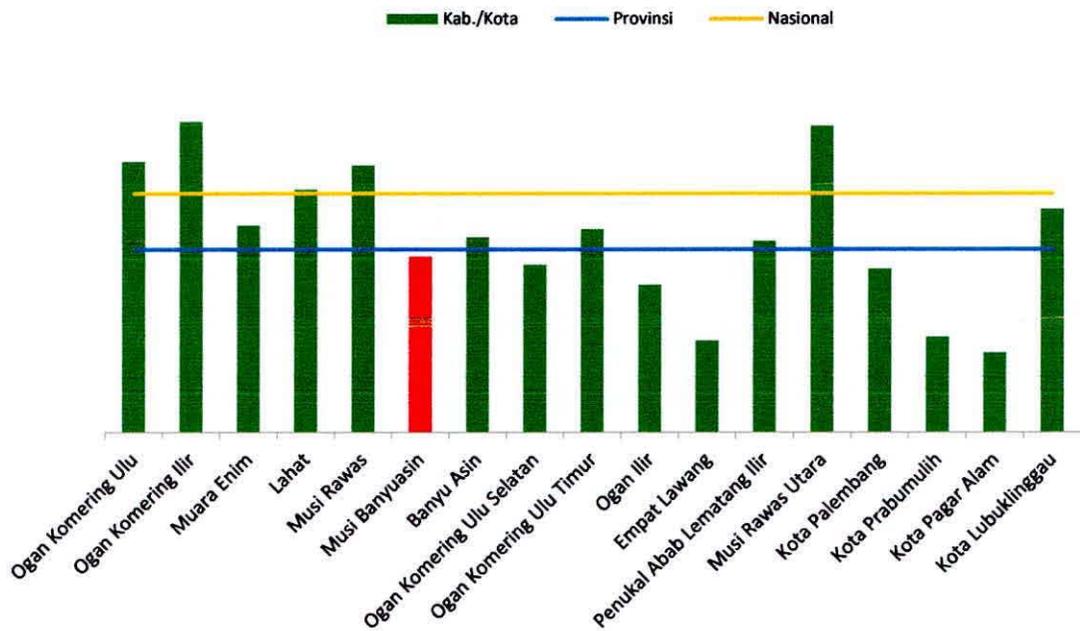
Grafik 3.3
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)



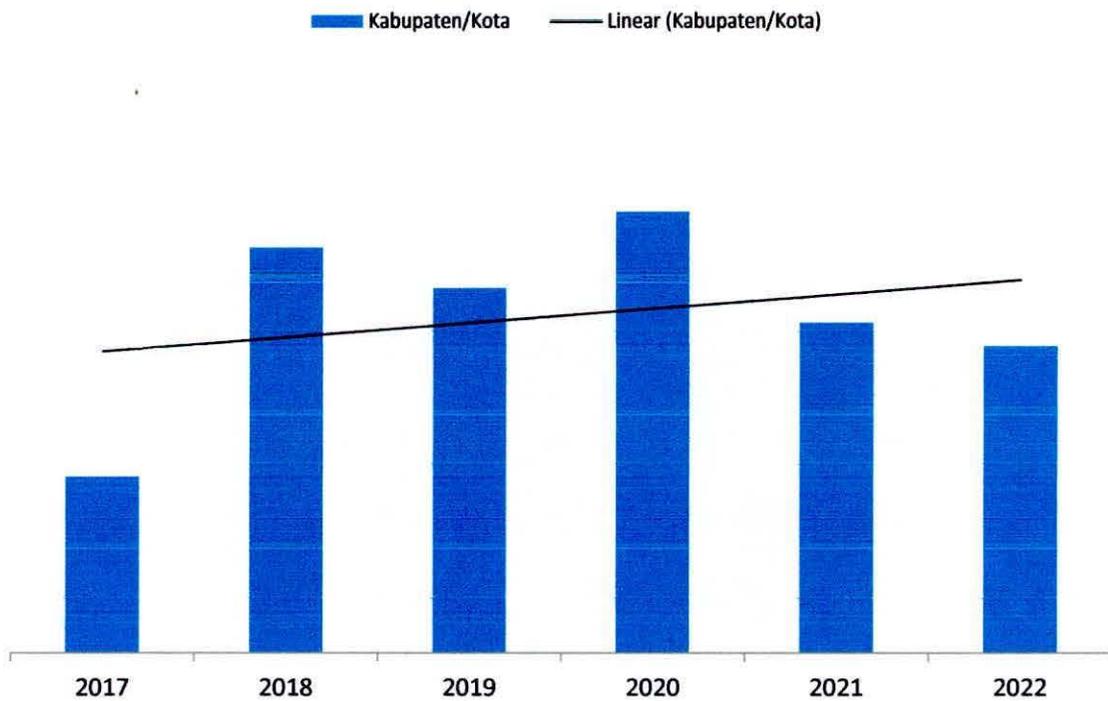
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Indeks Keparahan Kemiskinan 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022



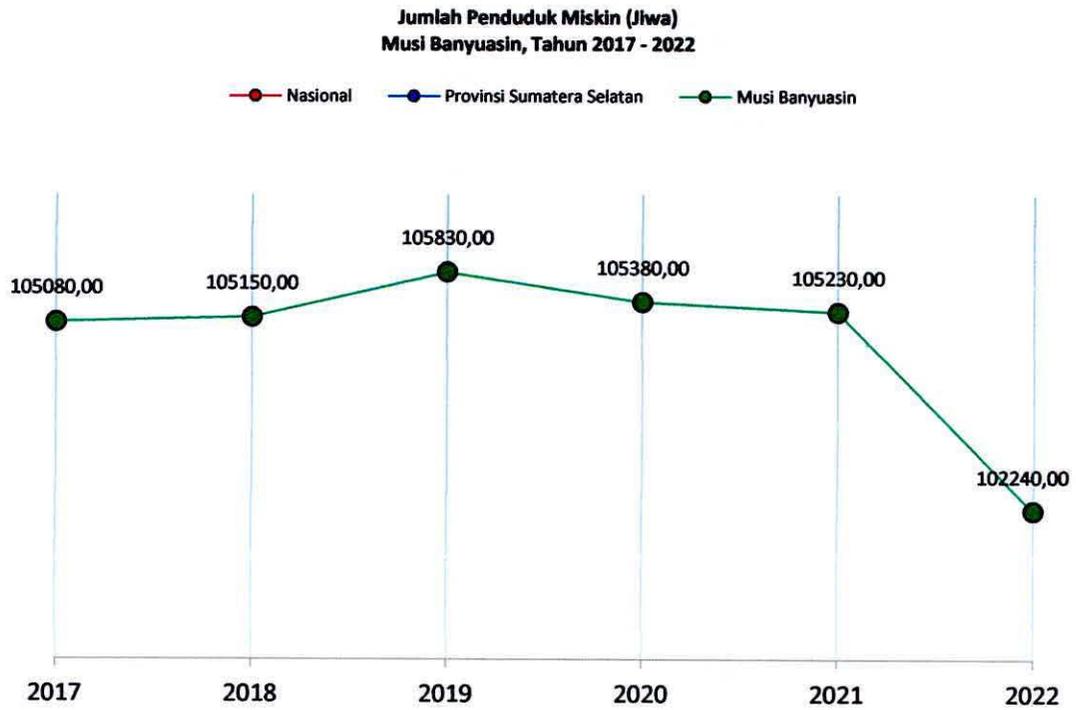
Analisis Efektivitas



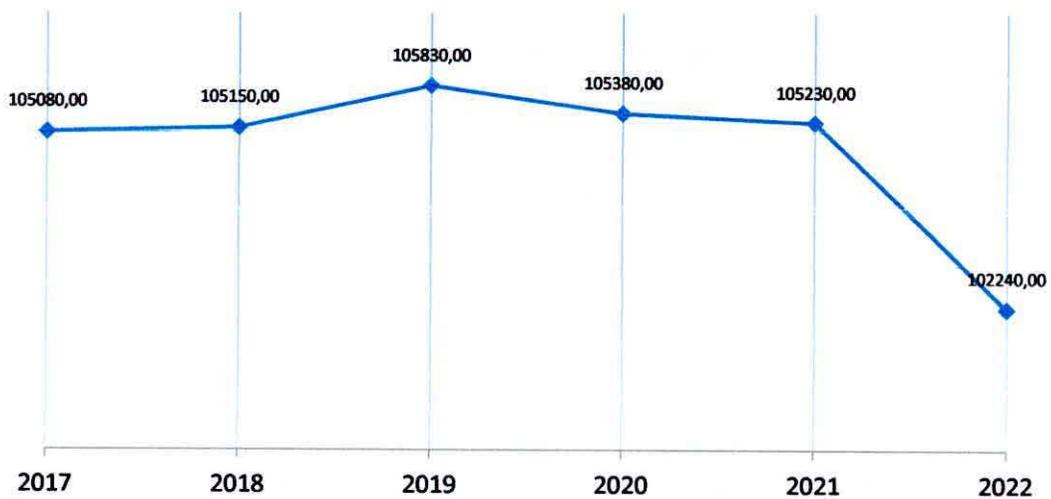
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.1.4 Jumlah Penduduk Miskin

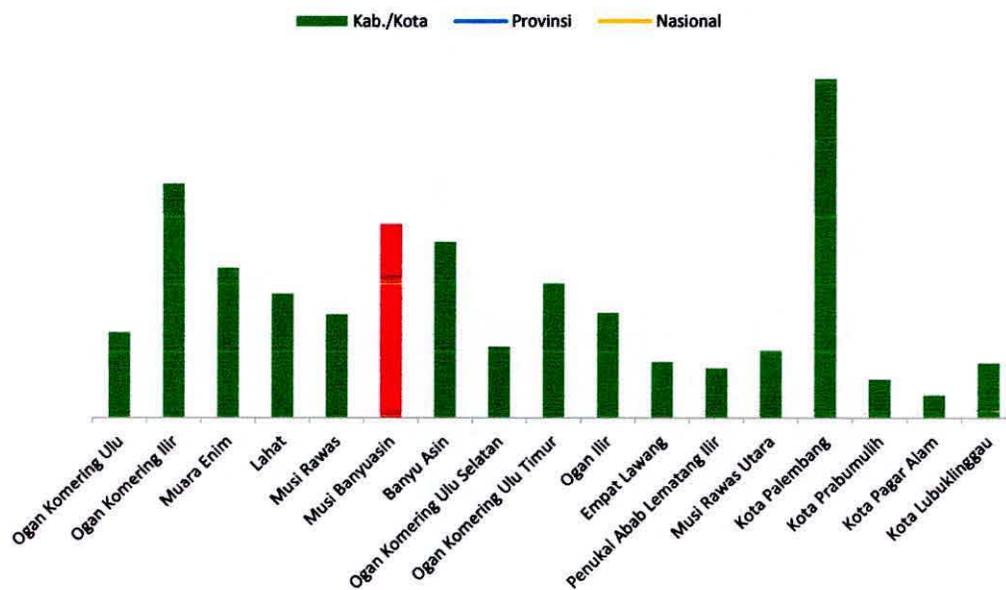
Grafik 3.4
Jumlah Penduduk Miskin



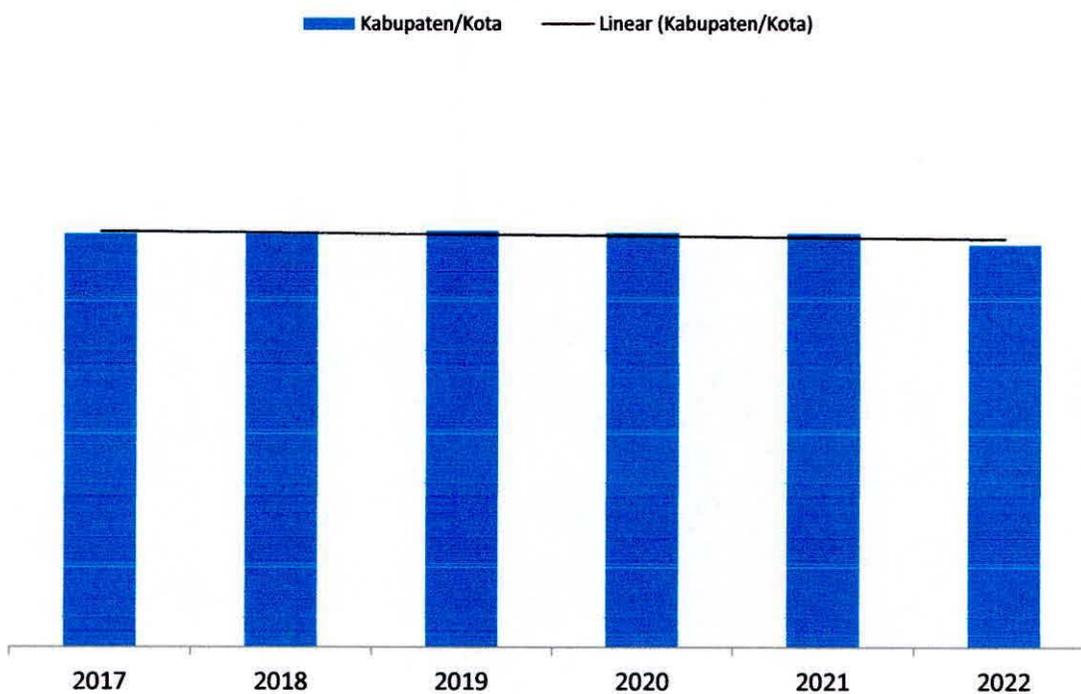
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Jumlah penduduk miskin 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional tahun 2022



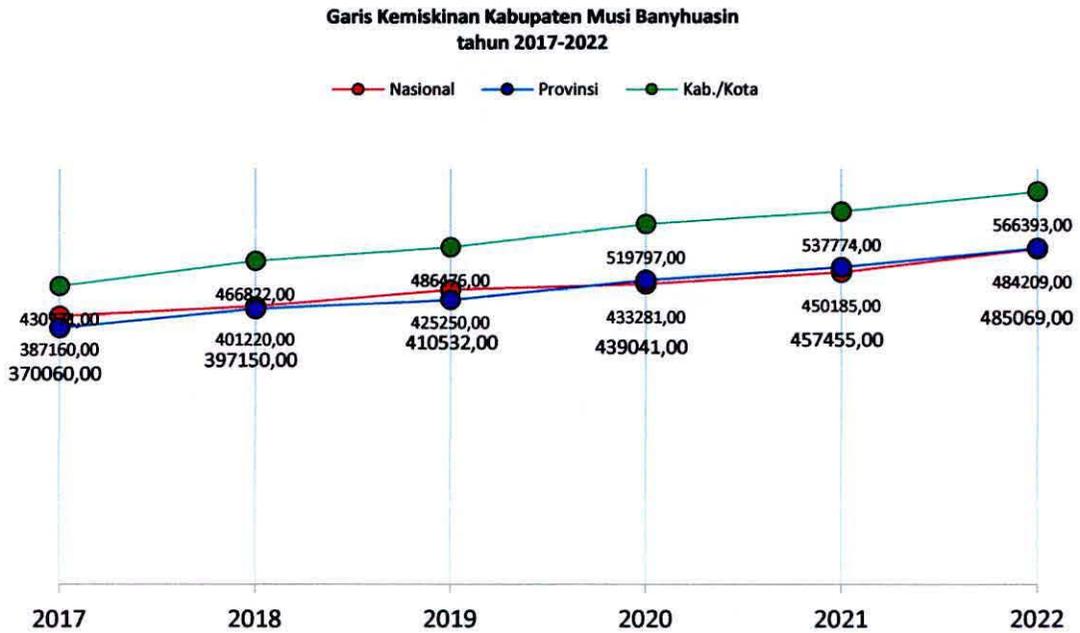
Analisis Efektivitas



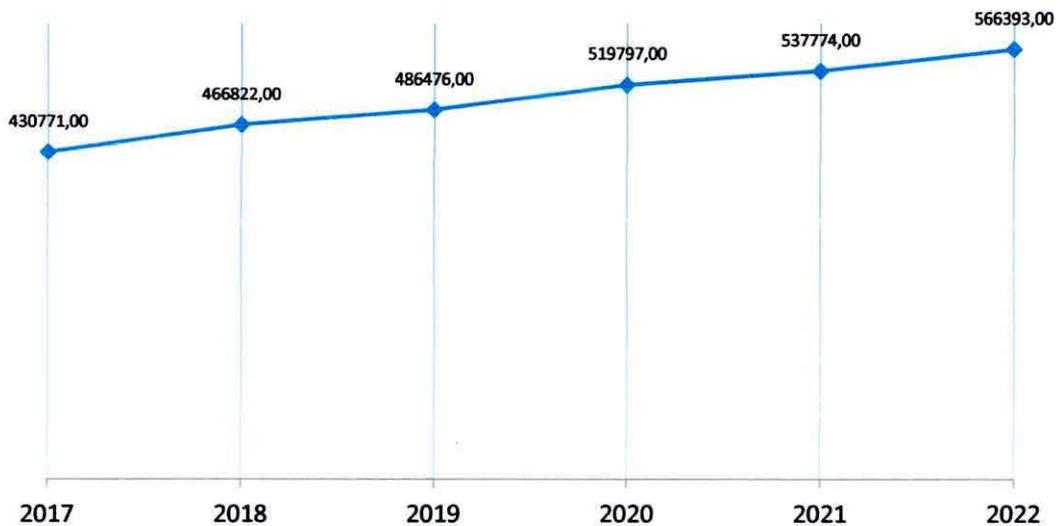
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.1.5 Garis Kemiskinan

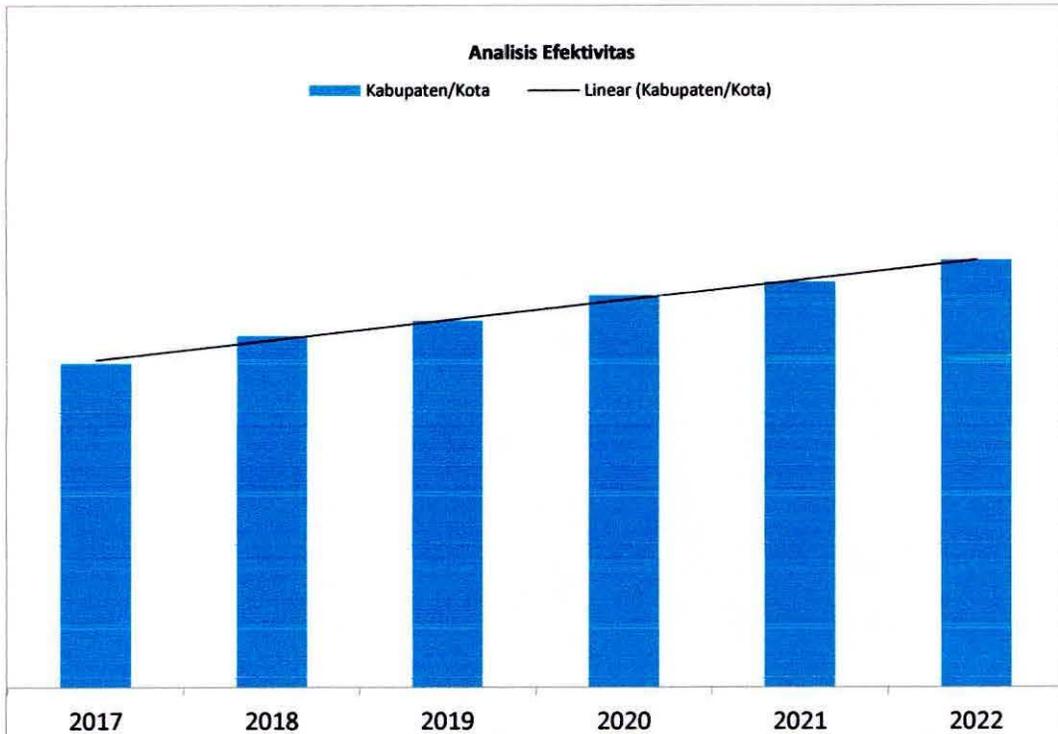
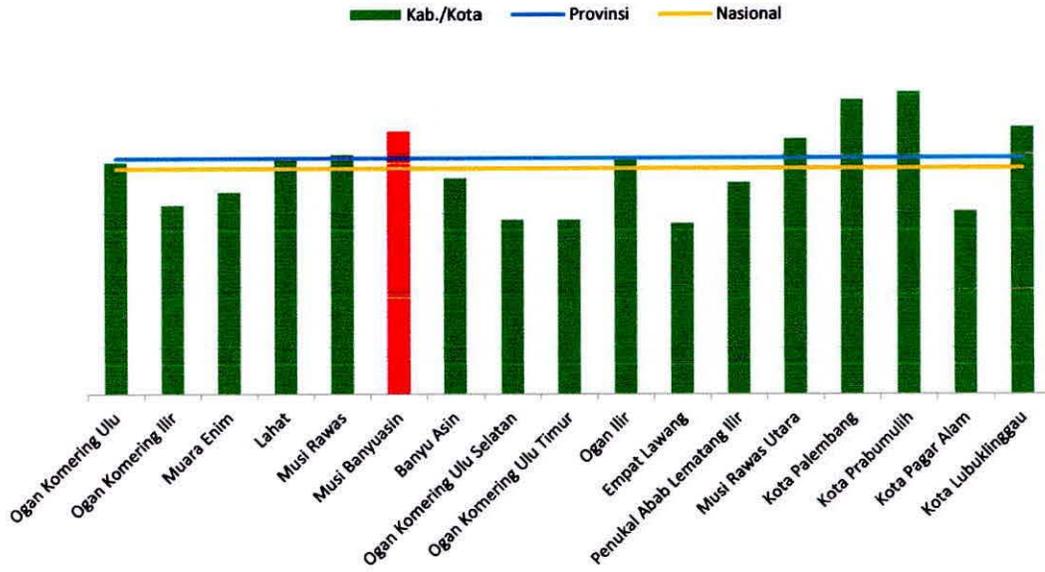
Grafik 3.5 Garis Kemiskinan



Analisis Perkembangan Antar Waktu



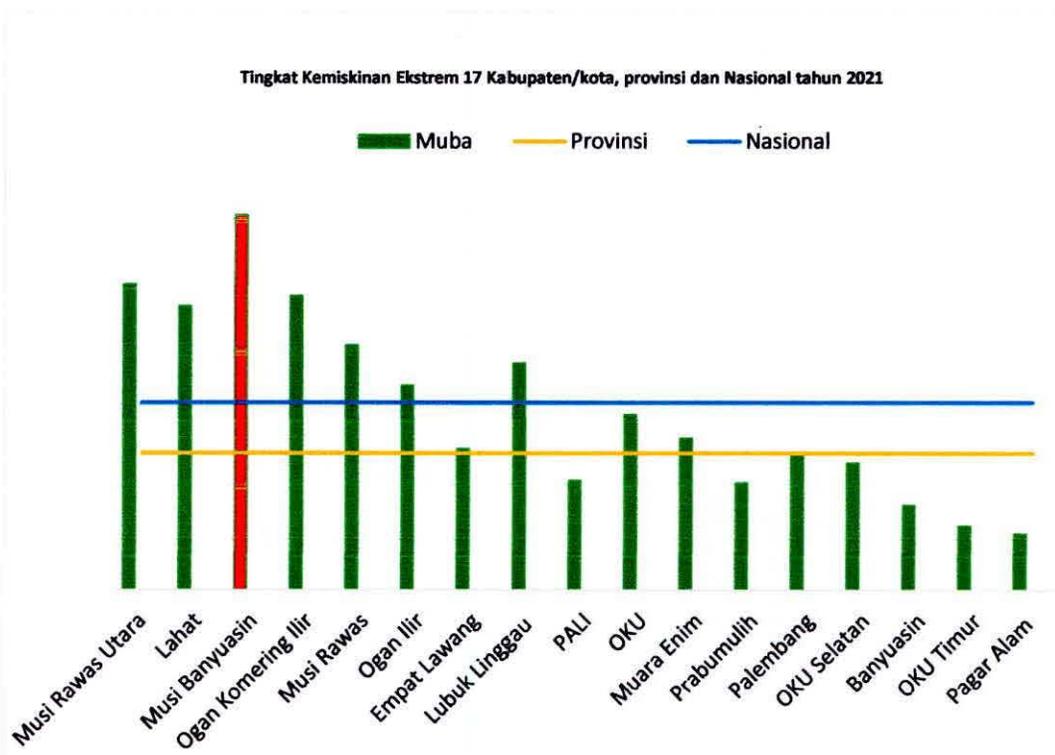
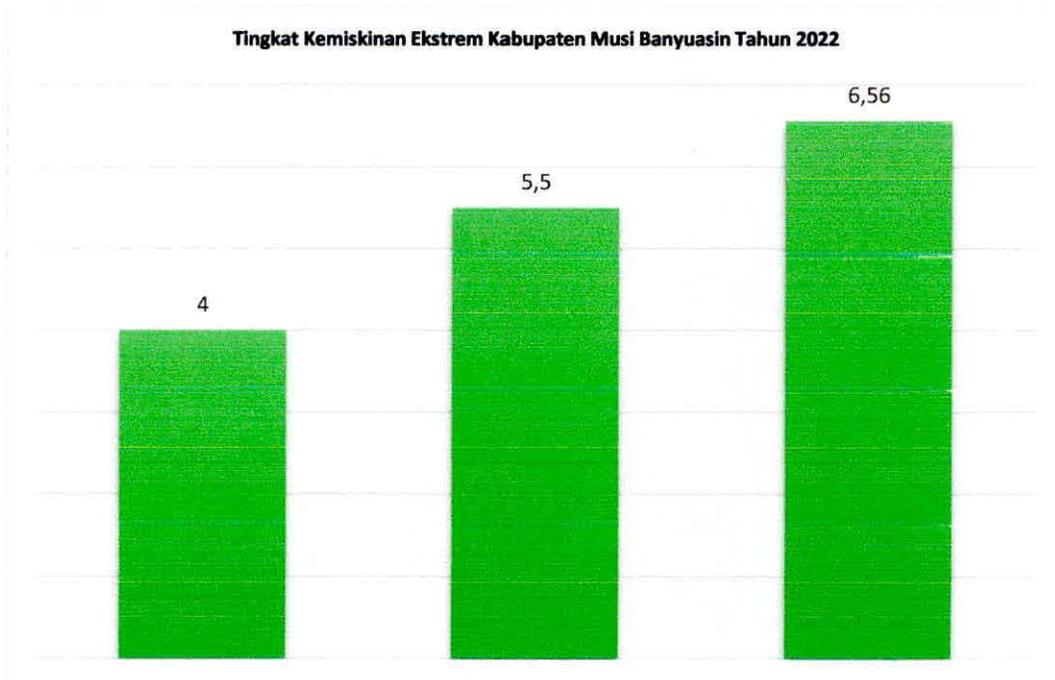
Garis Kemiskinan 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022



Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.1.6 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Grafik 3.6
Tingkat Kemiskinan Ekstrem

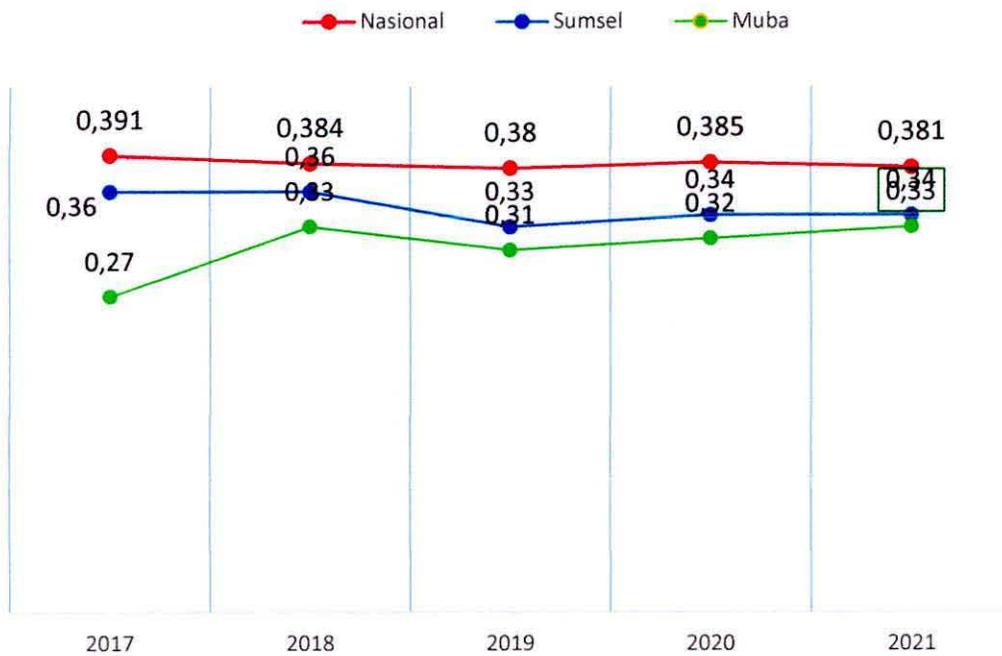


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

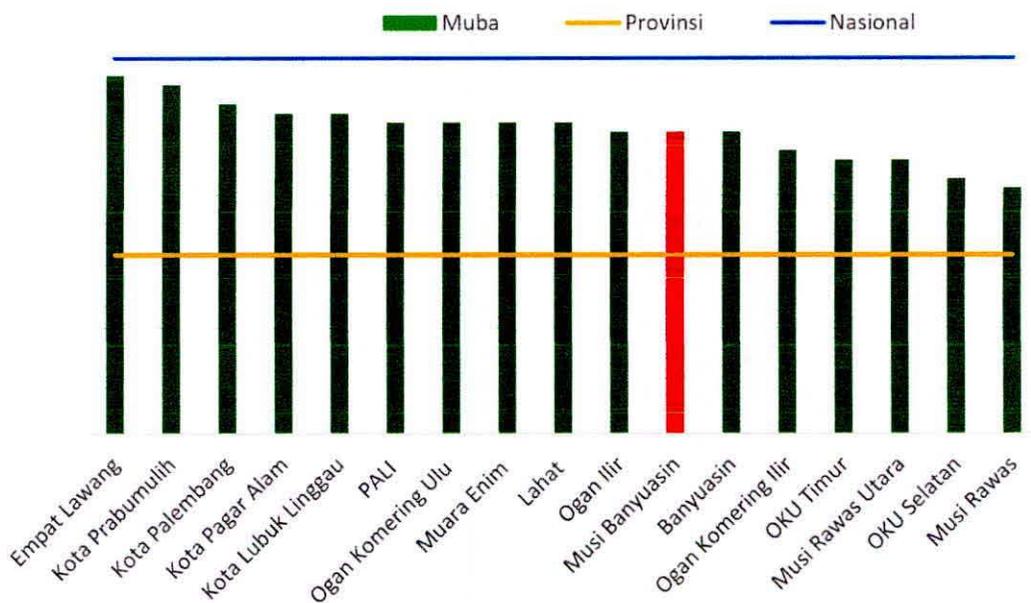
3.1.7 Rasio Gini

**Grafik 3.7
Rasio Gini**

Gini Ratio Muba, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2021



Gini Ratio 17 Kabupaten/kota, provinsi dan Nasional tahun 2021



Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

Tabel 3.1
Hasil Analisis Bidang Konsumsi Pengeluaran

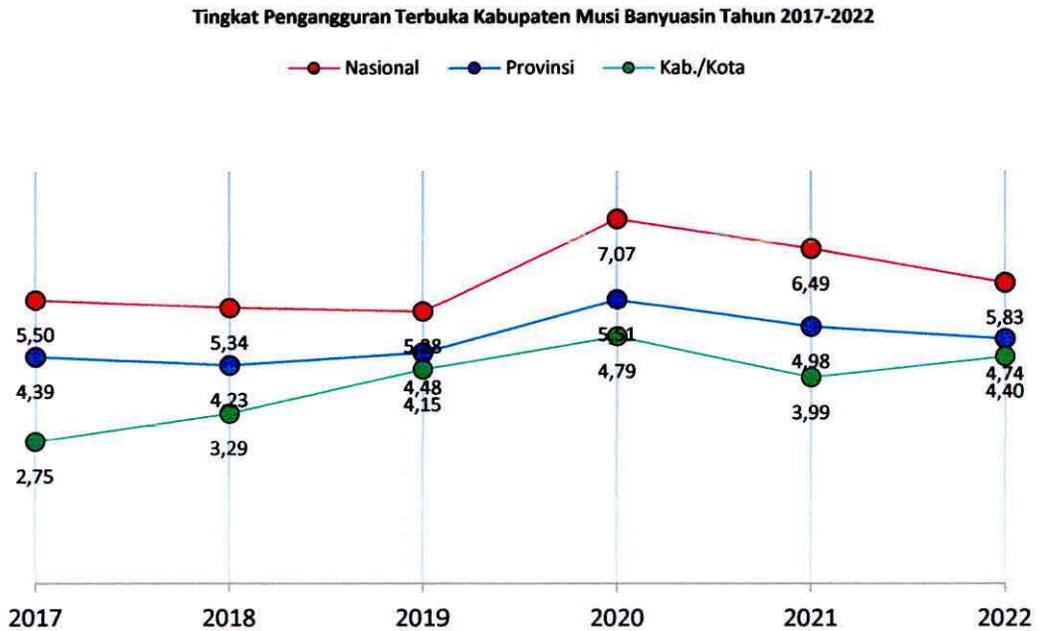
Kabupaten Muba	Perspektif					
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2021 menempati posisi 3 dari 17 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan.	Persentase penduduk miskin dikabupaten muba menunjukkan tren penurunan setiap tahun. Namun, laju penurunan masih cukup rendah.	Pada masa pandemic Covid-19 tahun 2019-2022 persentase penduduk miskin pada kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan, sedangkan Nasional dan Provinsi mengalami kenaikan	Persentase penduduk miskin kabupaten Musi Banyuasin setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Namun, masih diatas persentase penduduk miskin Nasional dan Provinsi.	Upaya penurunan persentase penduduk miskin kabupaten Musi Banyuasin masih perlu ditingkatkan memperhatikan target RPD Provinsi dan target Nasional.
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 2,95 lebih besar dari Nasional dan Provinsi	Indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan tajam, dari tahun 2017 ke 2018 lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 dan kembali meningkat pada tahun 2020 dan mengalami penurunan 2021-2022.	Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan beriringan dengan Nasional dan Provinsi yang mengalami penurunan.	Indeks kedalaman kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin mengalami perubahan tiap tahunnya beriringan dengan Nasional dan Provinsi, baru pada tahun 2021 mengalami penurunan sedangkan Nasional dan Provinsi mengalami kenaikan.	Kabupaten Musi Banyuasin telah cukup baik dalam menurunkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2022 dimana Nasional dan Provinsi mengalami kenaikan.
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Capaian Provinsi Musi Banyuasin pada tahun	Tren 2017 berada dibawah Sumsel dan Nasional.	Pada 202 Musi Banyuasin berada diatas	Kabupaten Musi Banyuasin melesat mengalami	Pola Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selalu berubah ubah

	2022 sebesar 0,77	Tren 2018 – 2022 berfluktuatif diatas tren Nasional dan sumsel.	dari Sumsel dan Nasional	kenaikan tahun 2017-2018 diatas Provinsi dan Nasional. Hingga tahun 2022 tetap berada diatas Provinsi dan Nasional.	tiap tahunnya dan perlu upaya lebih lanjut untuk menekan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dikabupaten Musi Banyuasin
Jumlah Penduduk Miskin	Pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin di kabupaten Musi Banyuasin adalah 102.240,00 jiwa	Pada tahun 2017-2019 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, dan mulai menurun pada tahun 2020-2022	Terdapat kenaikan yang cukup tajam pada tahun 2019. Namun, terdapat penurunan yang juga tajam pada tahun 2022.	Tren jumlah penduduk miskin meningkat pada tahun 2017-2019 dan menurun pada 2020-2022	Jumlah penduduk miskin kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 telah menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.
Garis Kemiskinan (GK)	Pada tahun 2022 Garis Kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin menyentuh angka 566393,00	Tren garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin selalu meningkat beriringan dengan Provinsi dan Nasional	Pada tahun 2022 garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin berada diatas garis kemiskinan Provinsi dan Nasional	Kenaikan garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan Nasional selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan laju kenaikan yang cukup sama	Perlu diperhatikan lebih lanjut garis kemiskinan kabupaten Musi Banyuasin selalu meningkat dan cukup tinggi.
Rasio Gini	Pada tahun 2021 rasio gini kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 0.33	Tren rasio gini kabupaten Musi Banyuasin berfluktuatif sejak tahun 2017-2019. Namun, mengalami kenaikan pada	Rasio gini kabupaten Musi Banyuasin selalu berada dibawah Nasional dan Provinsi	Tren dan pola perubahan Muba terhadap Sumsel 2017-2020 cukup beiringan namun	Perlu upaya lebih lanjut untuk menekan rasio gini di kabupaten Musi Banyuasin dimana pola terakhir menunjukkan

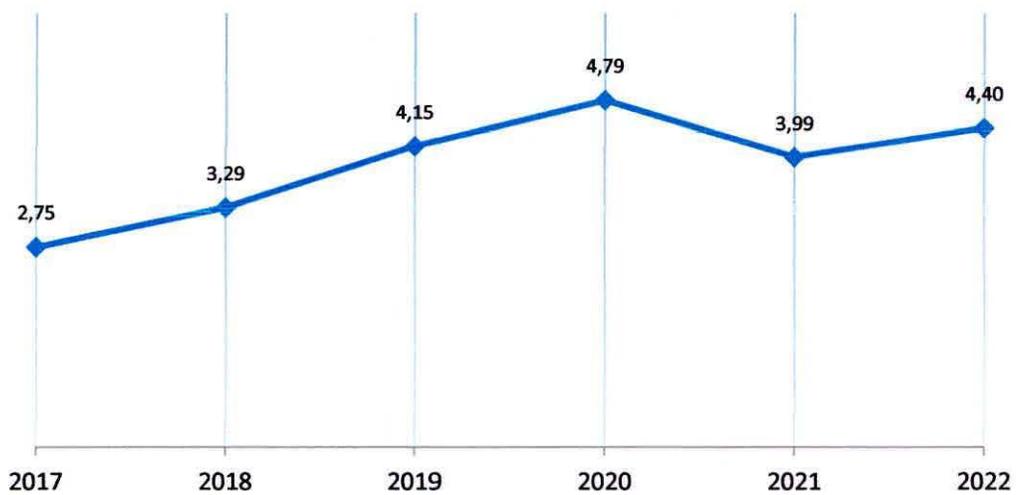
		2021	2017, meskipun mengalami peningkatan tajam pada tahun 2018.	terhadap capaian Nasional yang setiap tahunnya terus menunjukkan penurunan	
Kemiskinan Ekstrem	Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan ekstrem kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar 6.56%	Tren angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebesar 5.62%	Ditahun 2021 angka kemsikinan ekstrem Musi Banyuasin masih diatas angka provinsi dan nasional	Tren angka kemiskinan ekstrem nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Banyuasin selalu beriringan tiap tahunnya	Perlu upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara konvergensi melalui intervensi program kegiatan.

3.2. Bidang Ketenagakerjaan
3.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

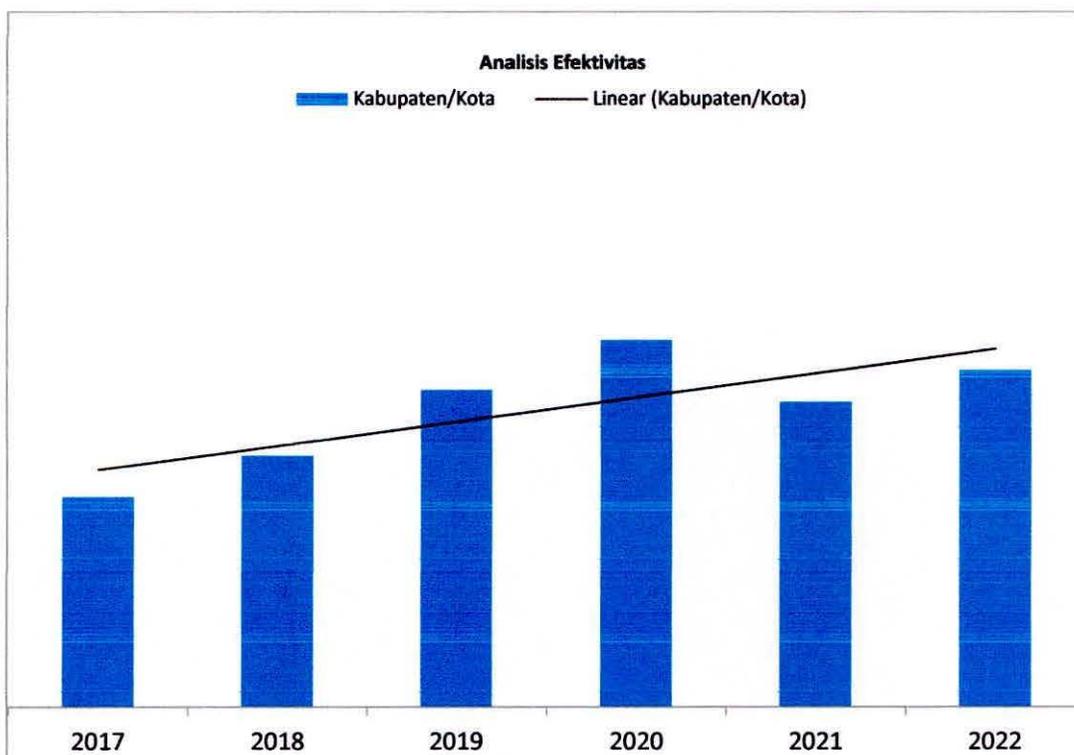
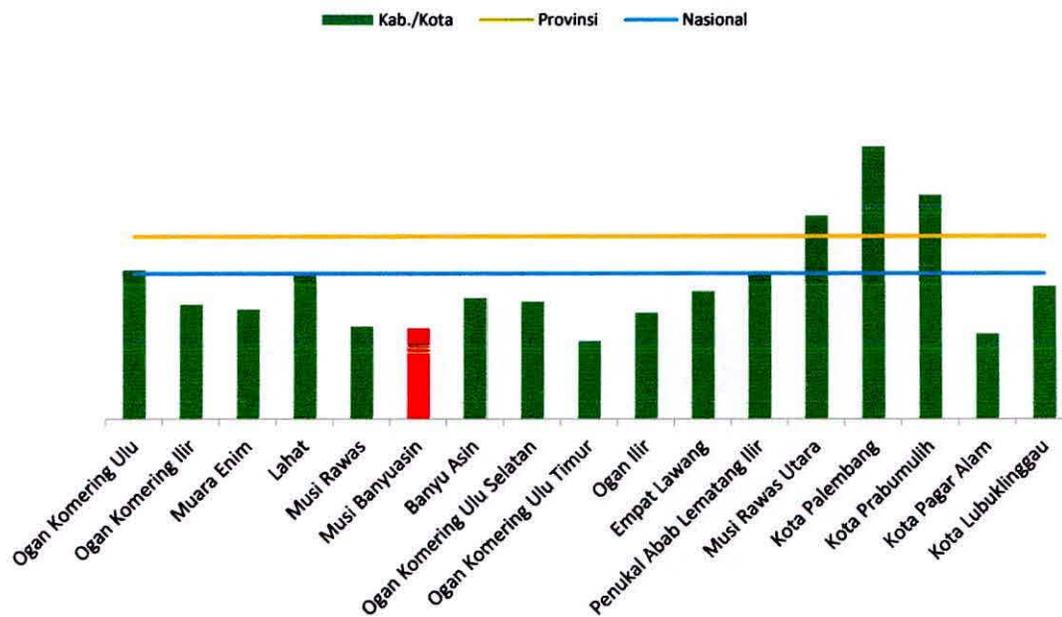
Grafik 3.8
Tingkat Pengangguran Terbuka



Analisis Perkembangan Antar Waktu



TPT 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020



Sumber :BPS dan TNP2K, diolah

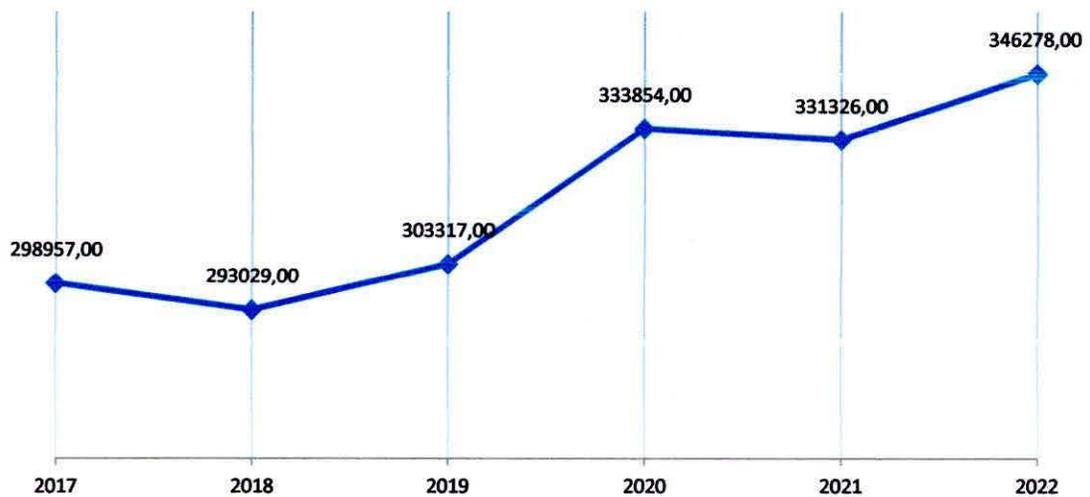
3.2.2 Jumlah Angkatan Kerja

Grafik 3.9
Jumlah Angkatan Kerja

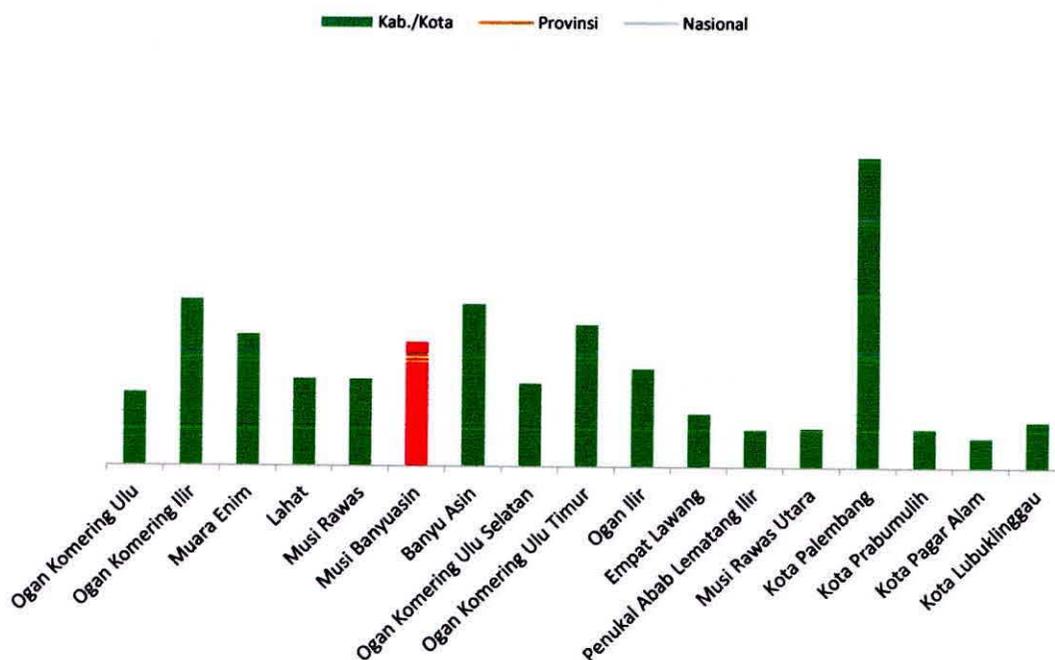
Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



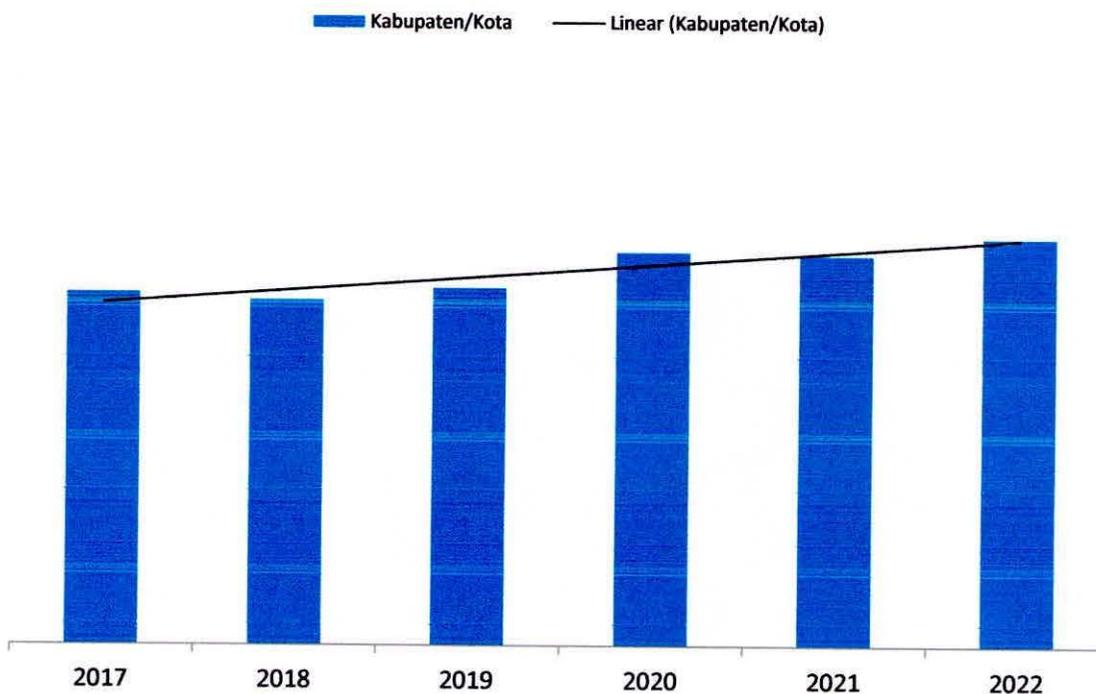
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Jumlah Angkatan Kerja 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020



Analisis Efektivitas

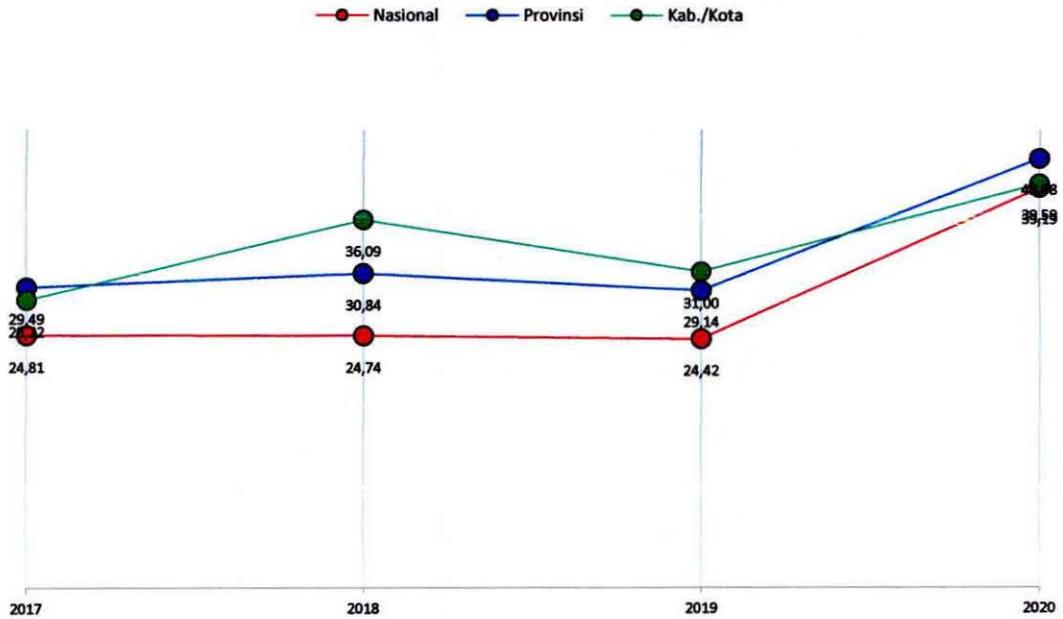


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

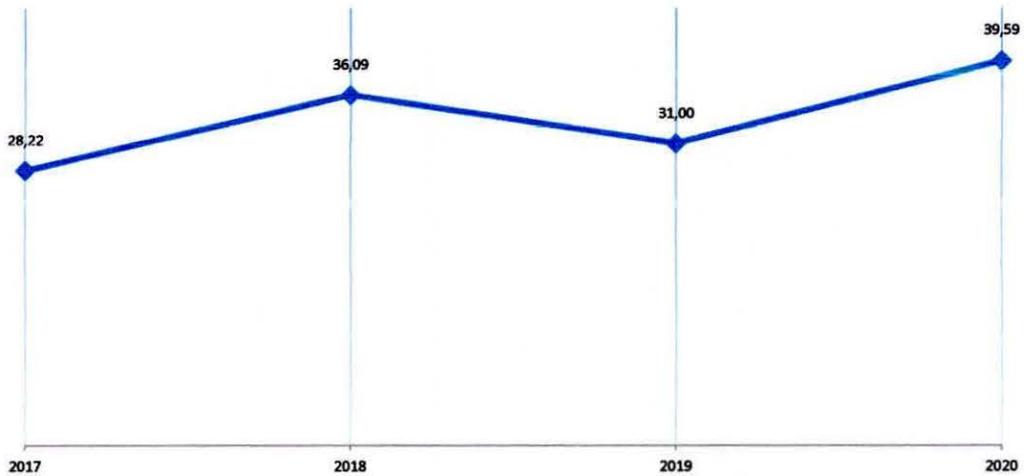
3.2.3 Persentase Setengah Menganggur

Grafik 3.10
Persentase Setengah Pengangguran

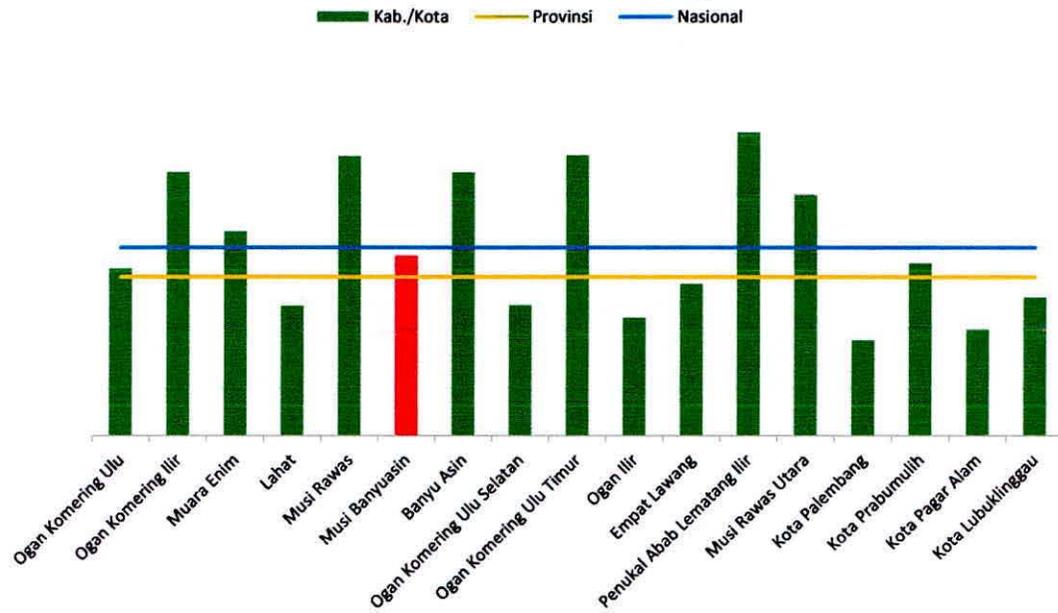
Persentase Setengah Pengangguran MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2020



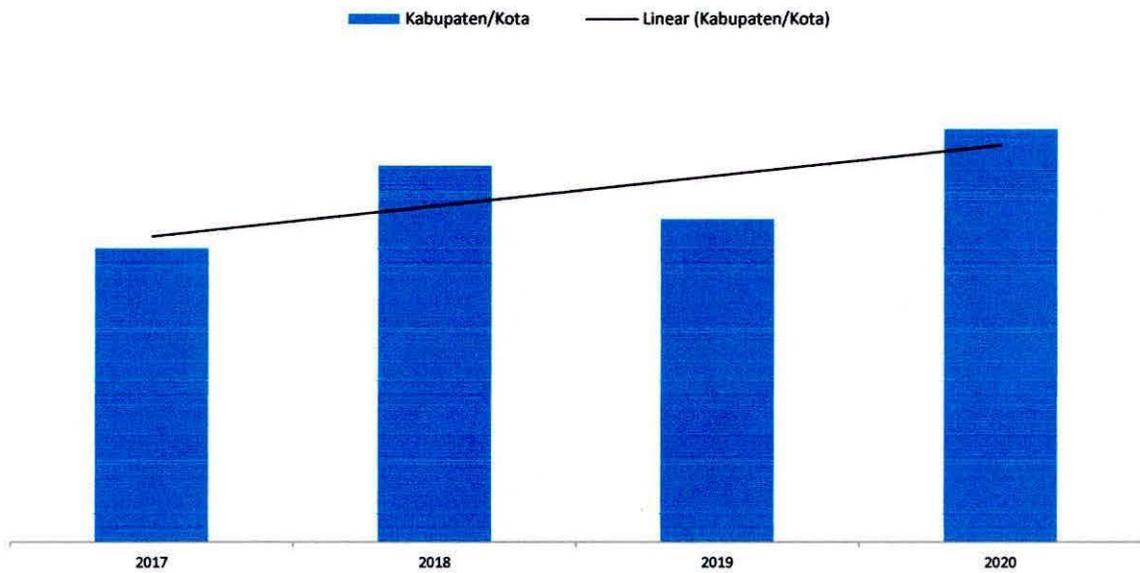
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Persentase Setengah Pengangguran 17 Kab/Kota, Provinsi, dan Nasional Tahun 2020 :



Analisis Efektivitas

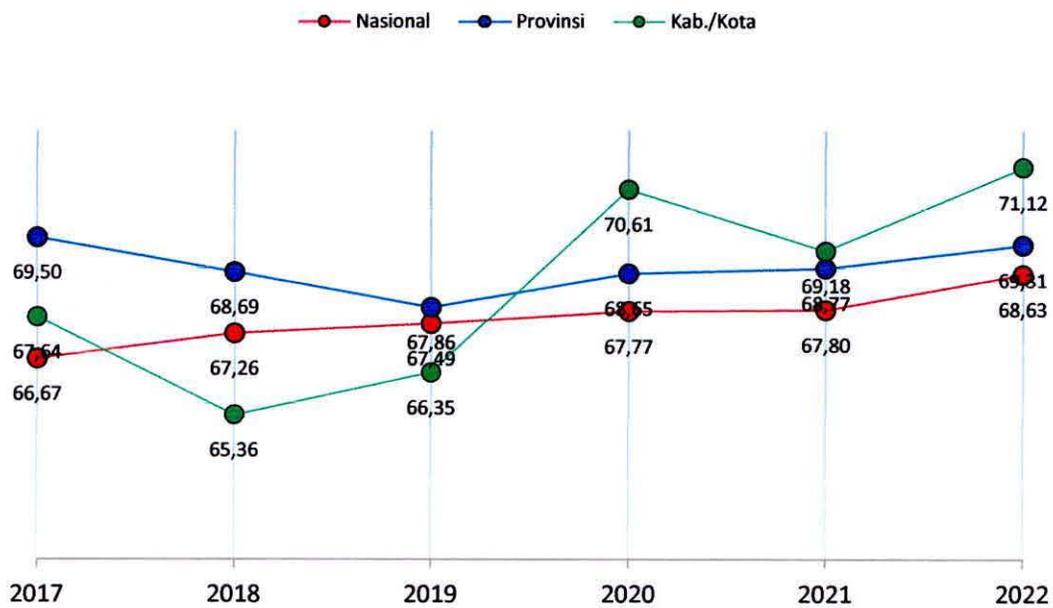


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

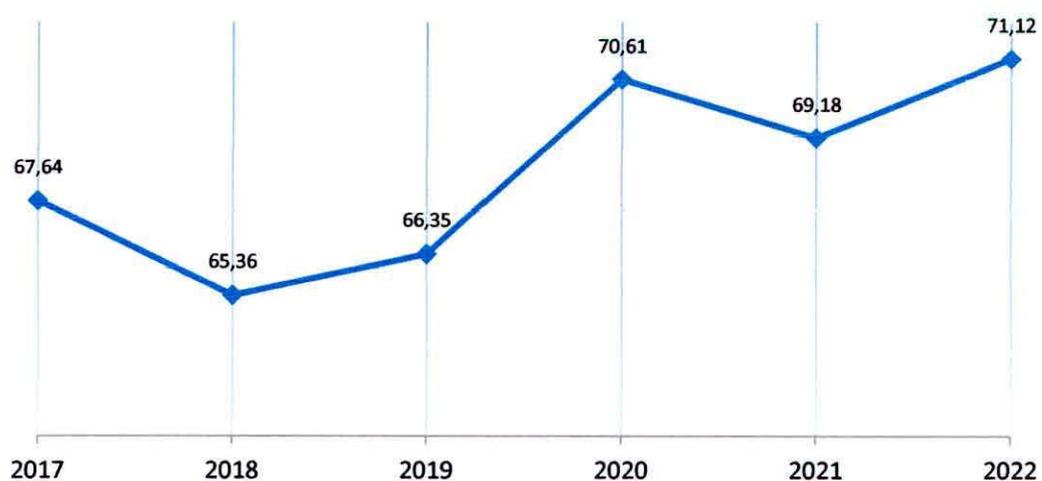
3.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Grafik 3.11
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

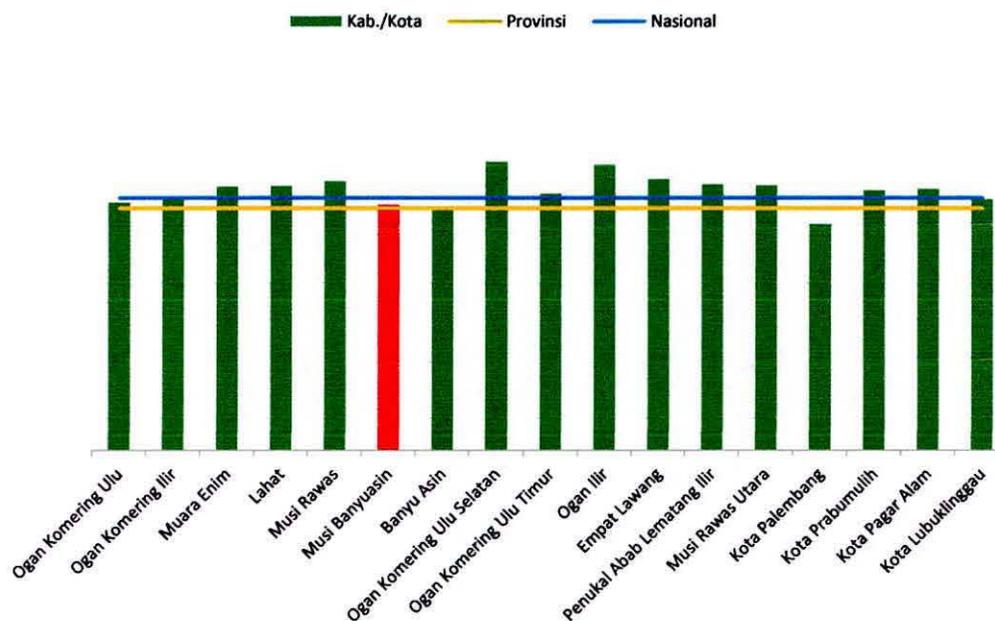
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



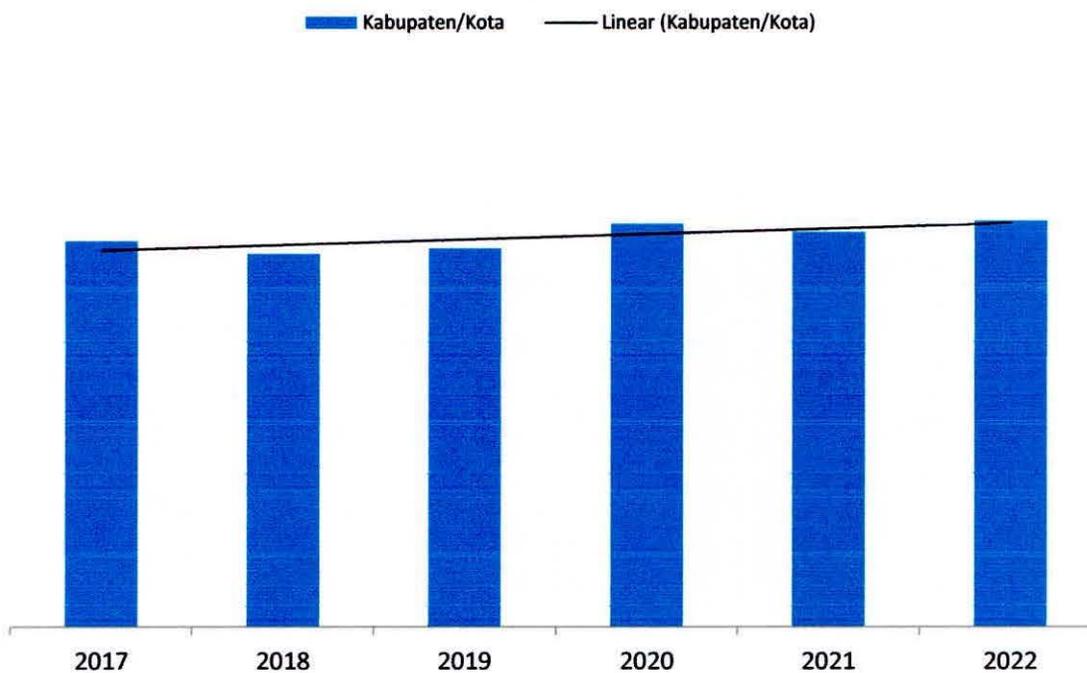
Analisis Perkembangan Antar Waktu



TPAK 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020 :



Analisis Efektivitas

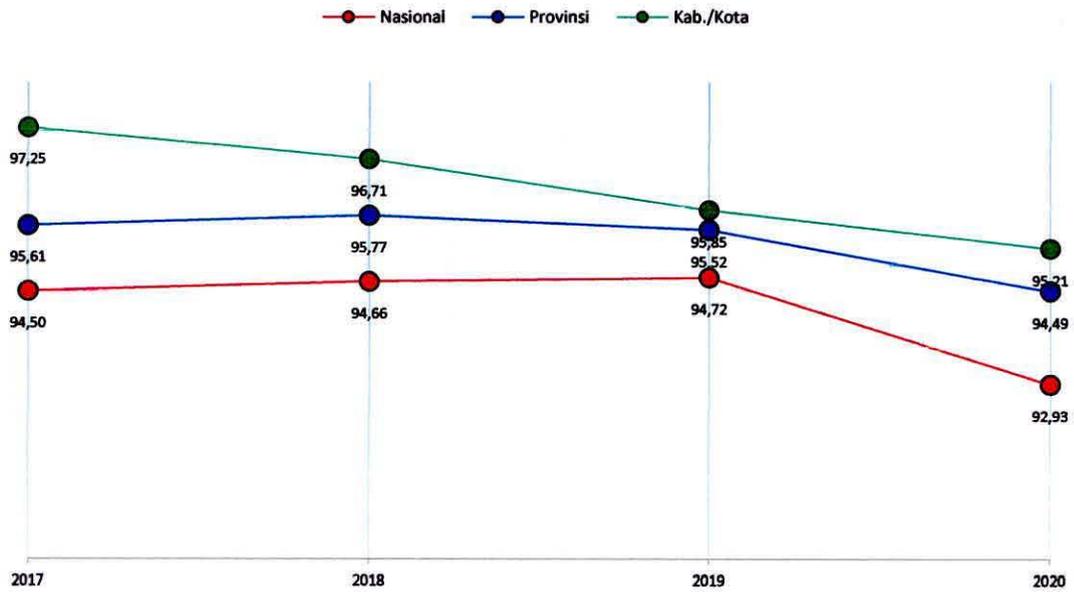


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

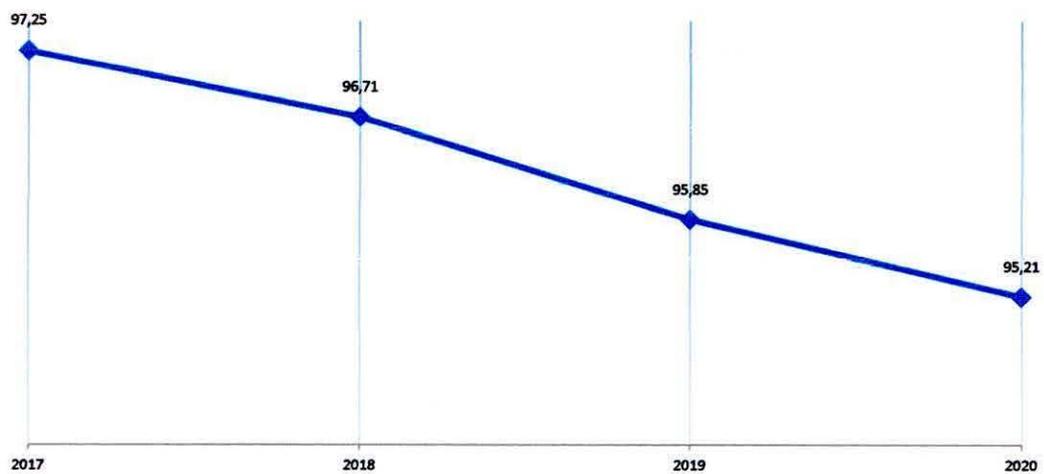
3.2.5 Tingkat Kesempatan Kerja

Grafik 3.12 Tingkat Kesempatan Kerja

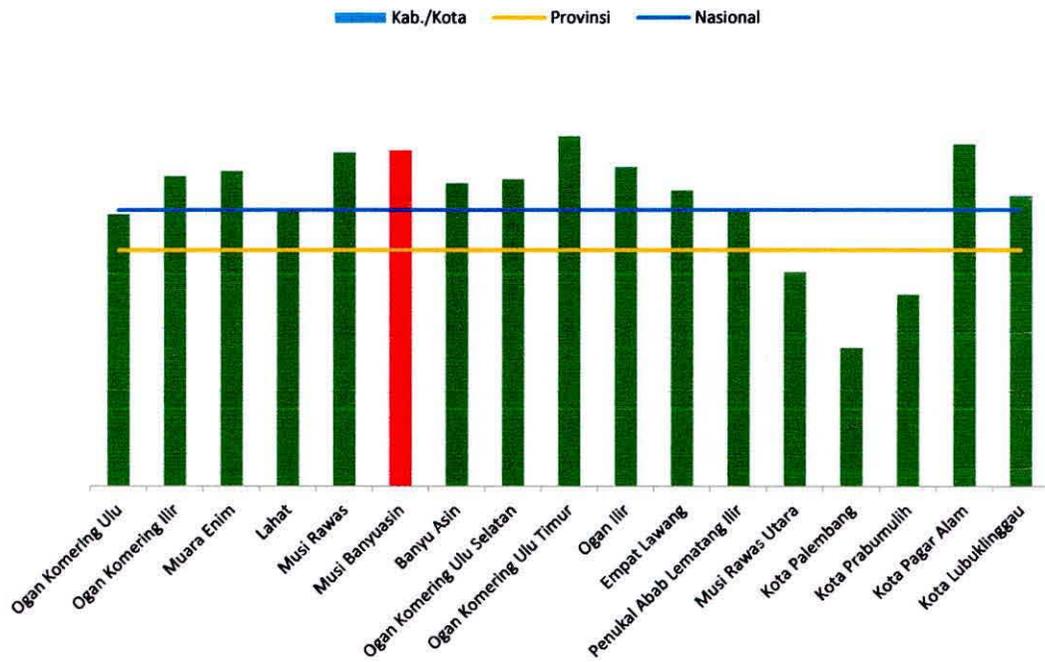
Tren TTK Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional
Tahun 2017 - 2020



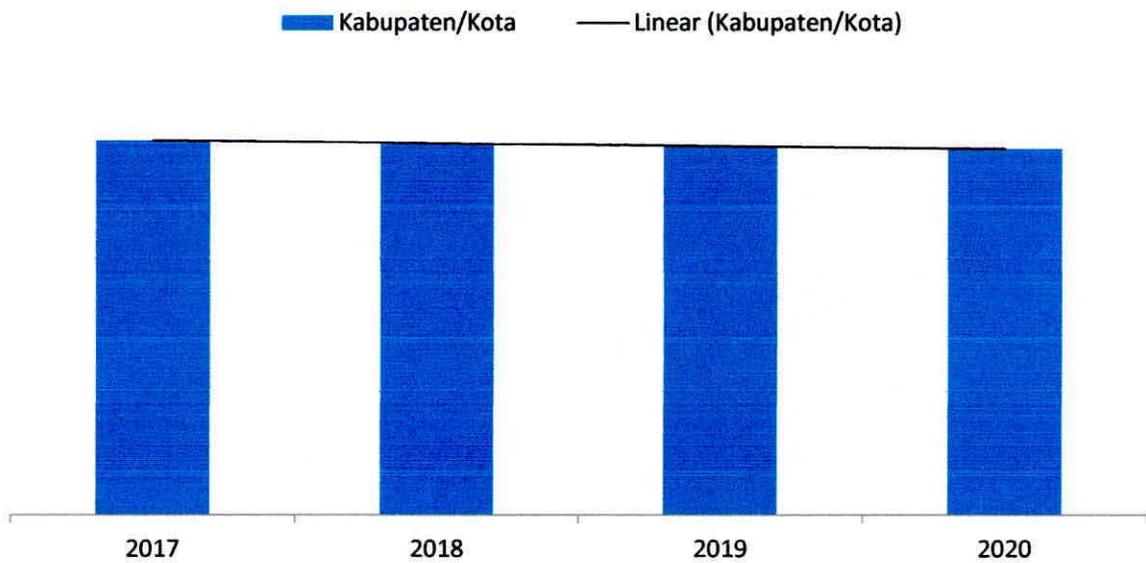
Analisis Perkembangan Antar Waktu



TKK 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020 :



Analisis Efektivitas



Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

Tabel 3.2
Hasil Analisis Bidang Ketenagakerjaan

Kabupaten Muba	Perspektif					
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 4,40	Tren Tingkat pengangguran terbuka tiap tahunnya mengalami kenaikan dan pernah menurun di tahun 2021 dan selalu berada dibawah Nasional dan Provinsi.	Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka kabupaten Musi Banyuasin mengalami kenaikan berbanding terbalik dengan Nasional Provinsi yang mengalami penurunan.	Meskipun selalu mengalami kenaikan, tingkat pengangguran terbuka dikabupaten Musi Banyuasin masih dibawah Nasional dan Provinsi.	Diperlukan upaya untuk mencegah kenaikan tingkat pengangguran terbuka dikabupaten Musi Banyuasin.
	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah angkatan kerja di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 346278	Tren jumlah angkatan kerja mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018 dan mengalami kenaikan sejak tahun 2018-2022	Terjadi kenaikan tajam pada tahun 2020	Kenaikan yang tinggi pada tahun 2020 di kaitkan dengan adanya pandemi Covid-19	Upaya untuk mencegah lonjakan yang tinggi perlu dilakukan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin
	Persentase Setengah Pengangguran	Persentase setengah pengangguran di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 39.50	Tren setengah pengangguran setiap tahunnya berfluktuasi dan menyalip Provinsi pada tahun 2018.	Persentase setengah mengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Namun, berada dibawah Provinsi yang mengalami kenaikan tajam	Tren kenaikan kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan Nasional sama. Namun, yang berbeda hanya dilajunya saja.	Upaya untuk menekan kenaikan harus diterapkan pemerintah agar tetap menurun seperti tahun 2018 ke 2019

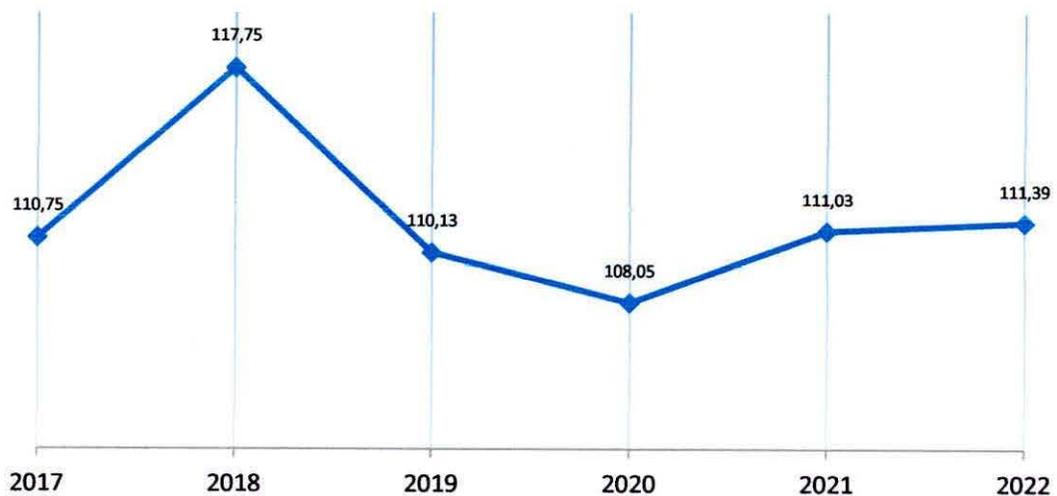
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	TPAK di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 71,12	Meskipun tren berfluktuatif. Sejak tahun 2018 sampai 2022 TPAK kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kenaikan.	Peningkatan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 dan berhasil berada di atas Nasional dan Provinsi.	Tren TPAK kabupaten Musi Banyuasin tidak beriringan dengan tren yang ada pada Nasional dan Provinsi.	Upaya untuk mempertahankan kenaikan pada tahun 2020 perlu dilakukan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin.
Tingkat Kesempatan Kerja	TKK di kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 sebesar 95.21	Tren TKK selalu menurun sejak tahun 2017-2020.	Pada tahun 2020 TKK kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan, namun masih di atas Nasional dan Provinsi.	Tren TKK kabupaten Musi Banyuasin tidak beriringan dengan Nasional dan Provinsi, dimana Nasional dan Provinsi selalu mengalami kenaikan dan baru menurun ditahun 2020.	Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin perlu meningkatkan kesempatan kerja dengan melakukan berbagai upaya.

3.3 Bidang Pendidikan

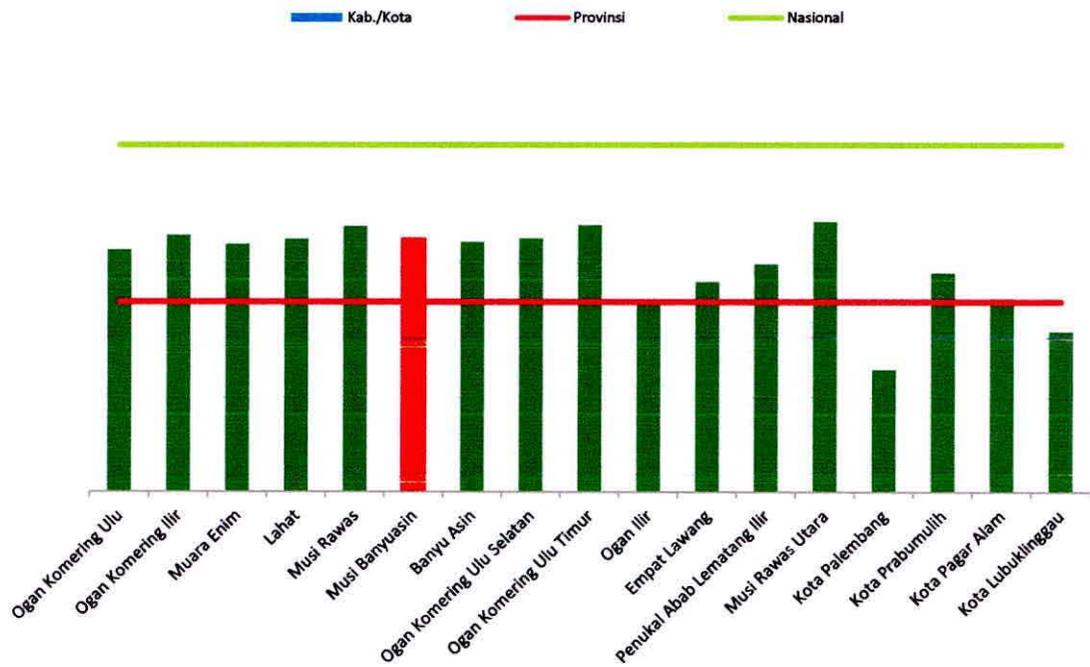
3.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Grafik 3.1
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

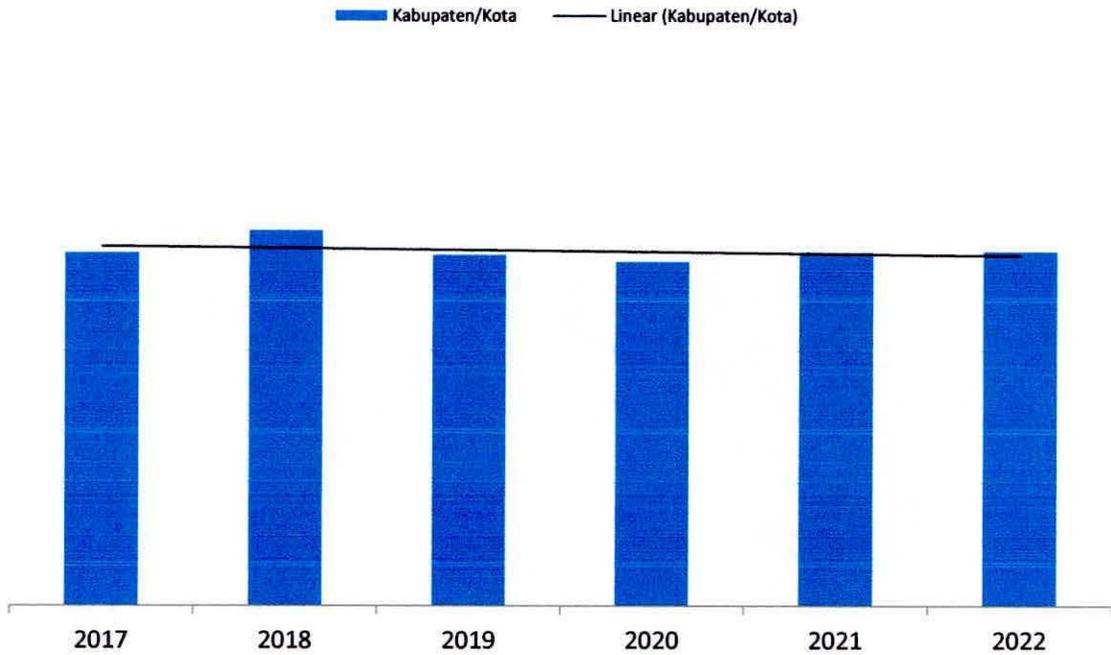
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



Analisis Posisi Relatif :



Analisis Efektivitas



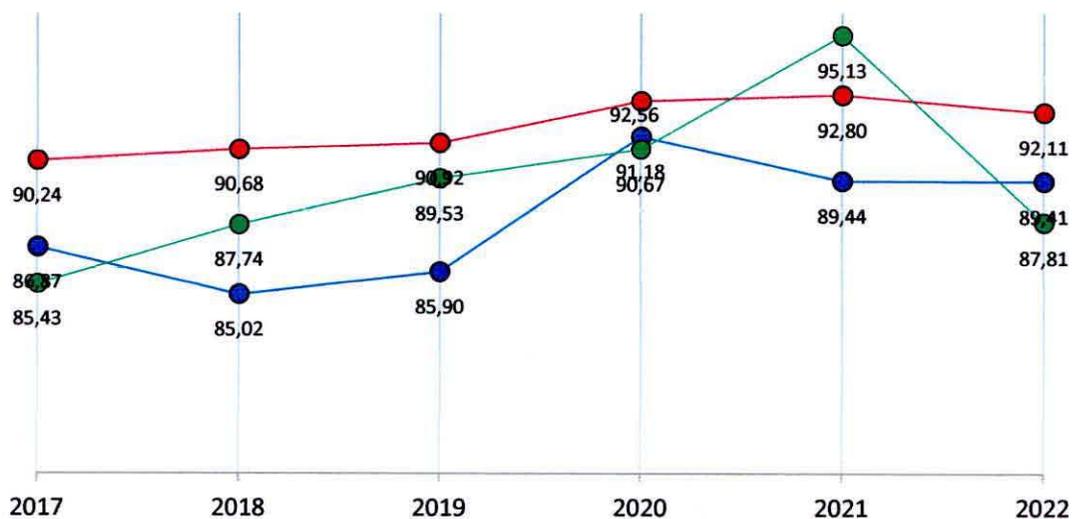
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.3.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS

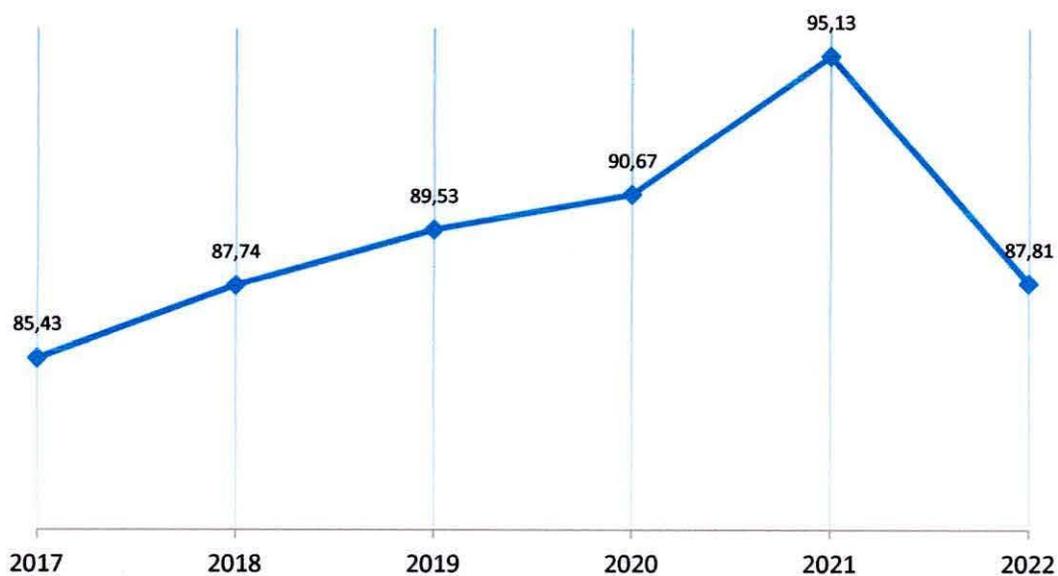
Grafik 3.14
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2018

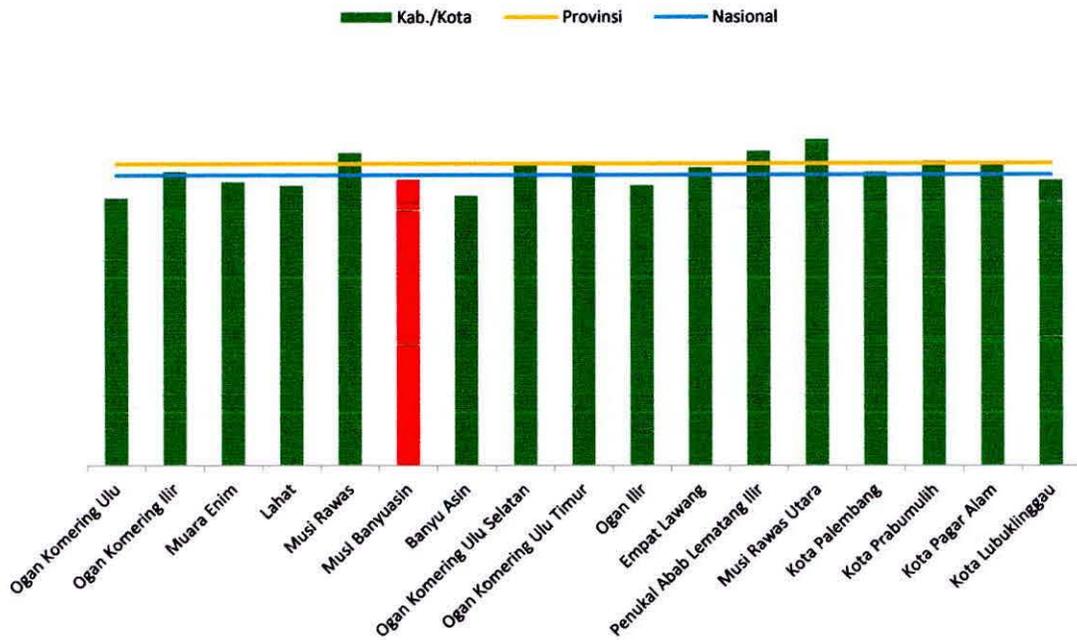
—●— Nasional —●— Provinsi —●— Kab./Kota



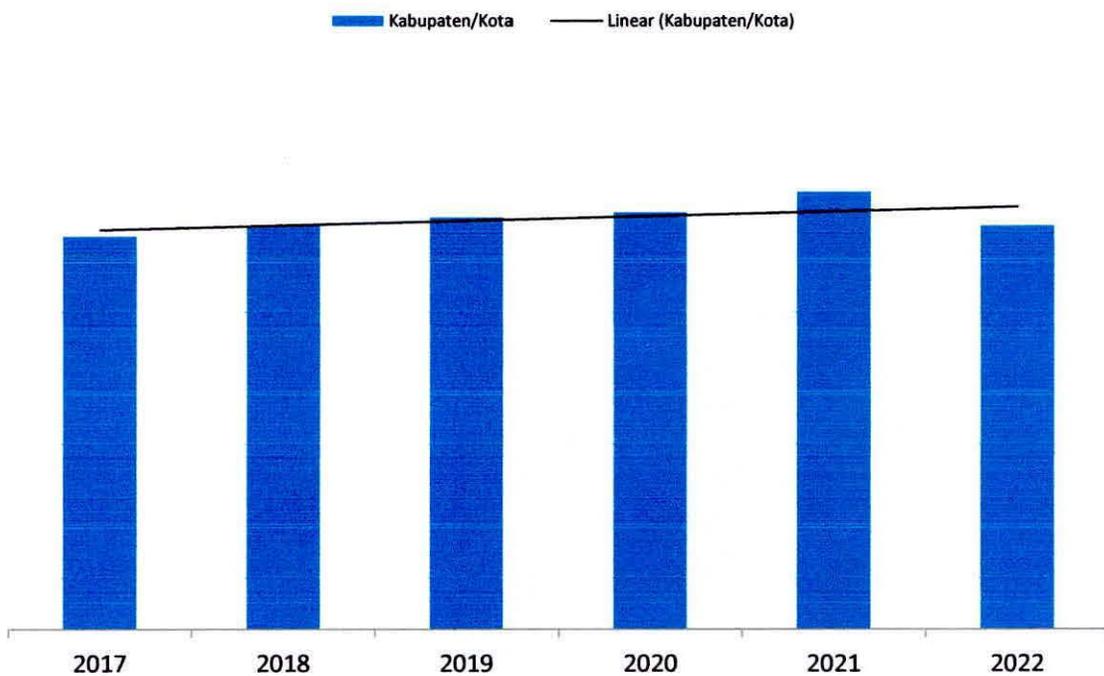
Analisis Perkembangan Antar Waktu



APK SMP/MTS 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

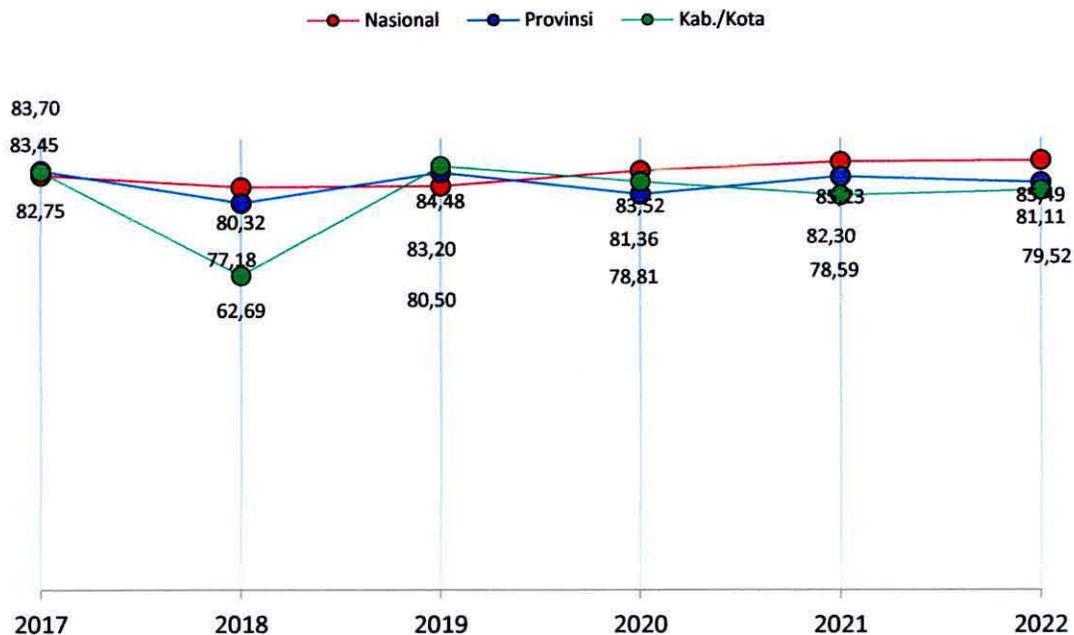


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

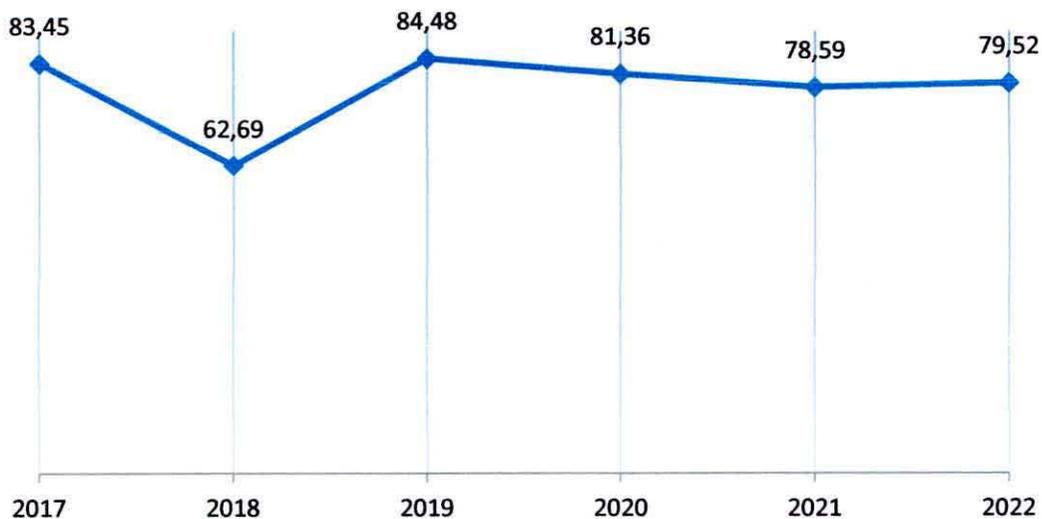
3.3.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

Grafik 3.15
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA

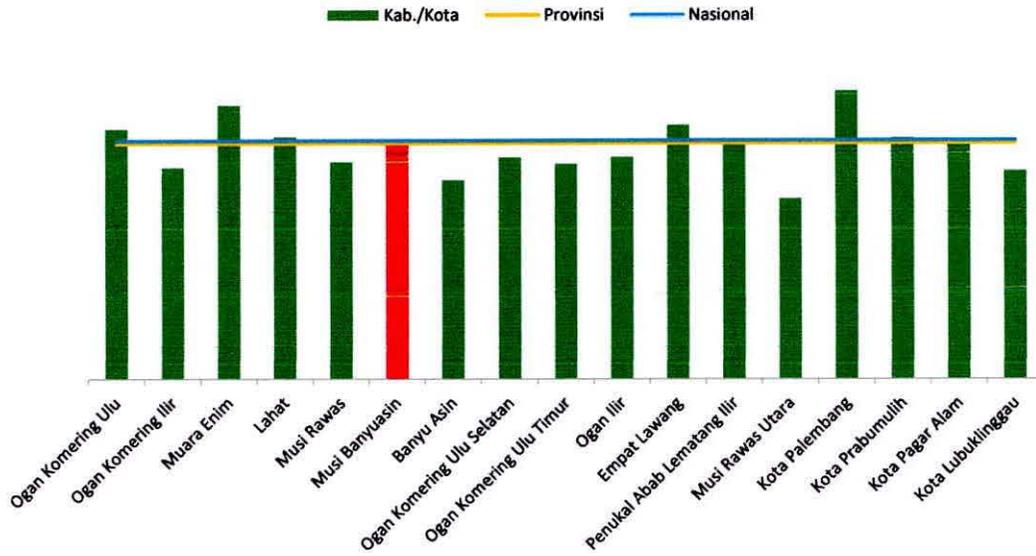
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



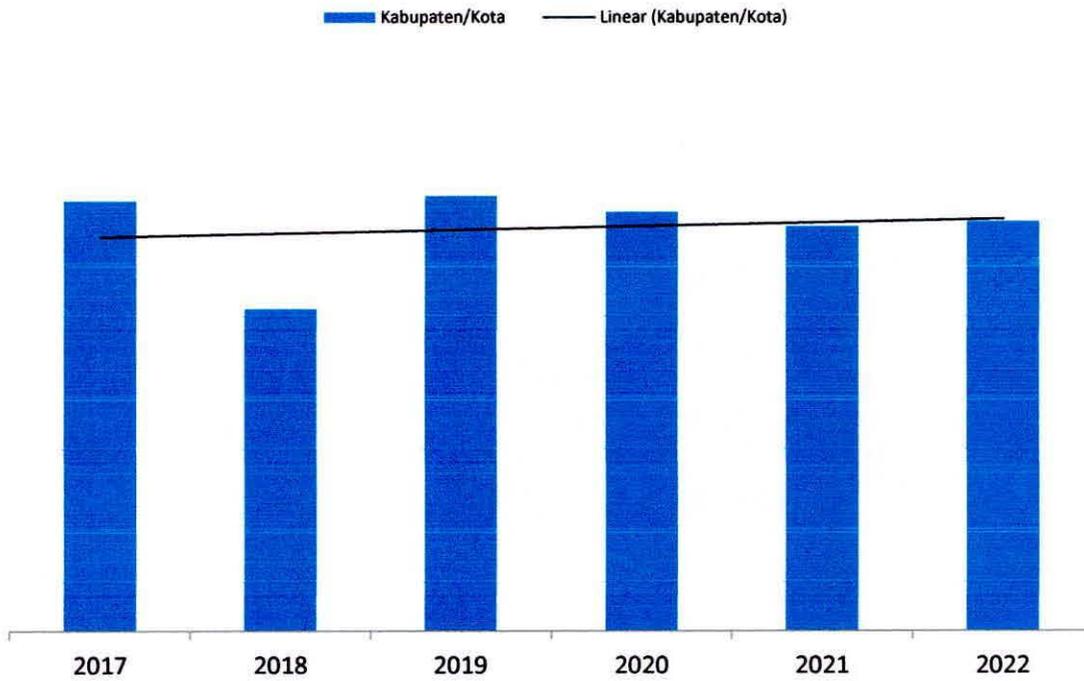
Analisis Perkembangan Antar Waktu



APK SMA/MA 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas



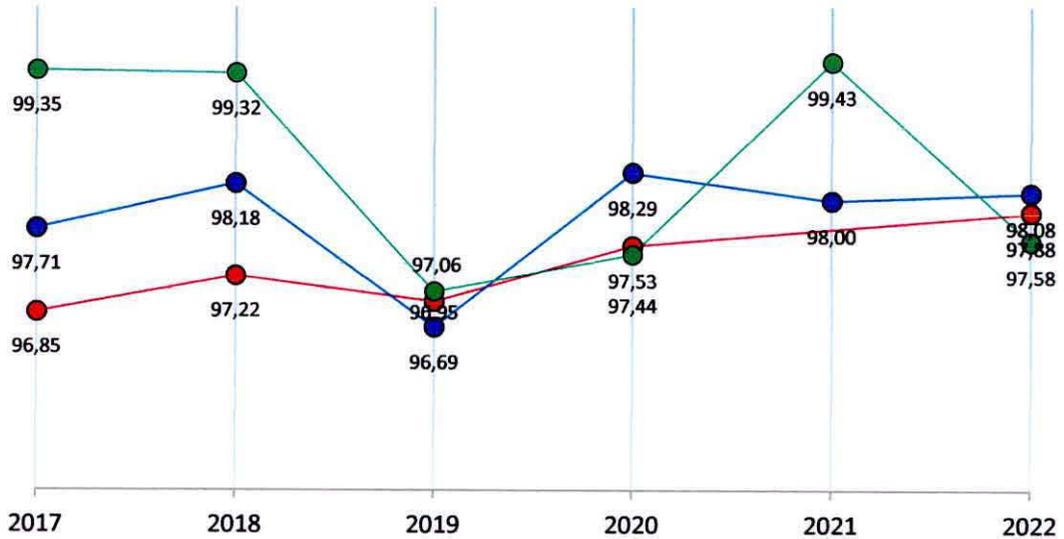
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

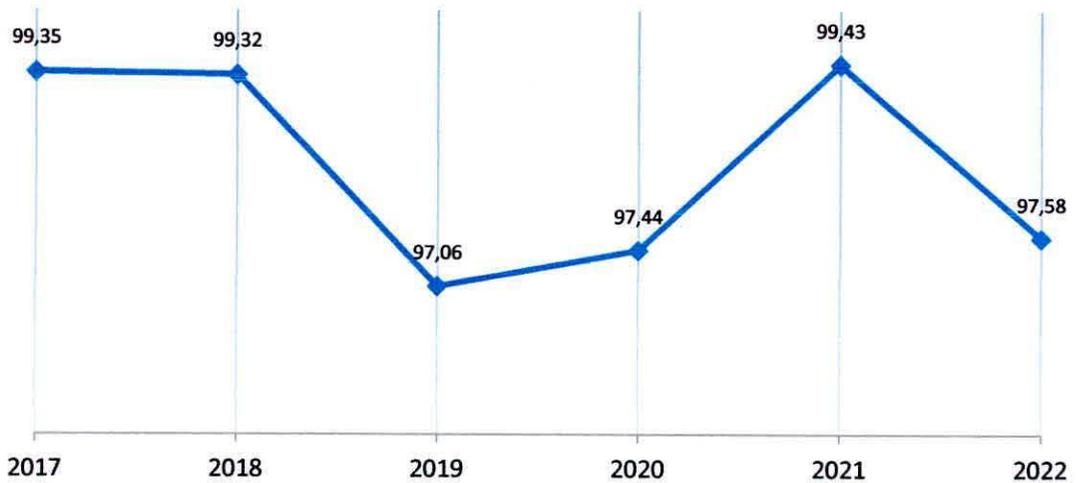
Grafik 3.16
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022

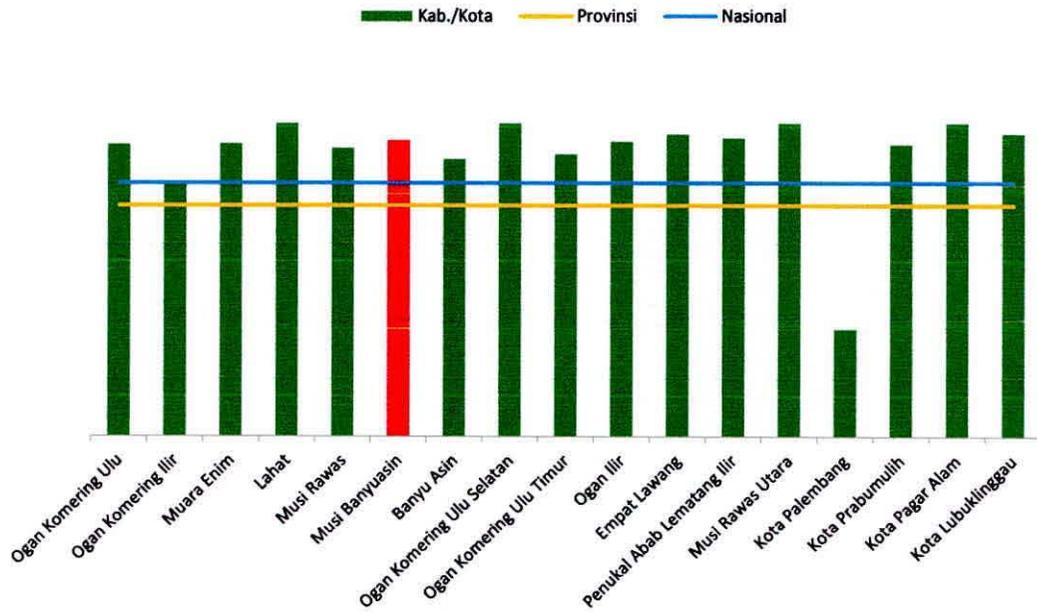
—●— Nasional —●— Provinsi —●— Kab./Kota



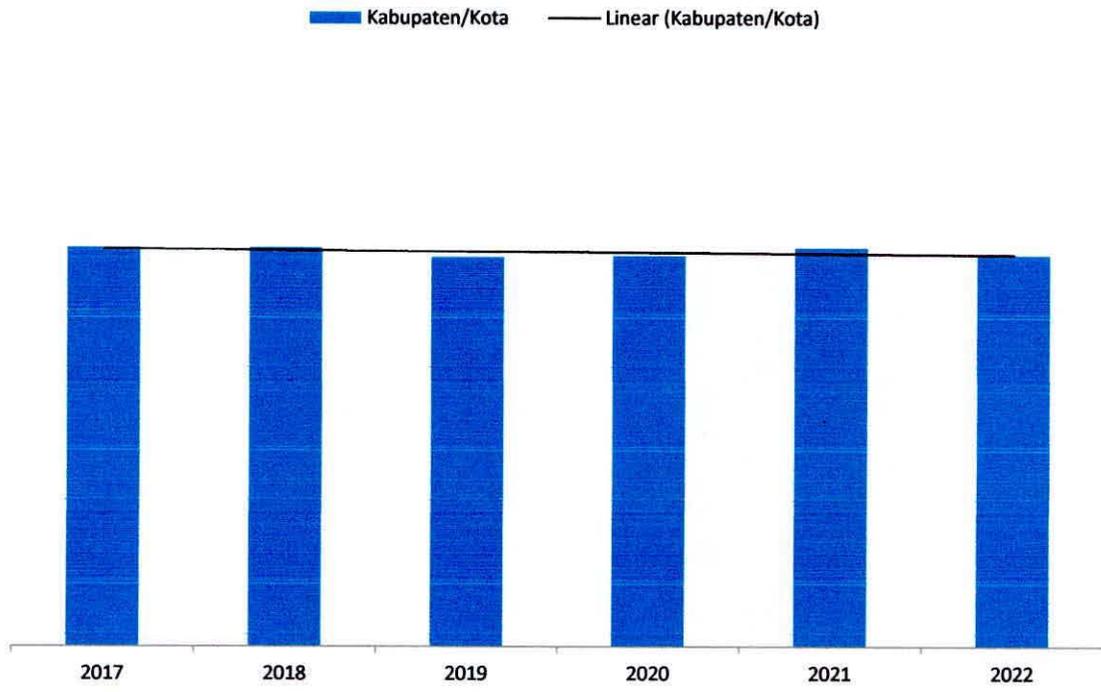
Analisis Perkembangan Antar Waktu



APM SD/MI 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

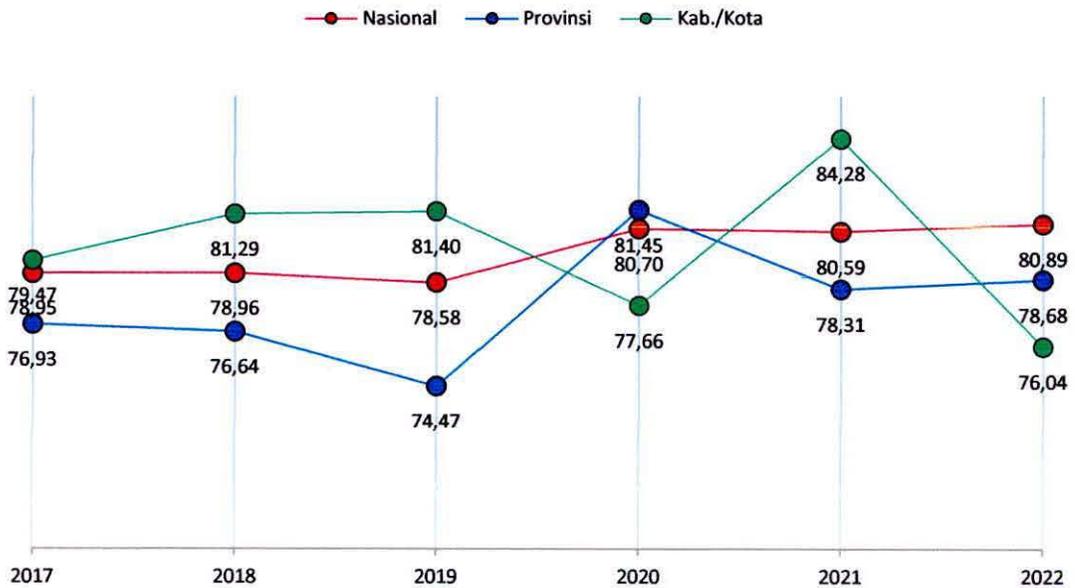


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

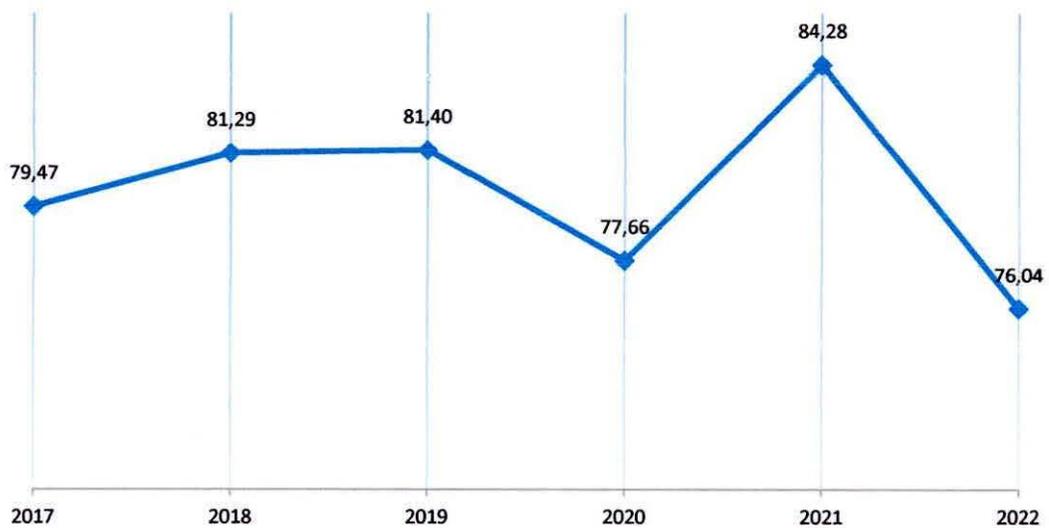
3.3.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS

Grafik 3.17
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS

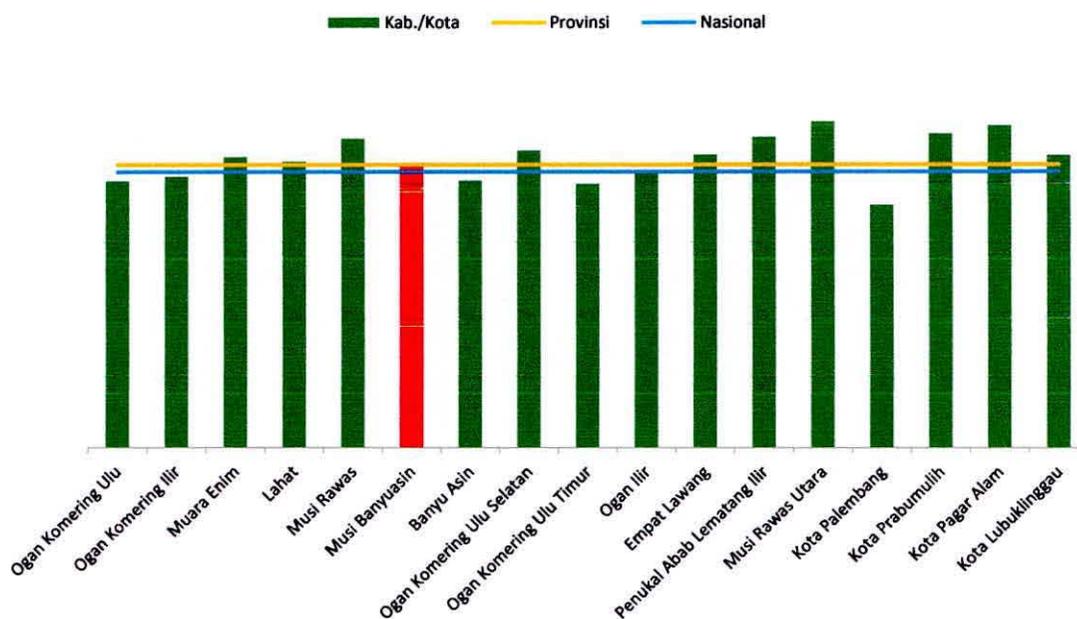
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



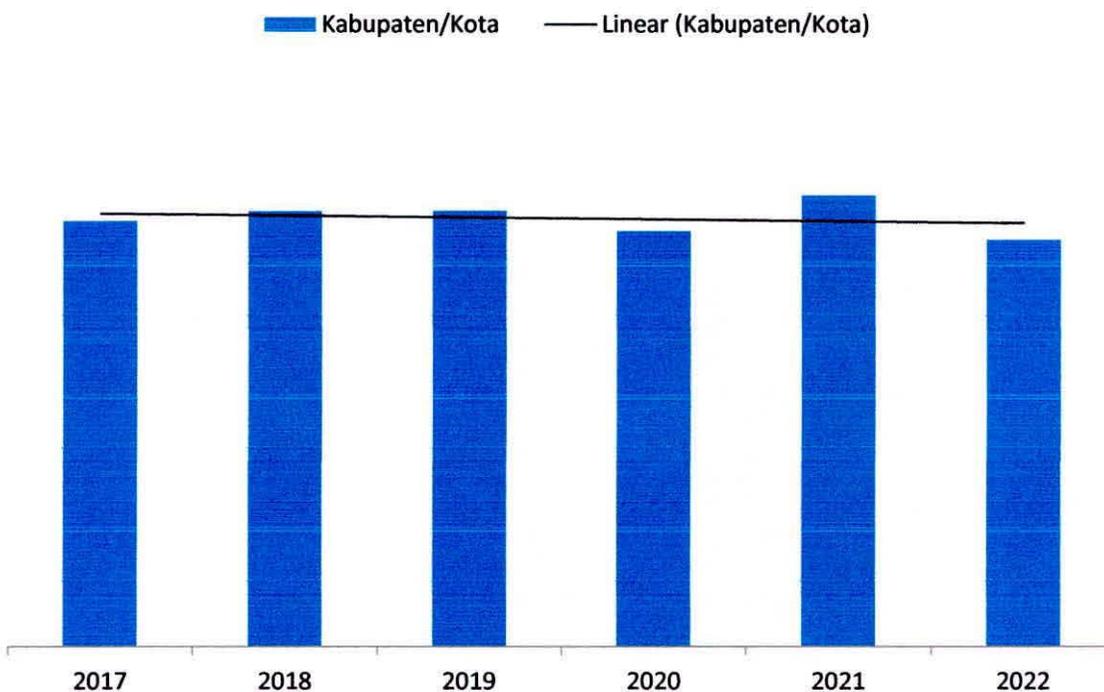
Analisis Perkembangan Antar Waktu



APM SMP/MTS 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

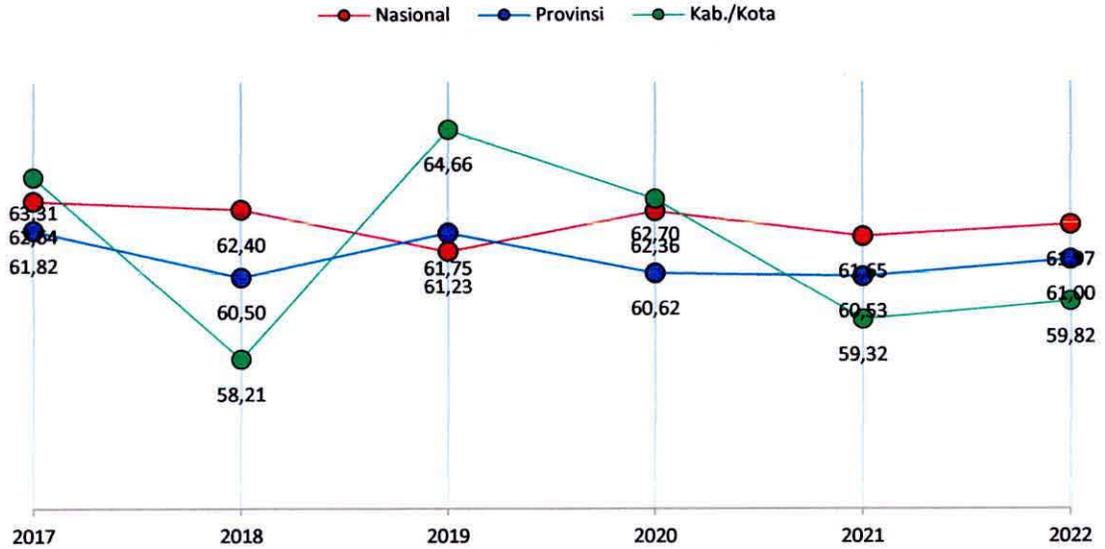


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

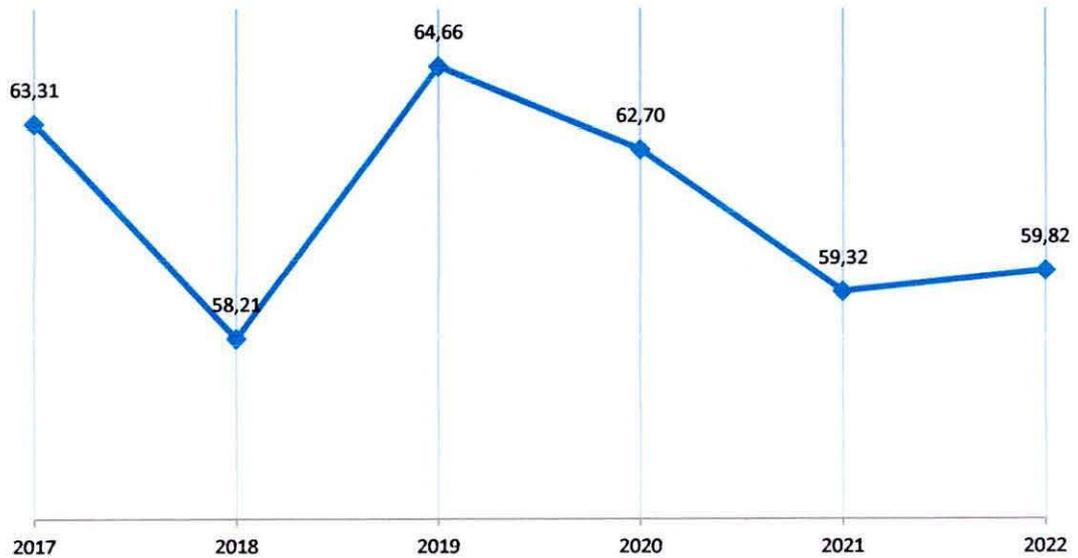
3.3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

Grafik 3.18
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA

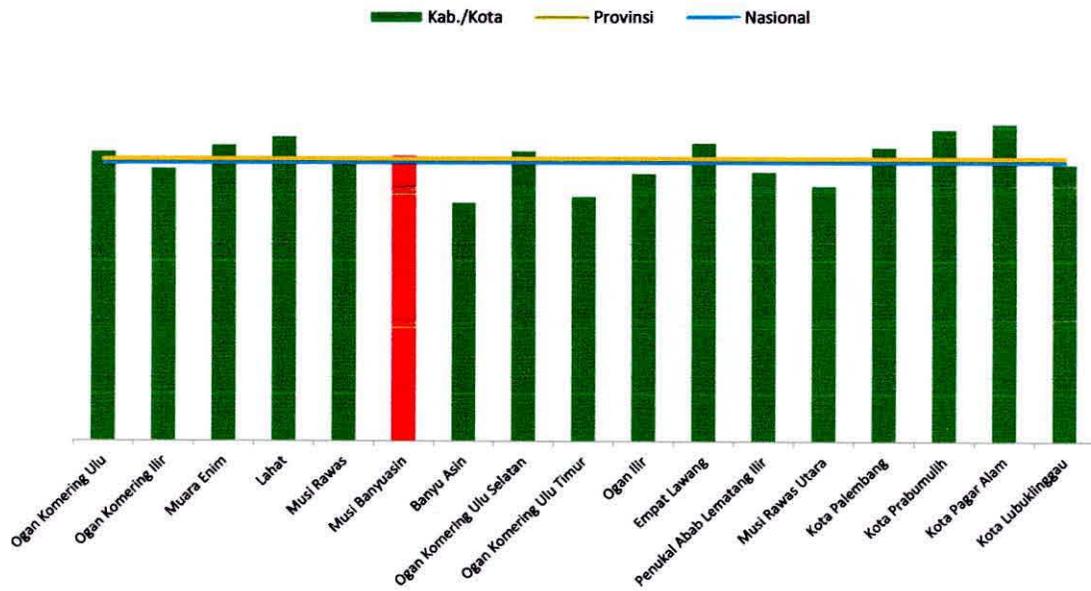
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022



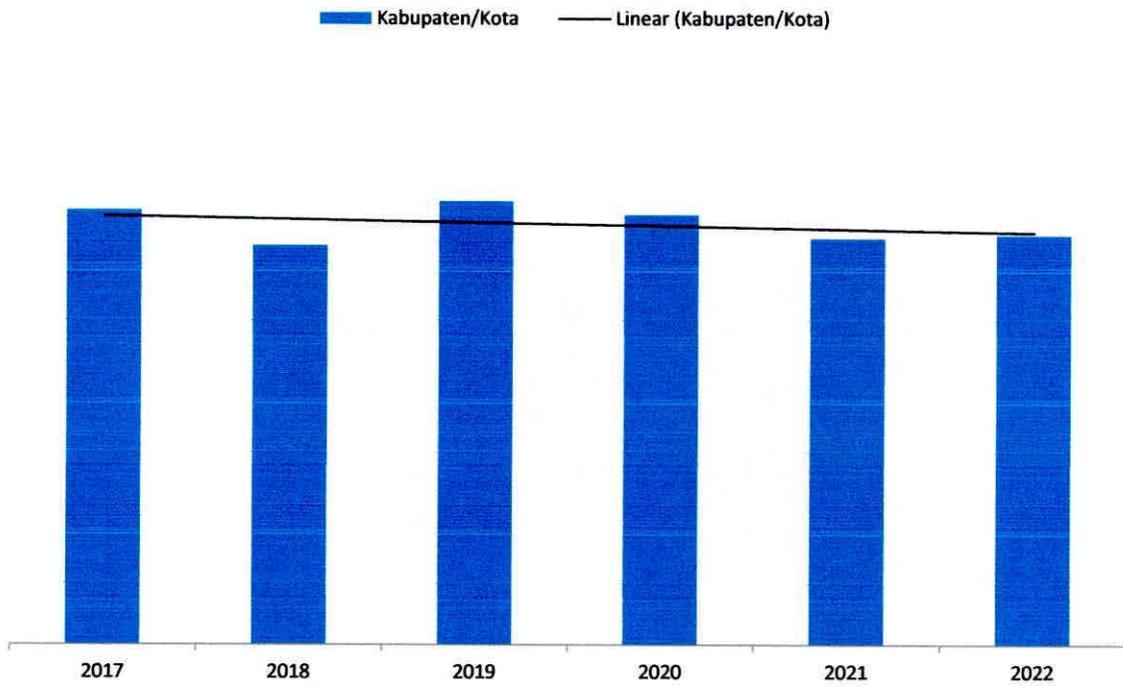
Analisis Perkembangan Antar Waktu



APM SMP/MTS 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

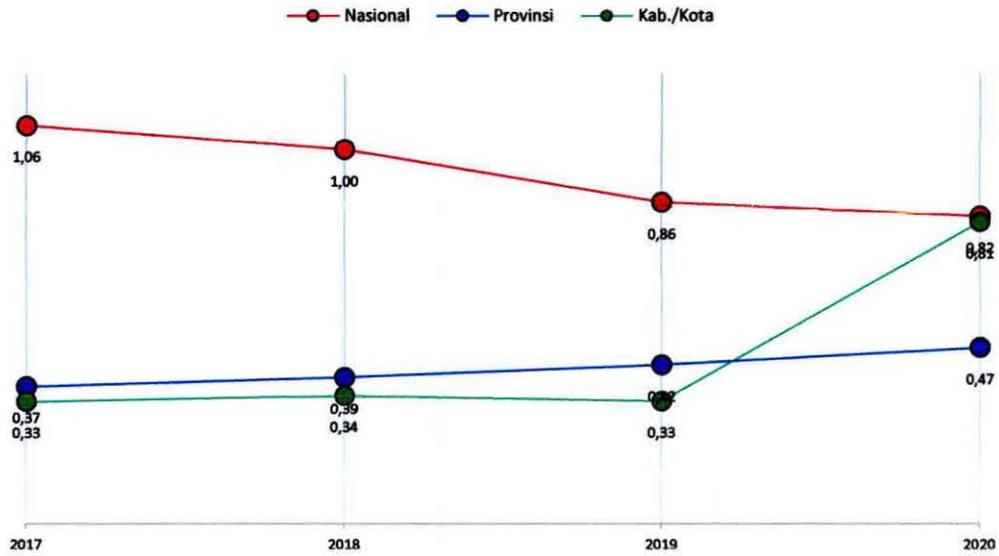


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

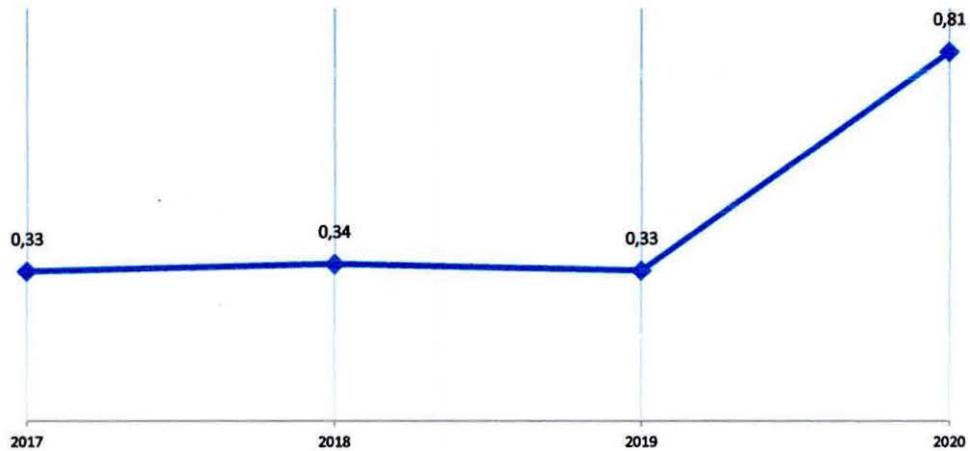
3.3.7 Angka Putus Sekolah Usia 7-12

Grafik 3.19
Angka Putus Sekolah Usia 7-12

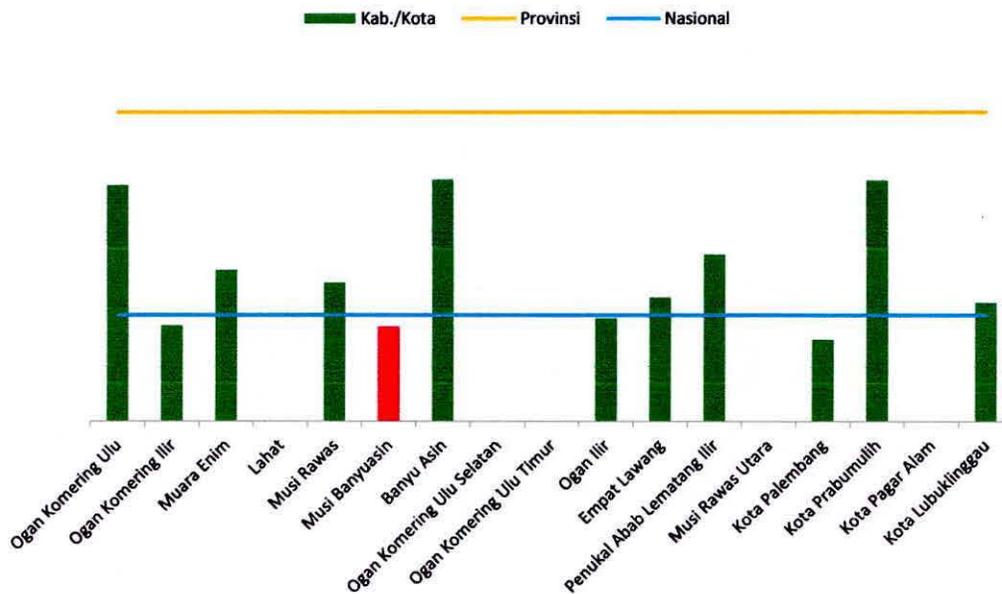
Angka Putus Sekolah Usia 7-12 Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2020



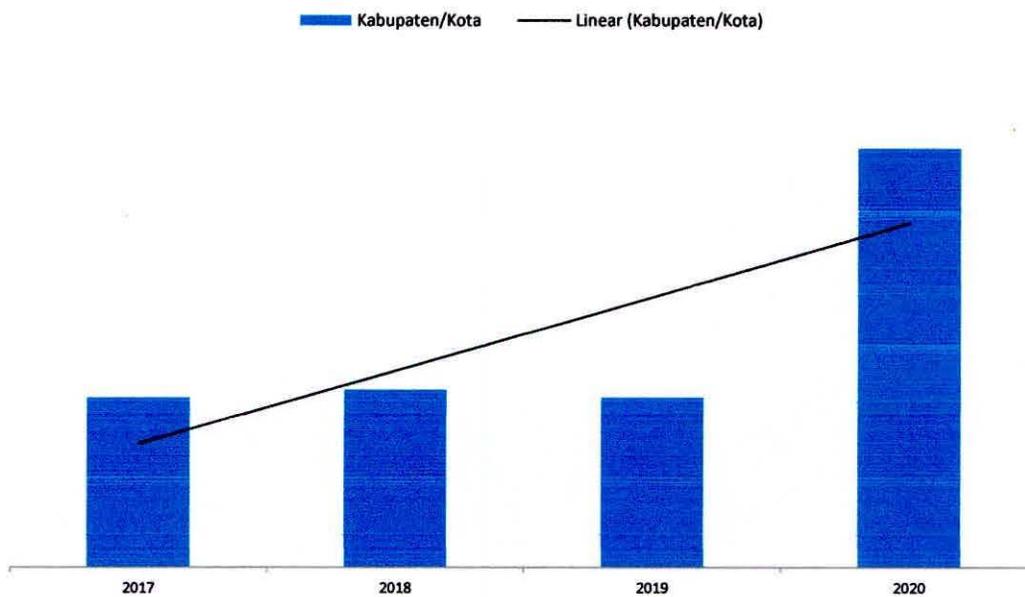
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Angka Putus Sekolah Usia 7-12 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020

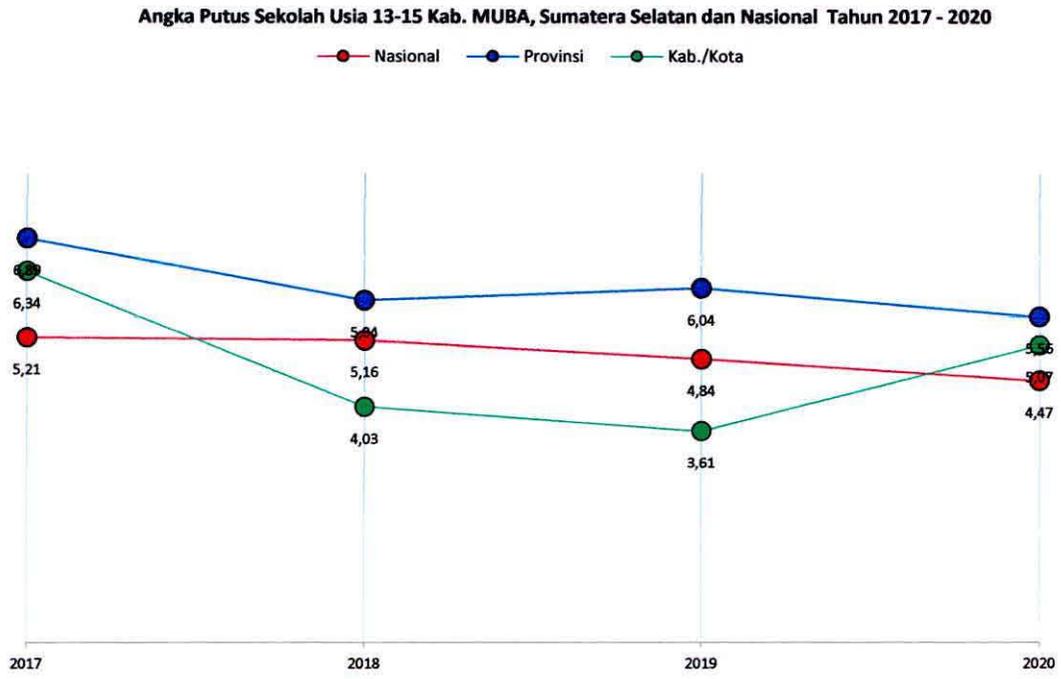


Analisis Efektivitas

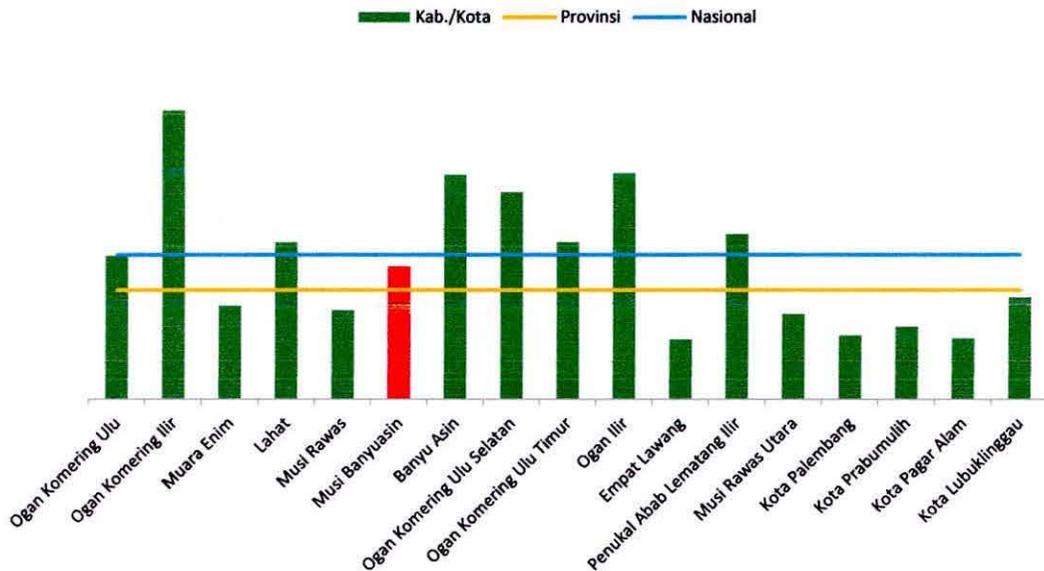


3.3.8 Angka Putus Sekolah Usia 13-15

Grafik 3.20
Angka Putus Sekolah Usia 13-15



Angka Putus Sekolah Usia 13-15 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020

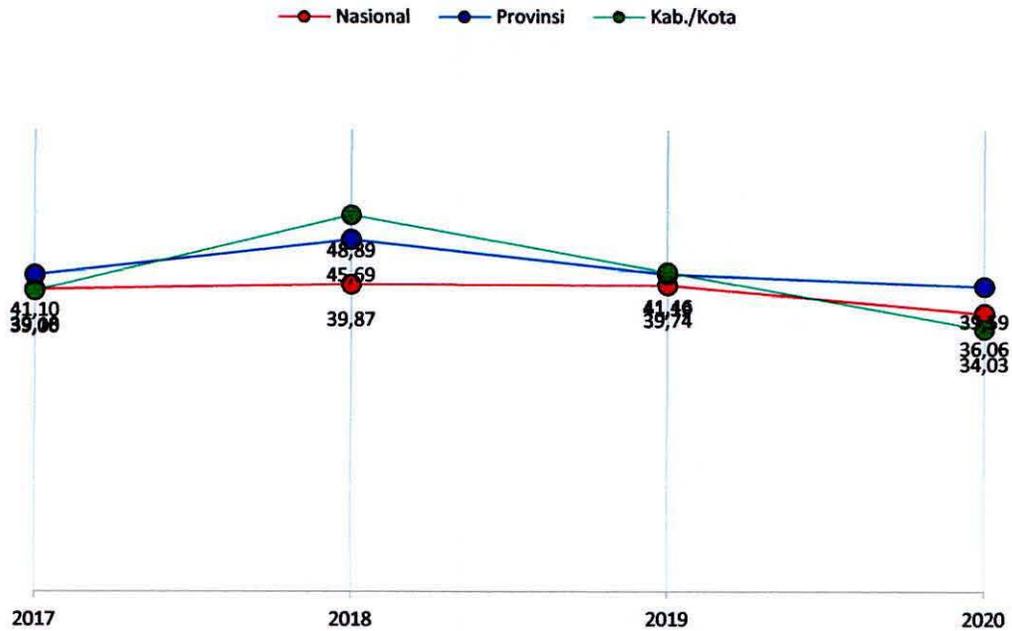


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

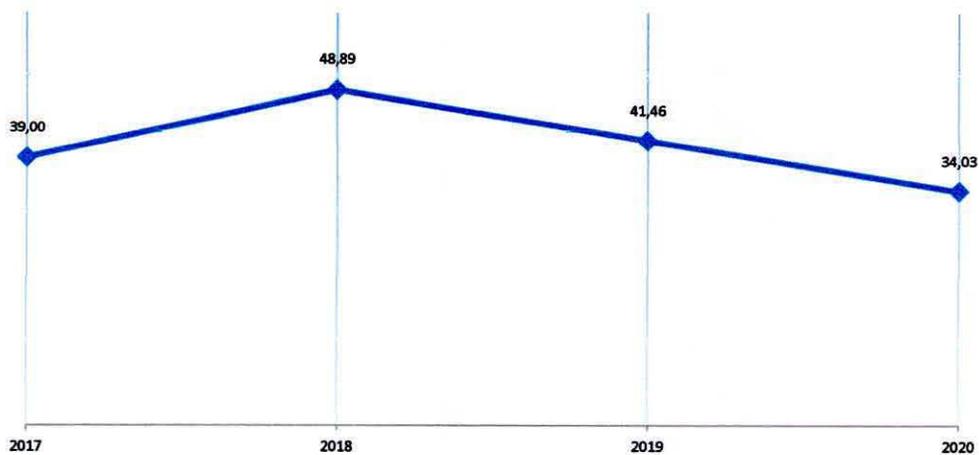
3.3.9 Angka Putus Sekolah Usia 16-18

Grafik 3.21
Angka Putus Sekolah Usia 16-18

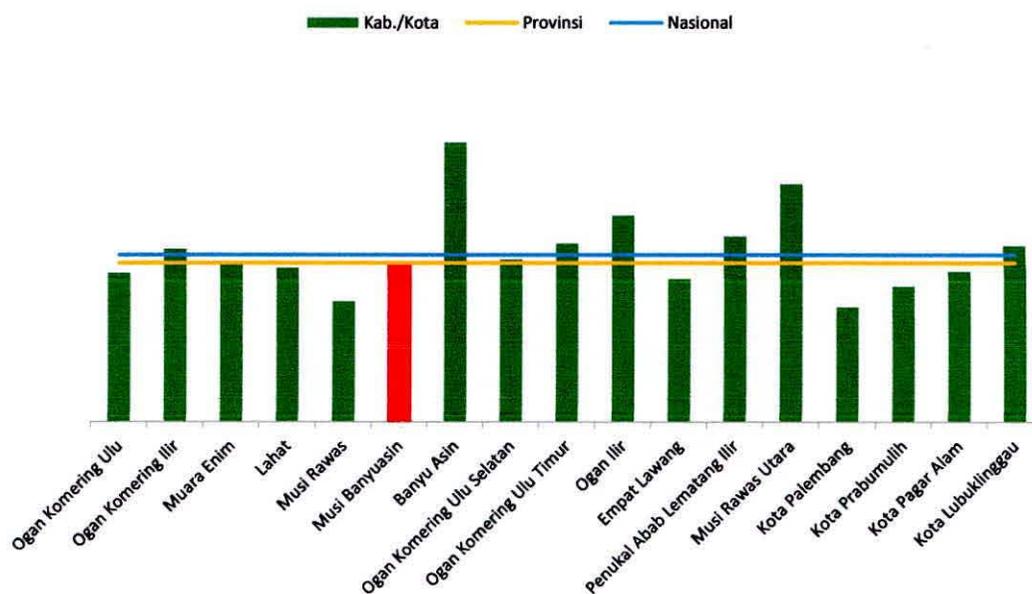
Angka Putus Sekolah Usia 13-15 Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2020



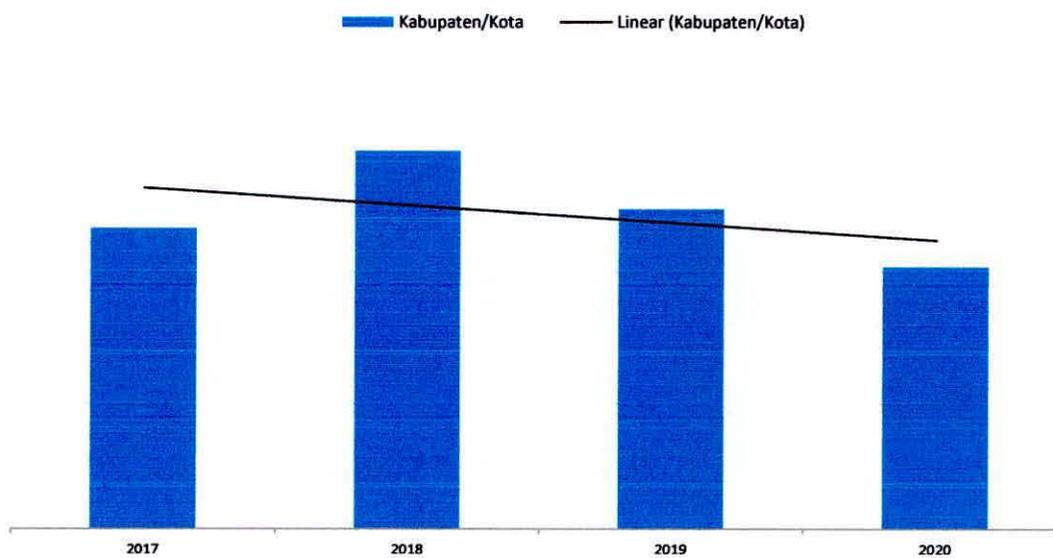
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Angka Putus Sekolah Usia 16-18 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas



Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

Tabel 3.3
Hasil Analisis Bidang Pendidikan

Kabupaten Muba	Perspektif					
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 111.39	Perkembangan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, selalu berada diatas Nasional. Namun terkadang diatas atau dibawah Provinsi	Tahun 202 terjadi peningkatan dibandingkan APK tahun 2021	Tren APK kabupaten Musi Banyuasin tidak beriringan dengan Nasional maupun Provinsi	Perlu upaya agar terjadi peningkatan APK
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 87,81	Setiap tahunnya APK SMP/MTS mengalami peningkatan dan masih berada dibawah Nasional. Dan diatas Provinsi selama 2018 dan 2019	Tahun 2022 terjadi penurunan yang drastis	Secara umum tren kabupaten Musi Banyuasin beriringan dengan tren Nasional namun tidak dengan tren Provinsi	Kabupaten Musi Banyuasin sudah menunjukkan capaian yang baik
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 79,52	Terjadi penurunan tajam pada tahun 2018 namun kembali meningkat ditahun berikutnya.	Tahun 2022 terjadi penurunan disbanding tahun sebelumnya dan tren berada diantara Nasional dan Provinsi	Tren selalu beriringan antara kabupaten Musi Banyuasin, Nasional dan Provinsi. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan yang tajam bagi	Terjadi peningkatan sedikit pada tahun 2022 perlu ditingkatkan kembali

				kabupaten Musi Banyuasin.	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 97,58	Terjadi penurunan tajam pada tahun 2019 dan 2022, secara keseluruhan selain tahun 2019 dan 2022 terjadi peningkatan dan selalu berada diatas Nasional dan Provinsi kecuali tahun 2020 dan 2022	Tahun 2022 APM SD/MI kabupaten Musi Banyuasin turun drastis seperti tahun 2019 yang terjun jauh.	Tren berjalan beriringan antara kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi, dan Nasional. Kecuali pada tahun 2020 dan 2022 dimana laju kabupaten Musi Banyuasin tak sebesar Nasional Provinsi	Upaya pada tahun 2022 telah baik, namun sangat perlu peningkatan lagi
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 76,04	Secara umum terjadi peningkatan dan berada diatas Nasional dan Provinsi dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan tajam dan berada dibawah Nasional dan Provinsi.	Tahun 2022 terjadi penurunan tajam berbanding terbalik dengan Nasional dan Provinsi yang mengalami peningkatan	Tren APM SMP/MTS kabupaten Musi Banyuasin sejalan dengan Nasional dan Provinsi namun tidak untuk tahun 2022	Perlu perbaikan untuk memperbaiki penurunan pada tahun 2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MI	Pada Tahun 2022 capaian Kabupaten	Secara umum selalu berada diatas Nasional dan Provinsi	Tahun 2020 terjadi penurunan pada APM SMA/MA	Tren secara umum tidak berjalan	Capaian tahun 2022 telah terjadi peningkatan dan perlu

	Musi Banyuasin 59,82	kecuali pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan.	kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan terjadi peningkatan pada Nasional dan penurunan pada Provinsi.	beriringan dengan Nasional maupun Provinsi	ditingkatkan Kembali.
Angka Putus Sekolah Usia 7-12	Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 0.81	Secara umum terjadi peningkatan setiap tahunnya meskipun selama tahun 2017-2019 berada dibawah Nasional dan Provinsi.	Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana kenaikan ini membuat angka Nasional dan kabupaten memiliki selisih yang tipis.	Tren secara umum seiring dengan Provinsi dan berbalik dengan Nasional yang selalu menurun	Peningkatan yang tinggi pada tahun 2020 perlu menjadi fokus bagi pemerintah kabupaten Musi Banyuasin
Angka Putus Sekolah Usia 13-15	Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 5.07	Kabupaten telah menunjukan hal baik dengan penurunan selama 2018-2019 namun akhirnya kembali meningkat ditahun 2020	Peningkatan pada tahun 2020 berbanding terbalik dengan penurunan pada Nasional dan Provinsi	Tren tidak beriringan dengan tren Nasional maupun Provinsi	Perlu upaya untuk menekan angka putus sekolah yang meningkat ditahun 2020
Angka Putus Sekolah Usia 16-18	Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 34.03	Secara umum tren menunjukan penurunan.	Penurunan pada tahun 2020 membuat angka putus sekolah dikabupaten Musi Banyuasin berada dibawah Nasional dan Provinsi.	Tren sejalan setiap tahun sejak 2017-2020	Kabupaten Musi Banyuasin sudah menunjukan capaian yang baik

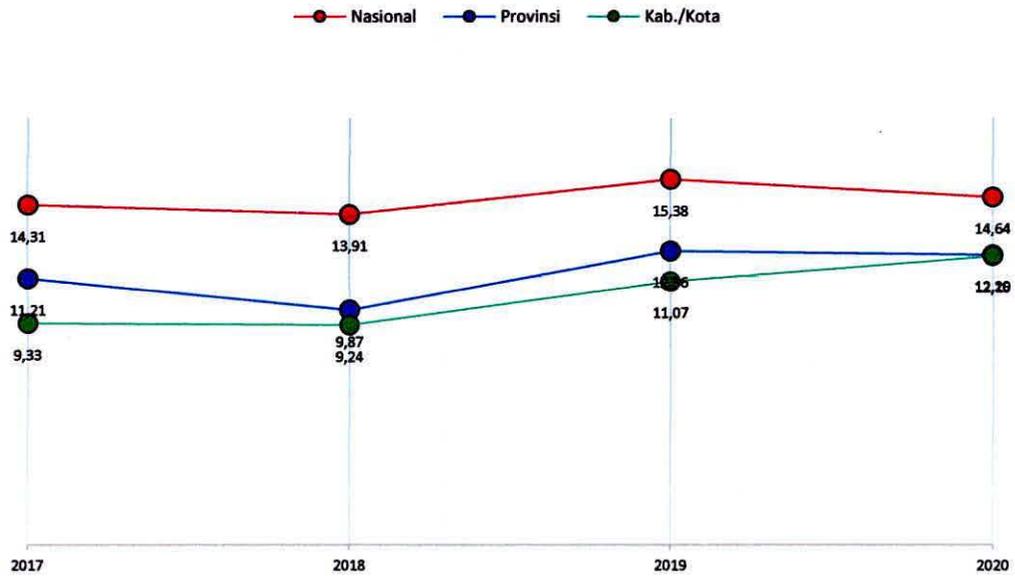
3.4. Bidang Kesehatan

3.4.1 Angka Morbiditas

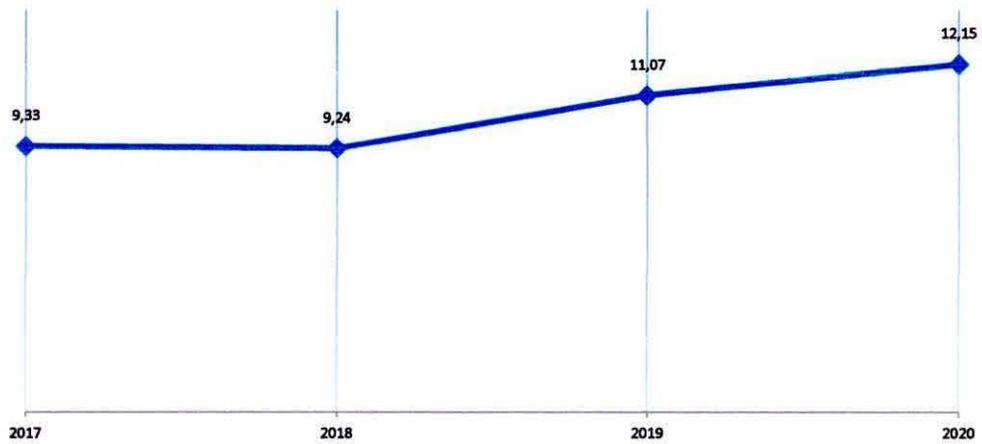
Grafik 3.22

Angka Morbiditas

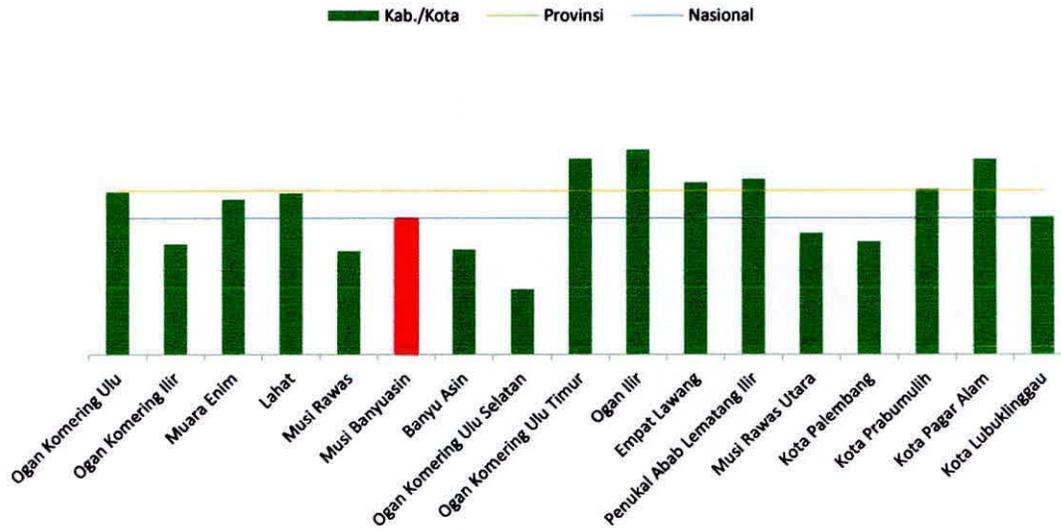
Angka Morbiditas Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2021



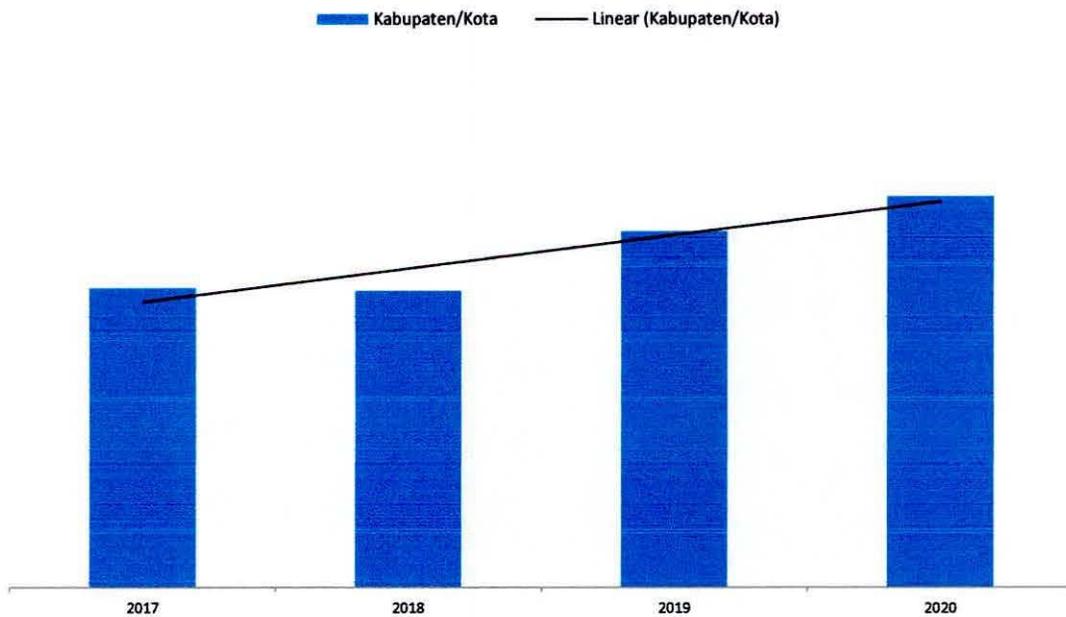
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Angka Morbiditas 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



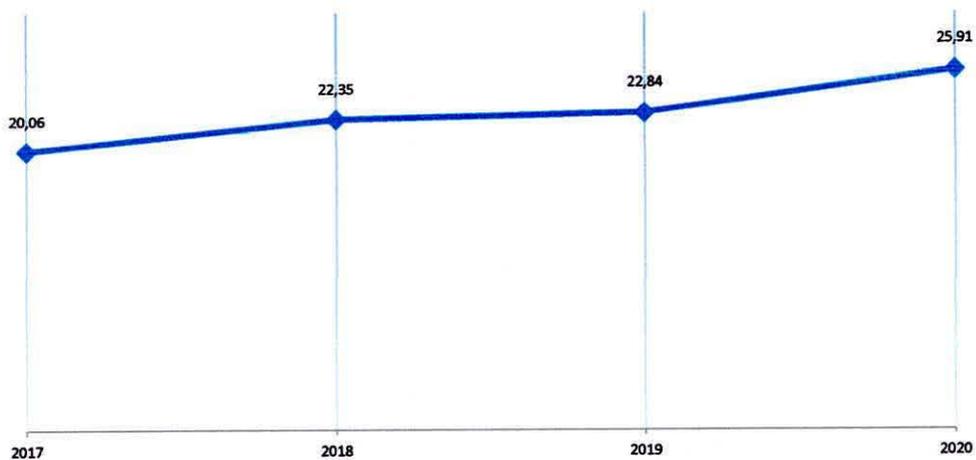
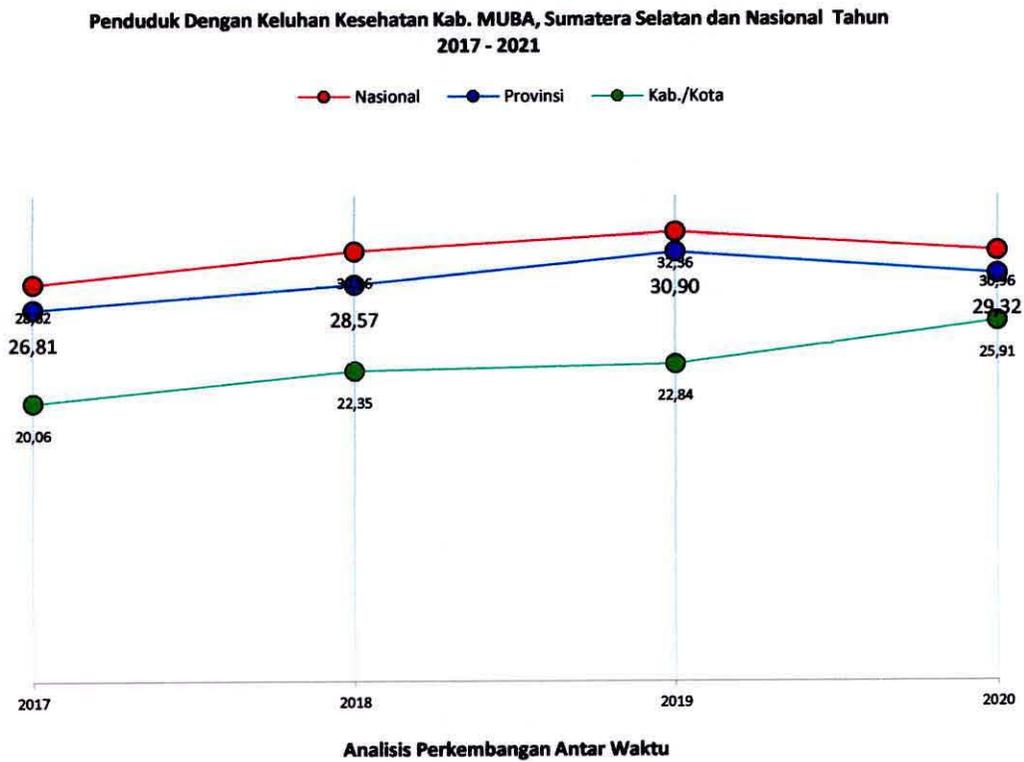
Analisis Efektivitas



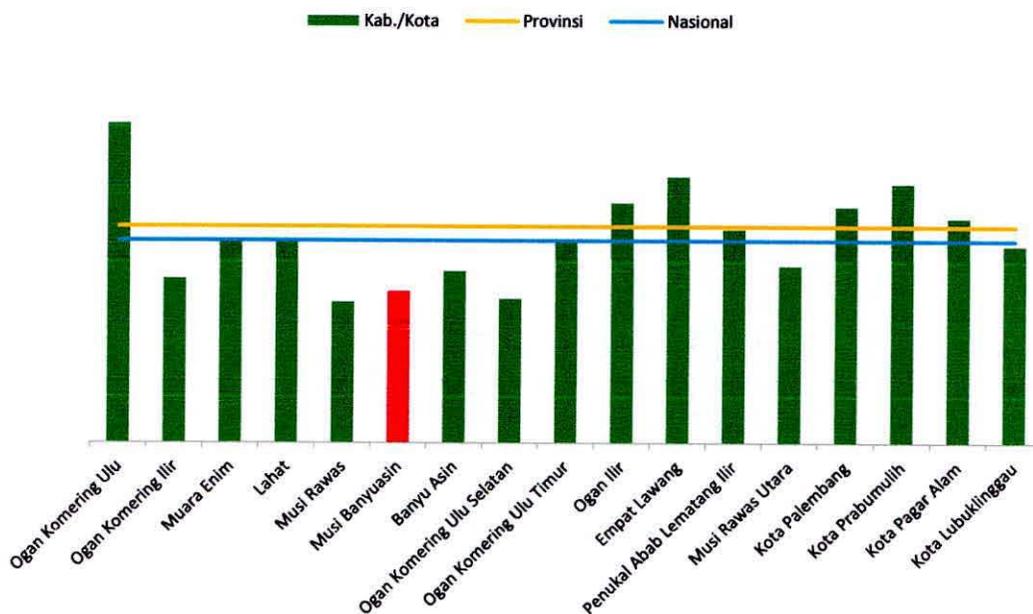
Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

3.4.2 Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan

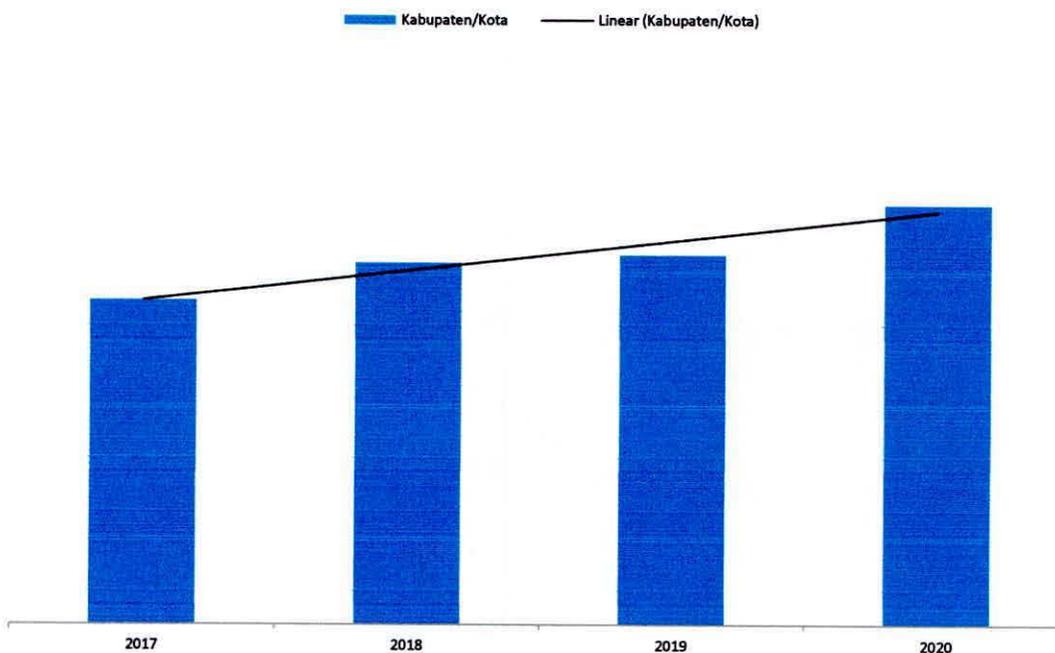
Grafik 3.23
Penduduk Dengan Keluhan Kesehatan



Penduduk dengan keluhan Kesehatan 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

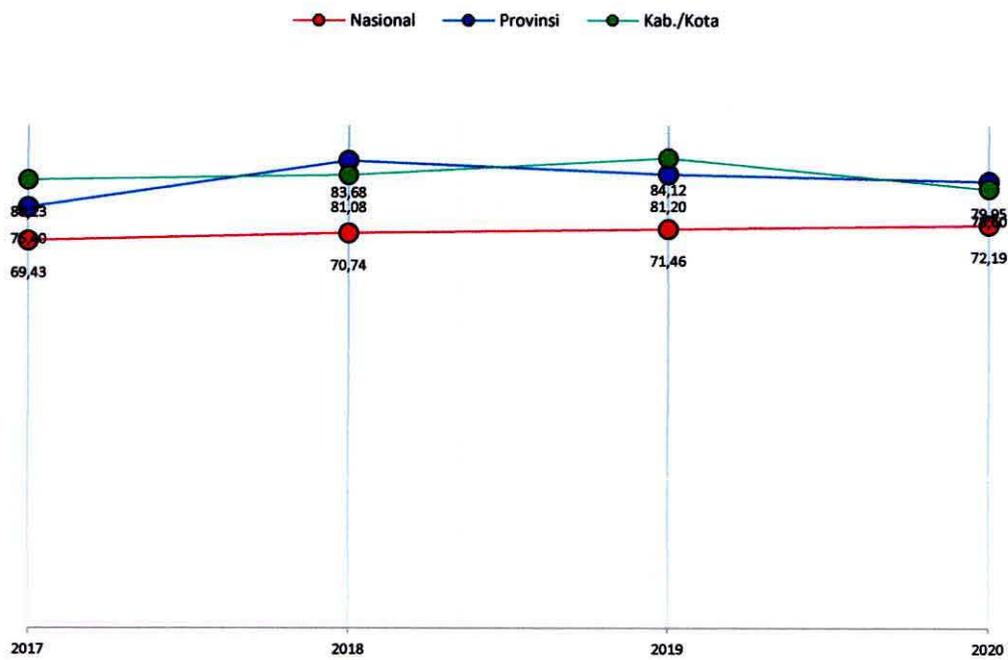


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

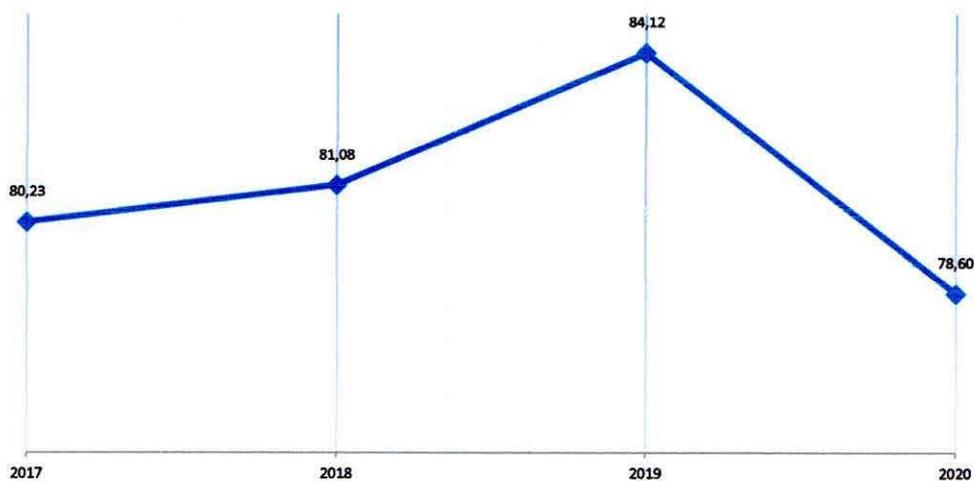
3.4.3 Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri

Grafik 3.24
Penduduk Dengan Pengobatan Sendiri

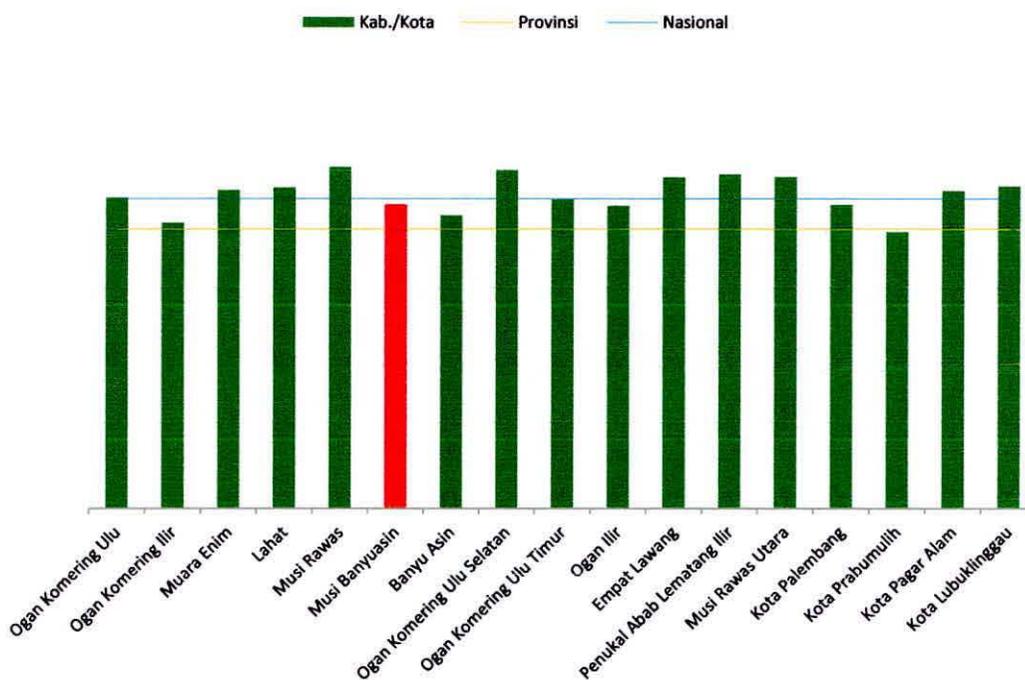
Penduduk dengan pengobatan sendiri Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2021



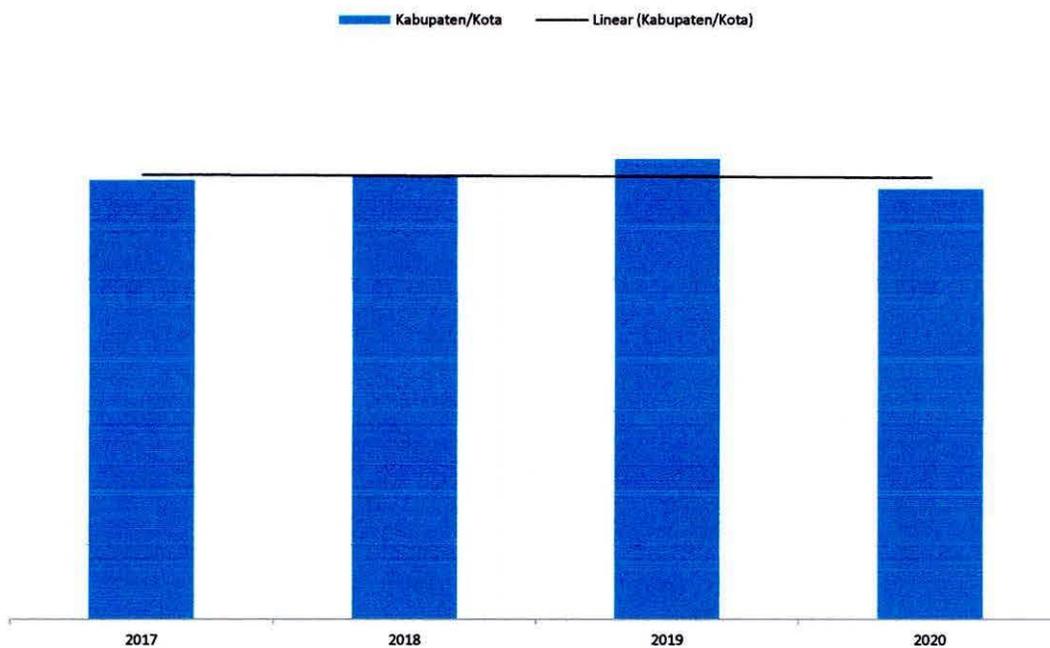
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Penduduk dengan pengobatan sendiri 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

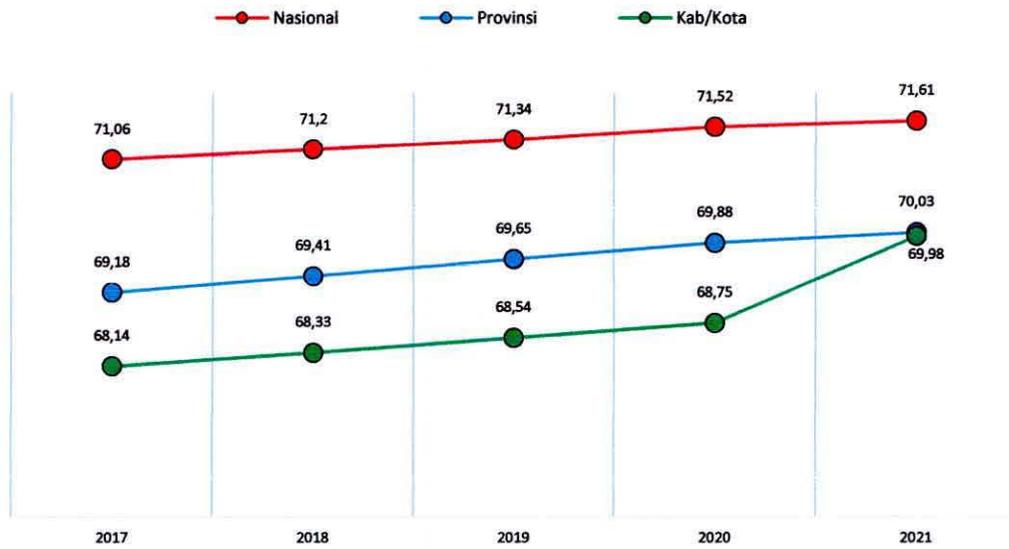


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

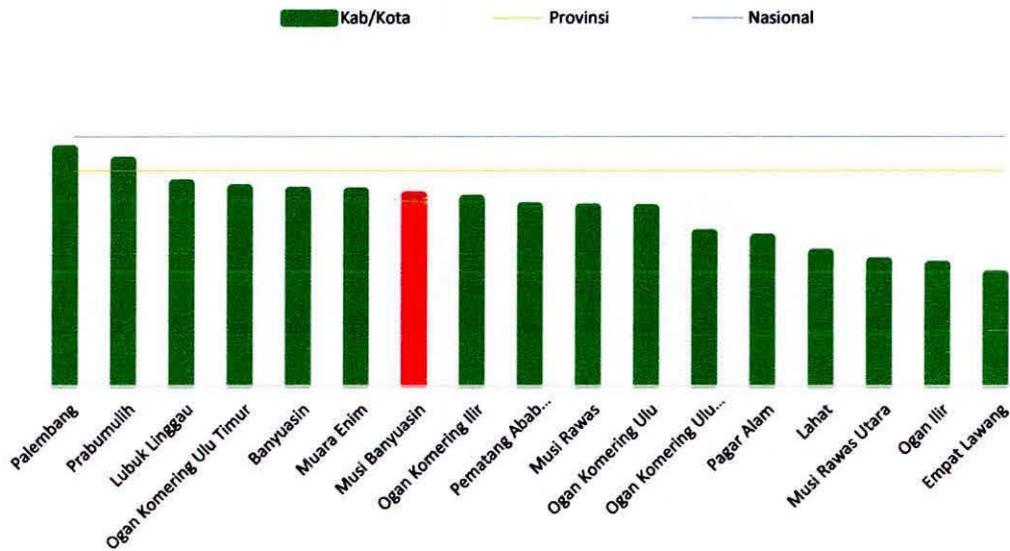
3.4.4 Angka Harapan Hidup

Grafik 3.25
Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2021



Angka Harapan Hidup 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Tabel 3.4
Hasil Analisis Bidang Kesehatan

Kabupaten Muba	Perspektif					
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Angka Morbiditas	Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 12.15	Secara Umum dari tahun 2017 – 2020 tren meningkat sejalan dengan Sumsel dan Nasional. Namun Kabupaten Musi Banyuasin masih jauh berada dibawah Sumsel dan Nasional.	Pada tahun 2020 Kabupaten Musi Banyuasin berada dibawah Provinsi dan Nasional meskipun ada peningkatan	Secara umum tren Kabupaten Musi Banyuasin beriringan dengan Sumsel dan Nasional. Namun MUSI BANYUASIN tetap masih berada dibawah Sumsel dan Nasional	peningkatan tiap tahunnya harus dapat di stop oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dengan berbagai upaya
	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan	Pada Tahun 2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 25.91	Terjadi peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2017-2020 dan meningkat cukup tajam ditahun 2020	Meskipun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tren masih berada dibawah Provinsi dan Nasional	Sejak tahun 2017-2019 tren selalu beriringan antara kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan Nasional, sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan di Provinsi dan Nasional sedangkan kabupaten Musi Banyuasin terjadi kenaikan	Perlu upaya untuk menurunkan tingkat penduduk yang menderita keluhan kesehatan di kabupaten Musi Banyuasin
	Penduduk dengan	Pada Tahun	Secara umum tren	Pada tahun 2020 terjadi	Tren kabupaten	Upaya penurunan

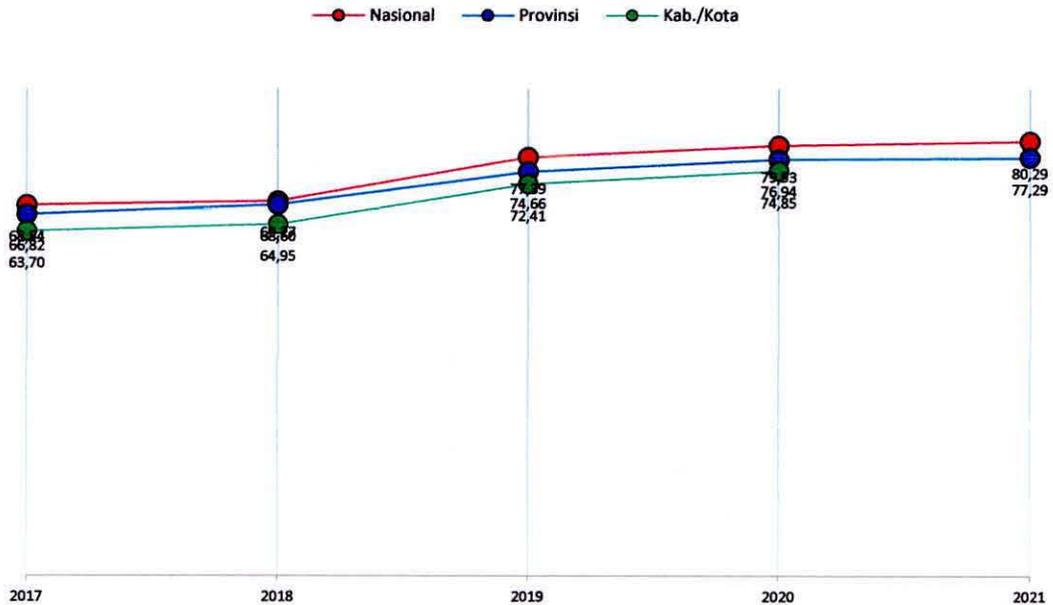
keluhan kesehatan dengan Pengobatan Sendiri	2020 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 78.60	meningkat setiap tahunnya namun terjadi penurunan pada tahun 2020	penurunan, diindikasikan dikarenakan banyaknya pasien covid-19 yang melonjak	Musi Banyuasin selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan tidak beriringan dengan Provinsi dan Nasional.	penduduk yang memiliki masalah kesehatan perlu dilakukan agar menekan penduduk yang melakukan pengobatan sendiri.
Angka Harapan Hidup	Pada Tahun 2021 capaian Kabupaten Musi Banyuasin 69.98	Tiap tahunnya terjadi peningkatan angka harapan hidup, dan meningkat tajam ditahun 2021	Pada tahun 2021 terjadi peningkatan tajam namun masih dibawah angka Provinsi dan Nasional	Tren kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya selalu beriringan dengan tren Provinsi dan Nasional. Namun, untuk tahun 2021 laju penambahan angka kabupaten Musi Banyuasin lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional.	Kabupaten Musi Banyuasin sudah menunjukkan capaian yang baik

3.5. Bidang Kawasan Permukiman

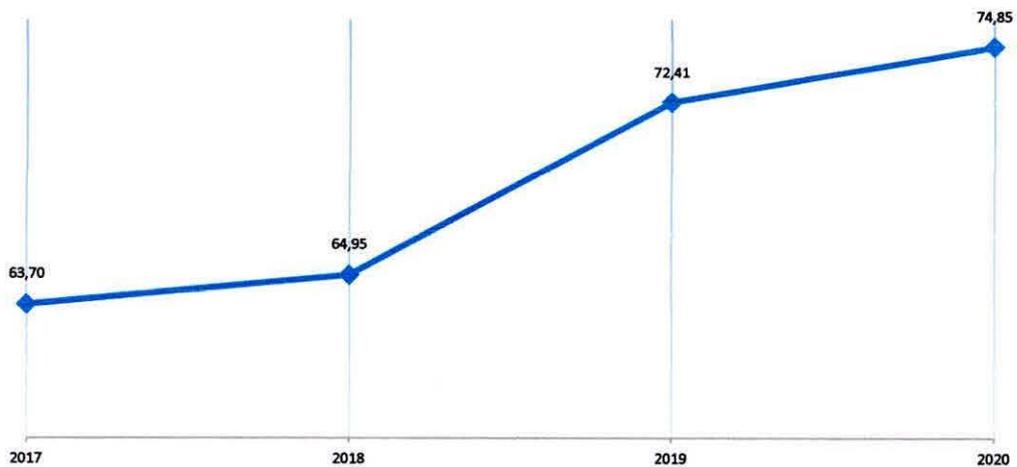
3.5.1 Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Grafik 3.26
Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

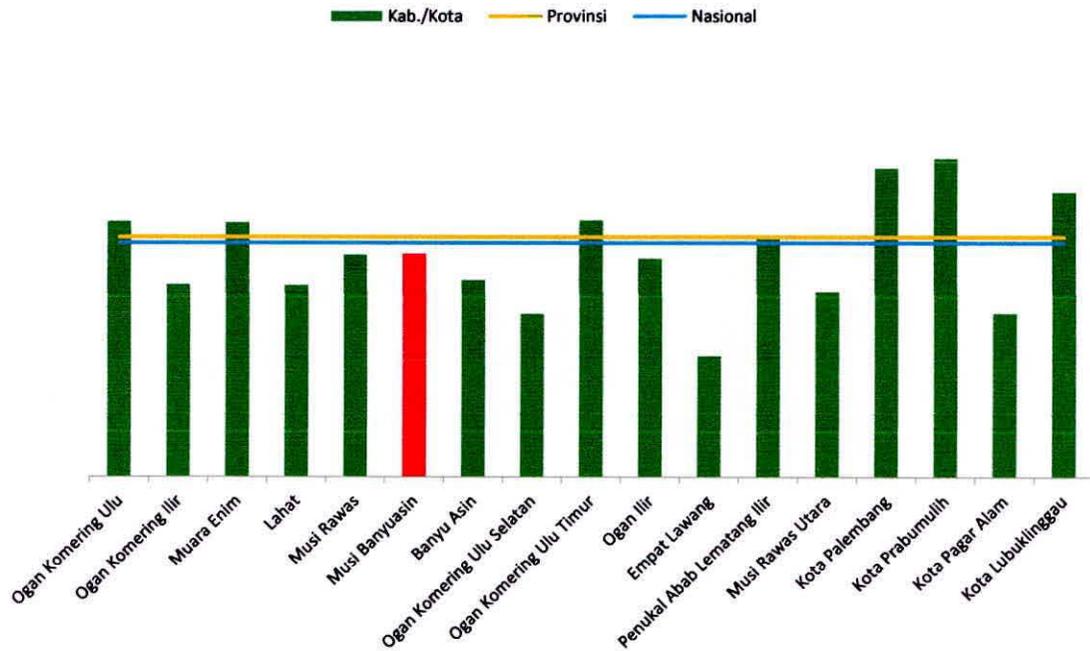
Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2017 - 2021



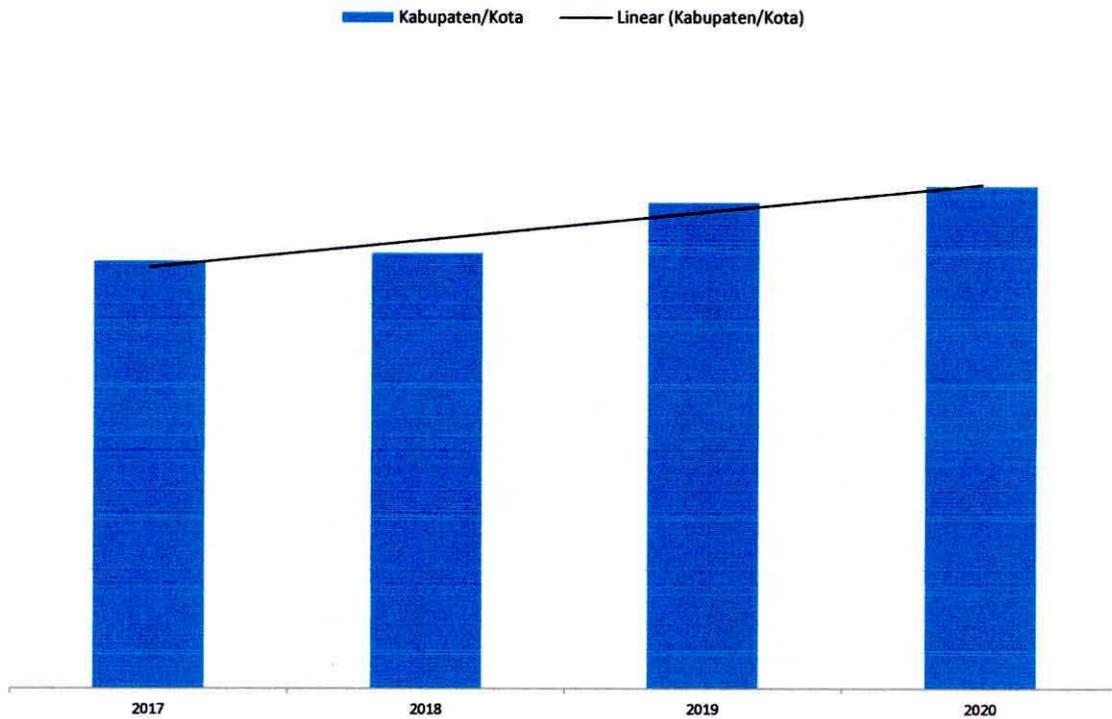
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

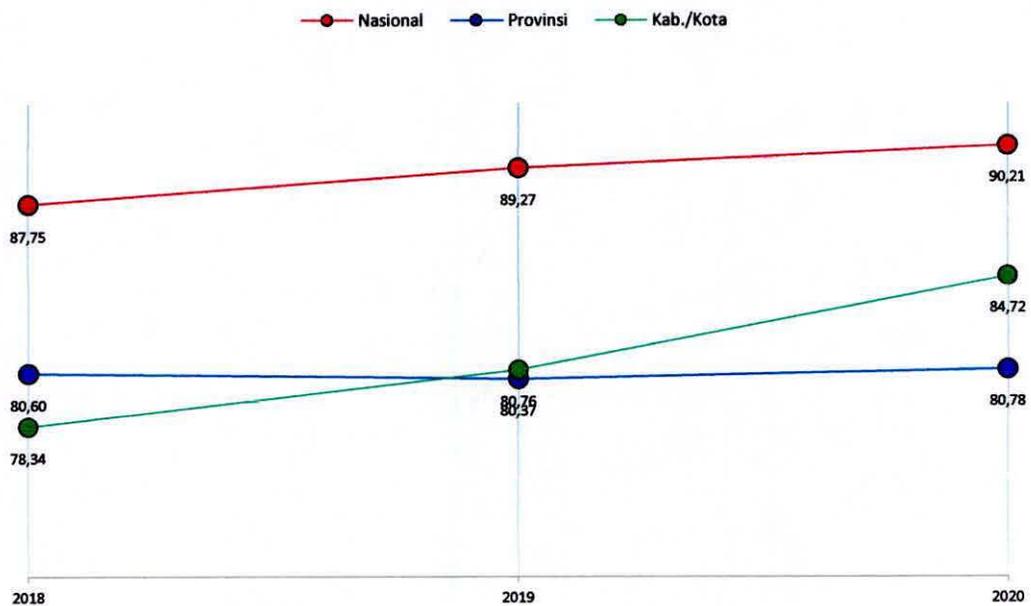


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

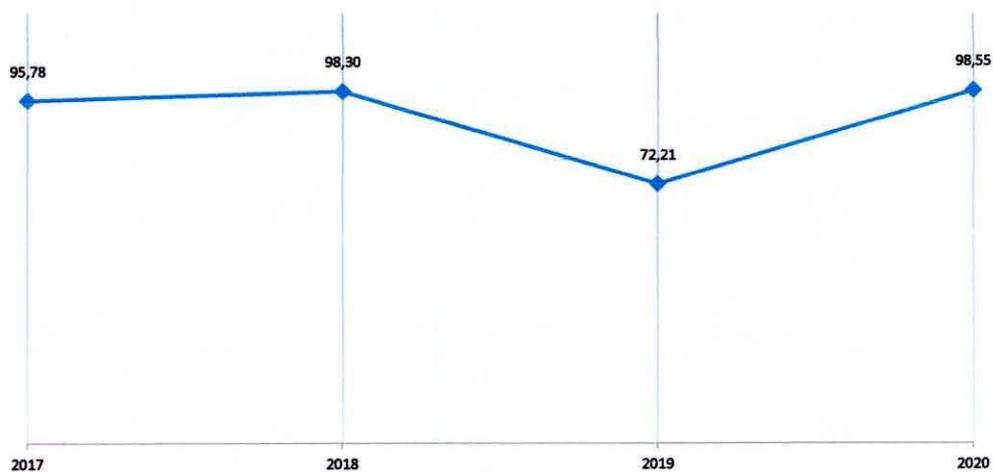
3.5.2 Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Grafik 3.27
Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

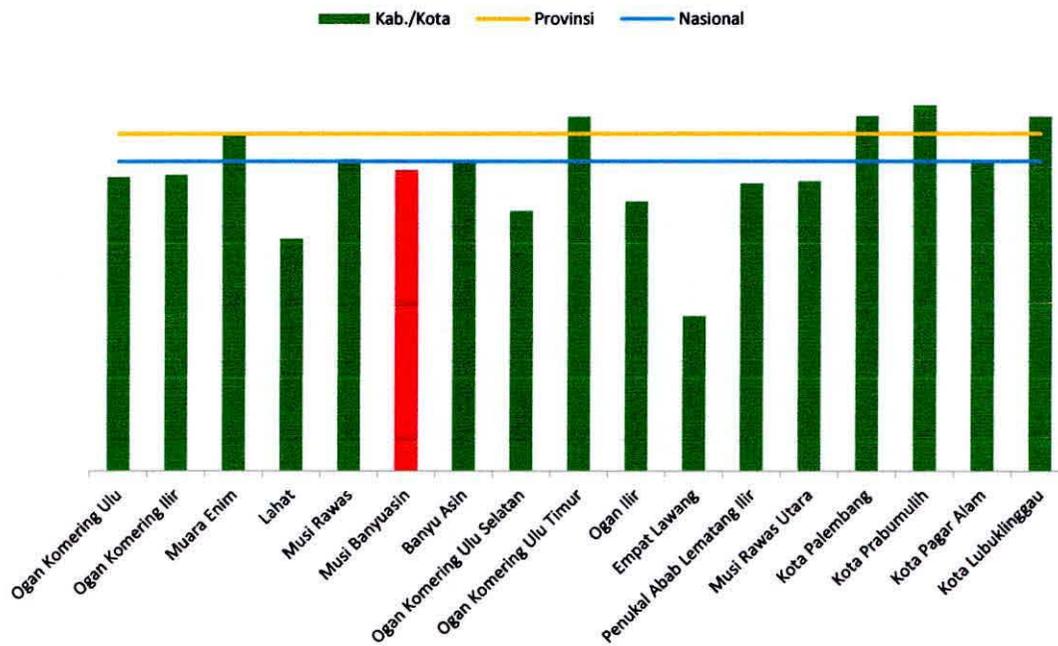
Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 - 2021



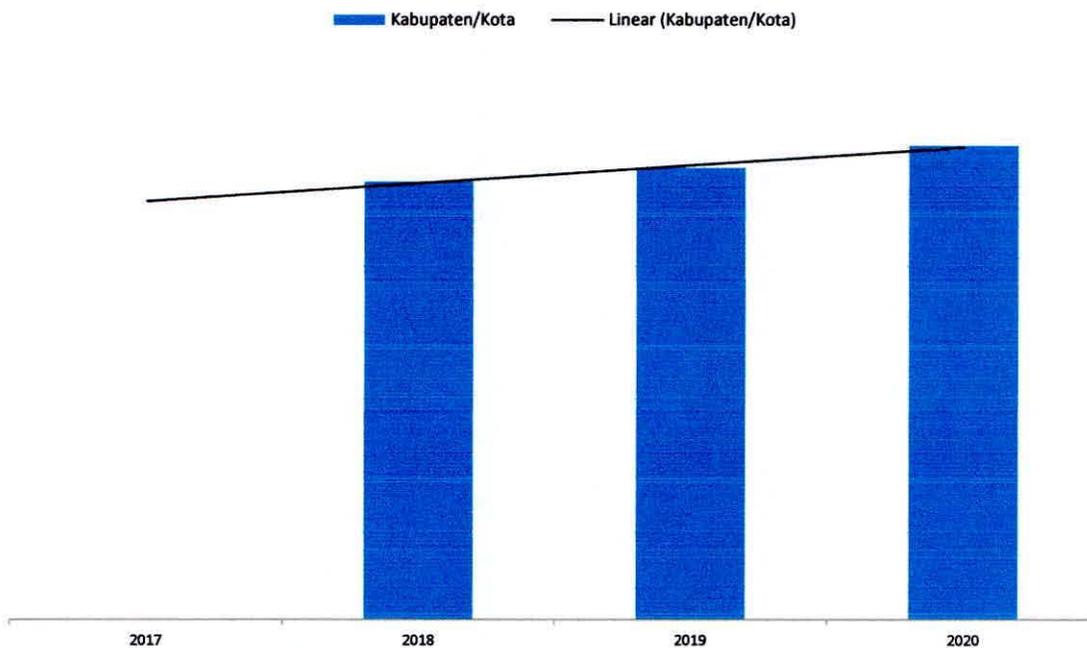
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Rumah Tangga Dengan air minum Layak 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas

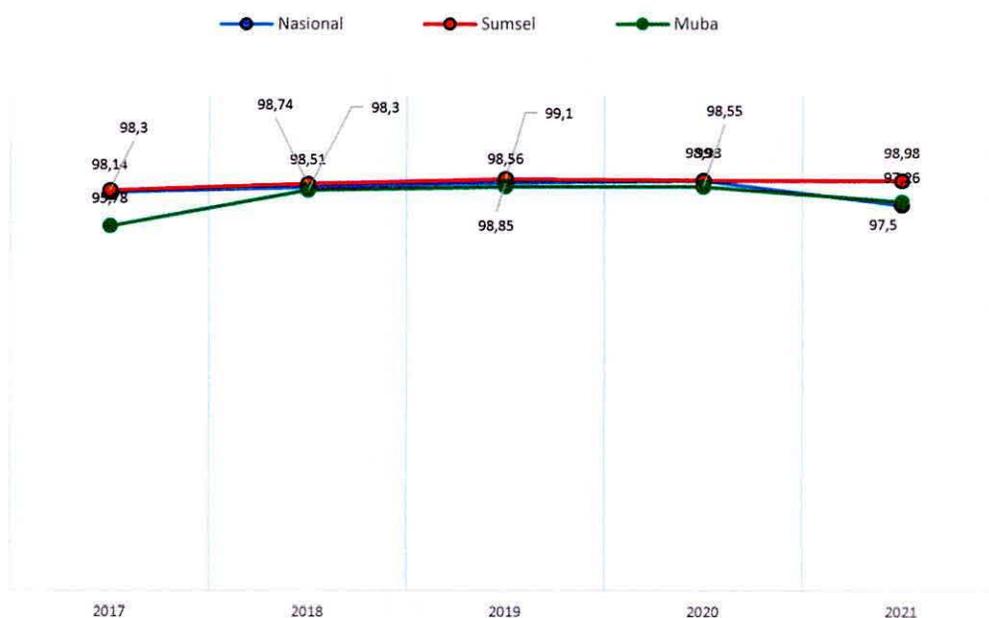


Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

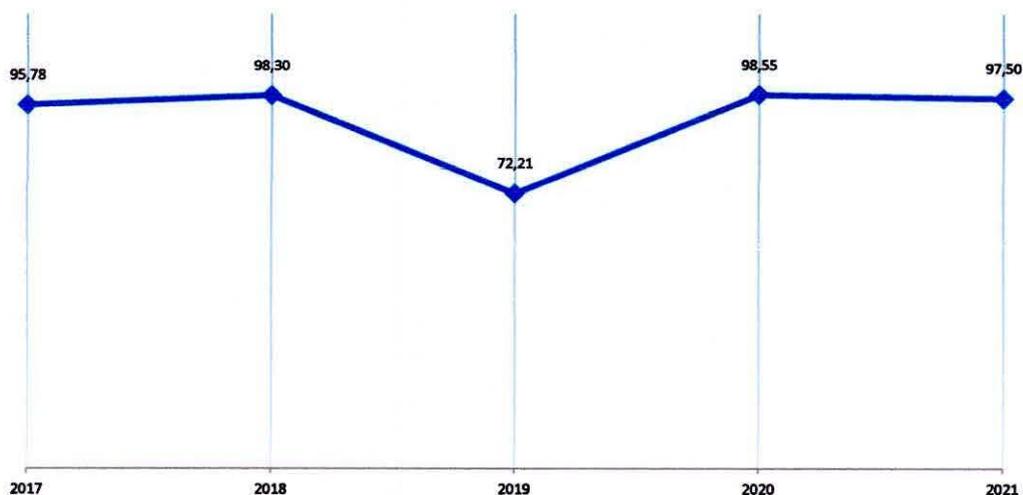
3.5.3 Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Grafik 3.28
Rumah Tangga dengan Akses Listrik

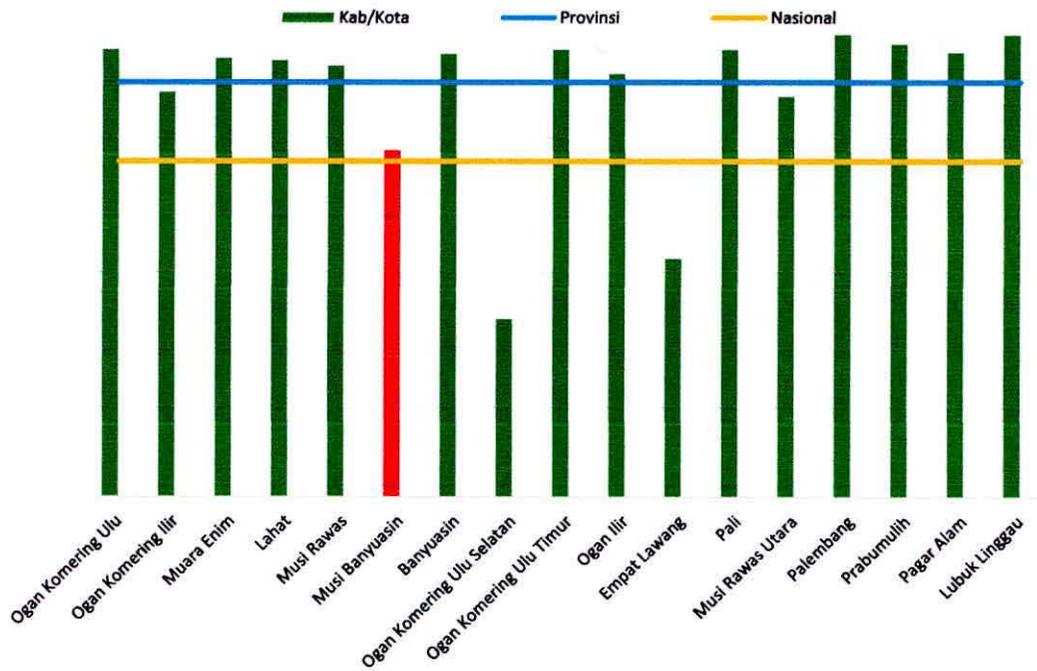
Rumah Tangga Dengan Akses Listrik Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 - 2020



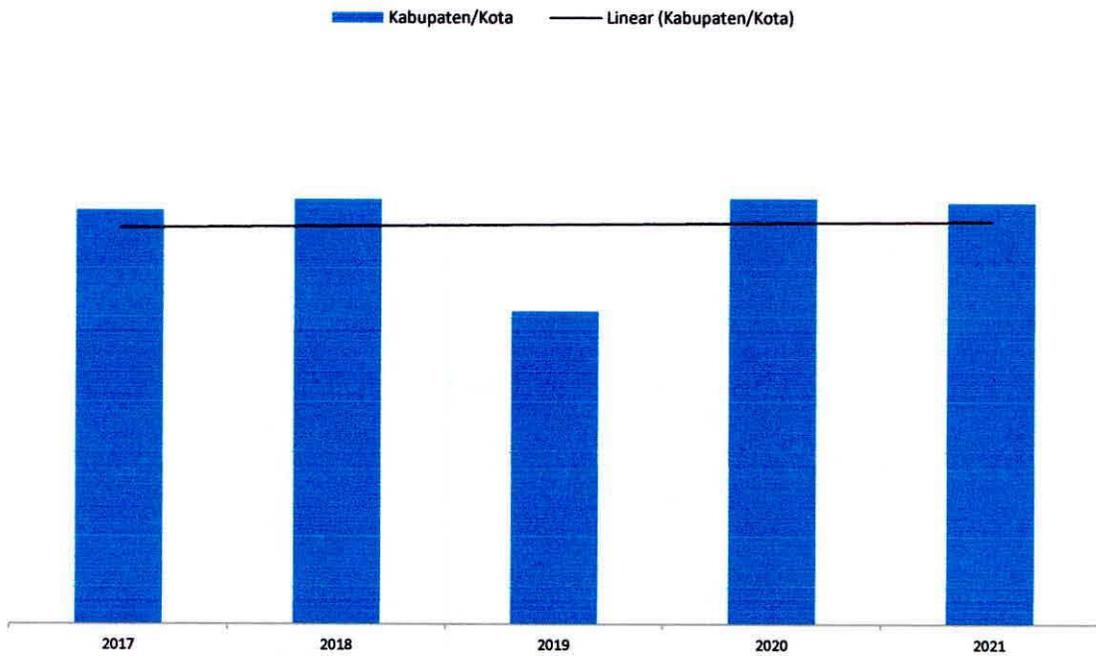
Analisis Perkembangan Antar Waktu



Rumah Tangga dengan Akses Listrik 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Analisis Efektivitas



Sumber : BPS dan TNP2K, diolah

Tabel 3.5
Hasil Analisis Bidang Kawasan Permukiman

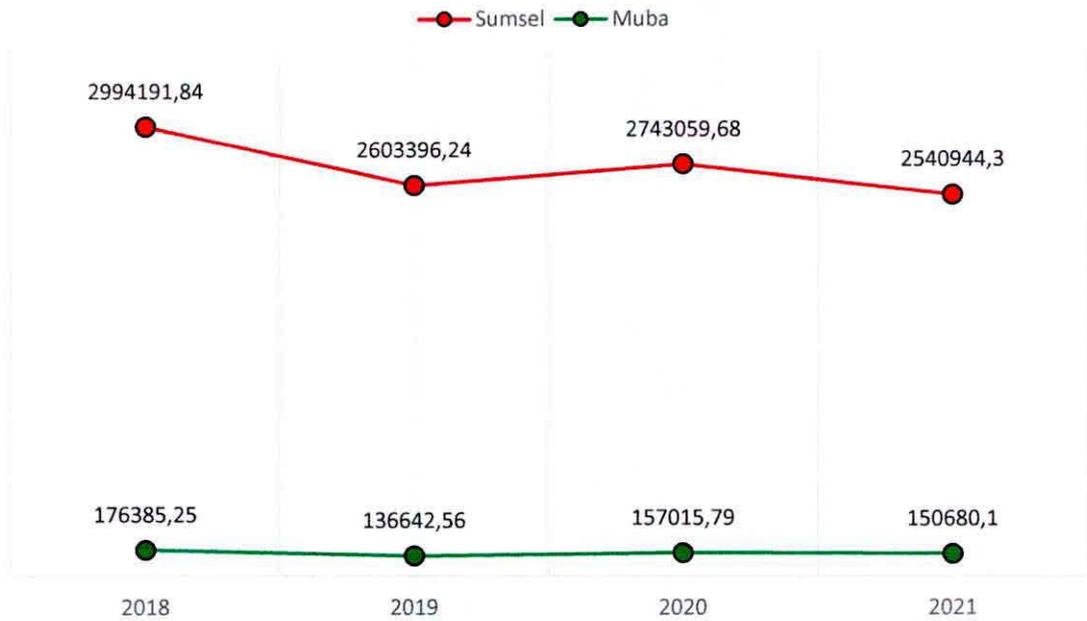
Kabupaten Muba		Perspektif				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah sebesar 74,85%	Tiap tahunnya terjadi peningkatan sejalan dengan Provinsi dan Nasional.	Terjadi peningkatan pada tahun 2020 meskipun masih berada dibawah garis Nasional dan Provinsi.	Sejak tahun 2017-2020 tren selalu beriringan antara kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi dan Nasional	Kabupaten Musi Banyuasin telah berusaha untuk selalu meningkatkan jumlah Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak
	Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah sebesar 84,72%	Tiap tahunnya terjadi peningkatan berlawanan dengan Provinsi yang selalu mengalami penurunan.	Terjadi peningkatan pada tahun 2020 meskipun masih berada dibawah garis Nasional namun berhasil menyalip Provinsi.	Tren kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya selalu beriringan dengan tren Provinsi dan Nasional. Namun, untuk tahun 2020 laju penambahan angka kabupaten Musi Banyuasin lebih tinggi dari Provinsi	Kabupaten Musi Banyuasin telah berusaha untuk selalu meningkatkan jumlah Rumah Tangga dengan air minum Layak
	Rumah Tangga dengan Akses Listrik	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah sebesar 97,5%	Secara garis besar grafik kabupaten Musi Banyuasin membentuk seperti parabola yang meningkat dan	Terjadi penurunan pada tahun 2020 begitupula pada Provinsi berbanding terbalik	Tren kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya selalu beriringan dengan tren	Perlu diperhatikan lebih lanjut terkait penurunan pada tahun 2020.

			menurun dari tahun 2017-2020.	dengan Nasional yang cenderung stabil.	Provinsi dan Nasional. Namun, untuk tahun laju pertumbuhan kabupaten Musi Banyuasin lebih lambat dibanding Provinsi dan Nasional.	
--	--	--	-------------------------------	--	---	--

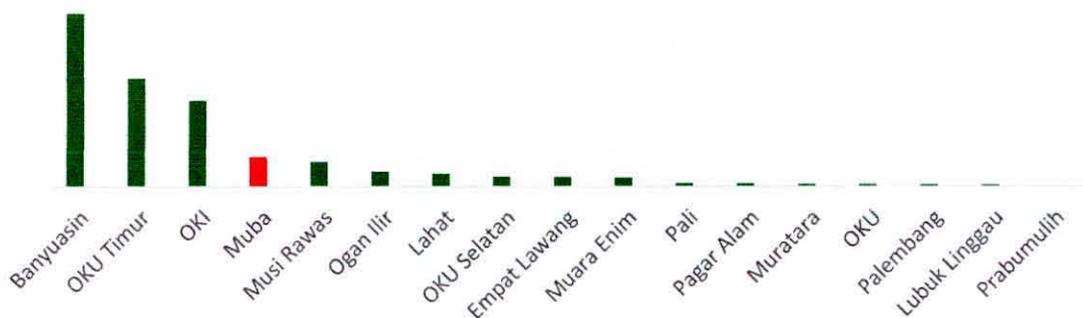
3.6. Bidang Ketahanan Pangan
3.6.1 Produksi Padi

Grafik 3.29
Produksi Padi

Produksi Padi Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 - 2021



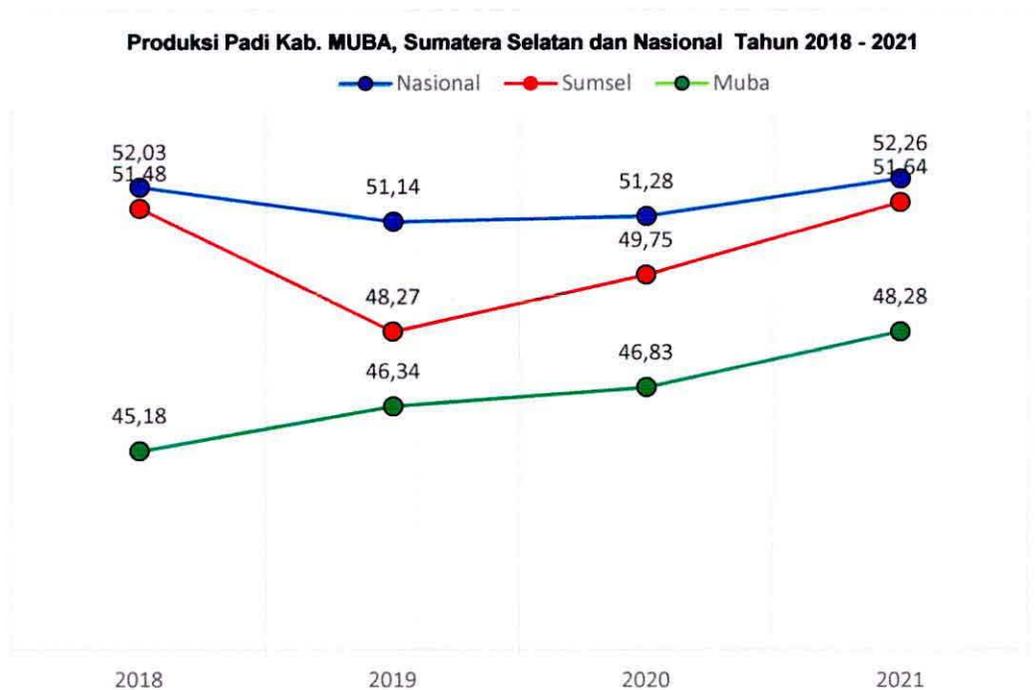
Produksi Padi 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



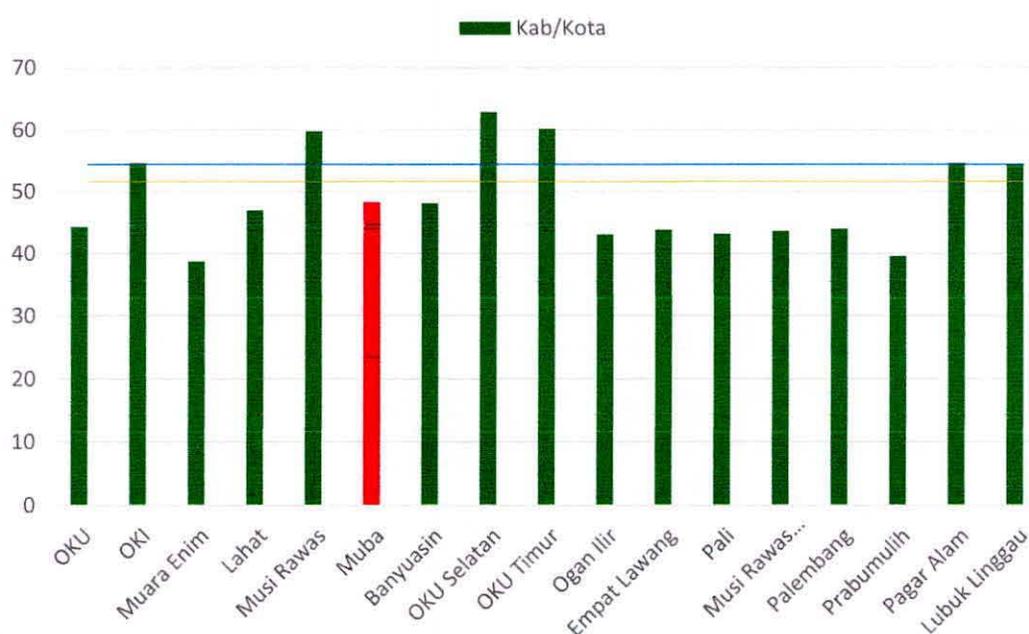
Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin

3.6.2 Produktivitas Padi

Grafik 3.29
Produktivitas Padi



Produktivitas Padi 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin

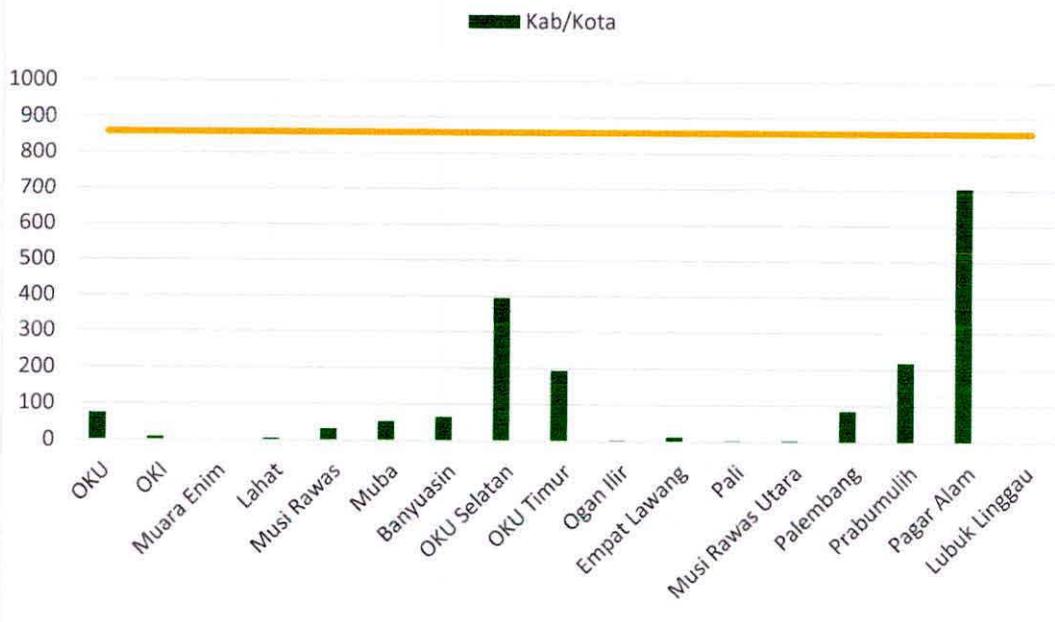
3.6.3 Produksi Jagung

Grafik 3.30
Produksi Jagung

Produksi Jagung Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 - 2019



Produksi Jagung 17 Kab/Kota dan Sumsel Tahun 2019

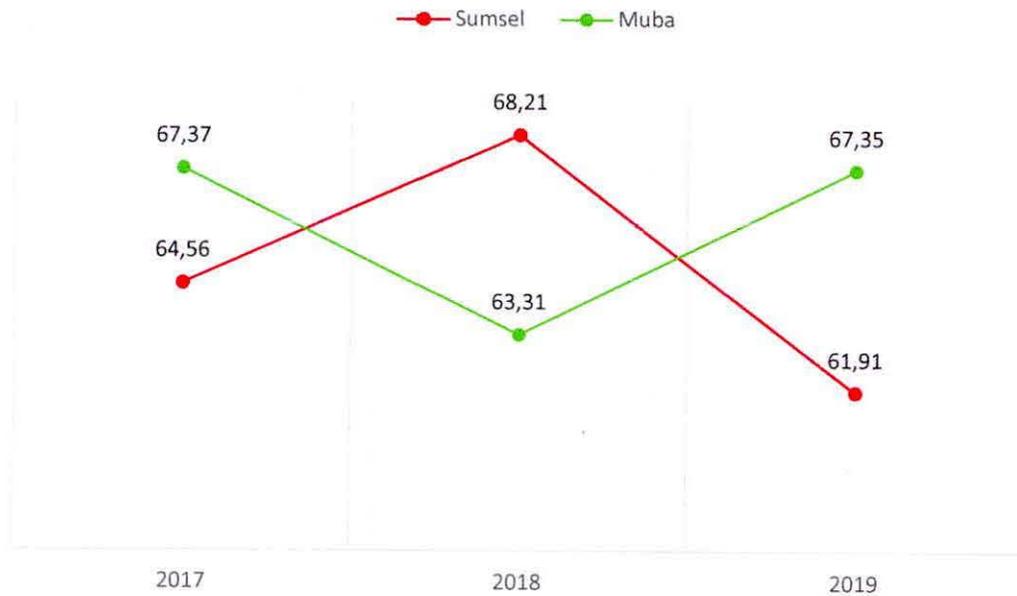


Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin

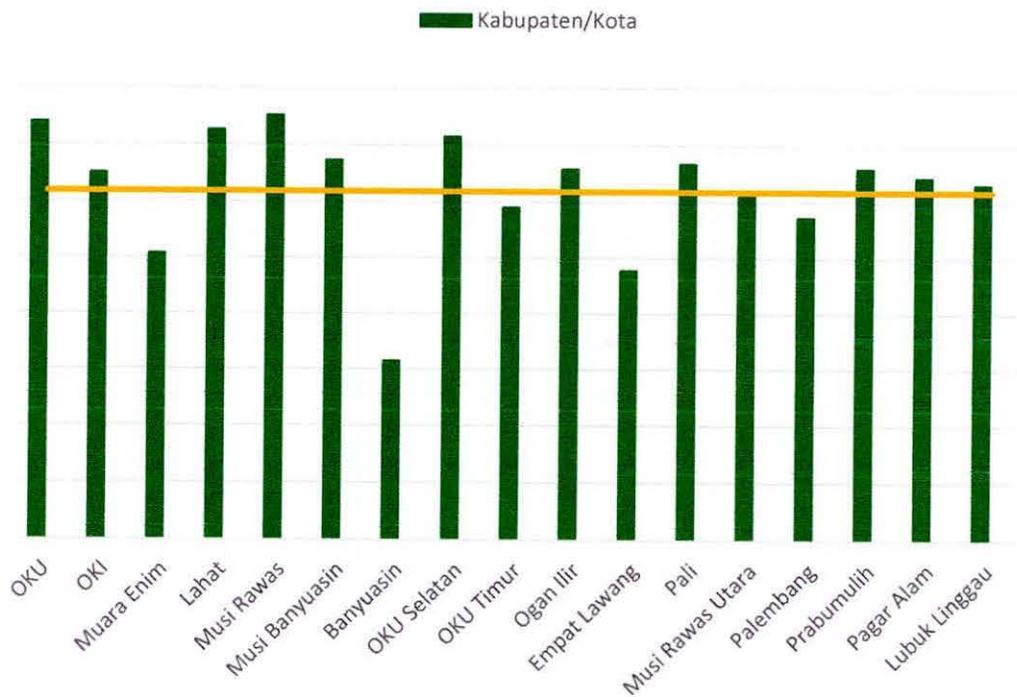
3.6.4 Produktivitas Jagung

Grafik 3.32
Produktivitas Jagung

Produktivitas Jagung Kab. MUBA, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018 - 2020



Produktivitas Padi 17 Kab/Kota, Sumatera Selatan, dan Nasional tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 3.6
Hasil Analisis Bidang Ketahanan Pangan

Kabupaten Muba		Perspektif				
	Posisi Relatif	Perkembangan Antar Waktu	Efektivitas	Relevansi	Keterangan	
Indikator	Produksi Padi	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah sebesar 150680.1	Setiap tahunnya terjadi perubahan turun maupun naik	Meskipun masih dibawah Provinsi, baik Provinsi maupun kabupaten Musi Banyuasin mengalami penurunan pada tahun 2021	Setiap tahunnya grafik kabupaten Musi Banyuasin beriringan dengan grafik Provinsi.	Perlu ditindaklanjuti terkait penurunan produksi pada tahun 2021
	Produktivitas Padi	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2020 adalah sebesar 48,28%	Selalu terjadi peningkatan tiap tahunnya dan meningkat Musi paling besar tahun 2020	Produktivitas padi kabupaten Musi Banyuasin selalu meningkat dibanding Provinsi atau Nasional yang pernah mengalami penurunan pada tahun 2018	Setiap tahunnya grafik muba, Provinsi, dan Nasional berbeda beda, pada tahun 2018 kabupaten Musi Banyuasin meningkat sedangkan yang lain menurun.	Perlu dipertahankan peningkatan tiap tahunnya.
	Produksi Jagung	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 adalah sebesar 52531	Tiap tahunnya grafik produksi jagung kabupaten Musi Banyuasin selalu berfluktuasi.	Grafik produksi jagung selalu berada dibawah Provinsi	Tren kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya selalu beriringan dengan tren	Perlu dipertahankan peningkatan tahun terakhir.

					Provinsi dan Nasional.	
Produktivitas Jagung	Capaian kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 adalah sebesar 67,35%	Tiap tahunnya berbeda, dan menurun tajam tahun 2018	Selama 2017 grafik selalu diatas Provinsi lalu menurun pada tahun 2018 dan kembali naik pada 2019	Tren kabupaten Musi Banyuasin tiap tahunnya selalu bertolak belakang dengan tren Provinsi dan Nasional.,	Perlu dipertahankan peningkatan tahun terakhir.	

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Pada bab IV tersaji informasi yang berisikan Prioritas Intervensi (teori perubahan dan analisis keterkaitan) dan Analisis Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Pada bab sebelumnya telah diuraikan berbagai identifikasi data dalam berbagai bidang yang terdapat pada Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang ada dan perlu diselesaikan. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut dilakukan intervensi dan disajikan ke dalam bentuk *Theory of Change (ToC)* yang terbagi menjadi 3 yakni Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar, Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin, dan Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro.

4.1 Prioritas Intervensi

4.1.1 Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar

Untuk program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar sudah mengakomodir bidang Kesehatan, Pendidikan, sosial dan infrastruktur seperti terlihat pada grafik 4.1.

Grafik 4.1
ToC Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar



Kondisi yang diharapkan dalam ToC ini agar dapat tercapainya tujuan penurunan tingkat kemiskinan dan laju Peningkatan garis kemiskinan melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin, antara lain :

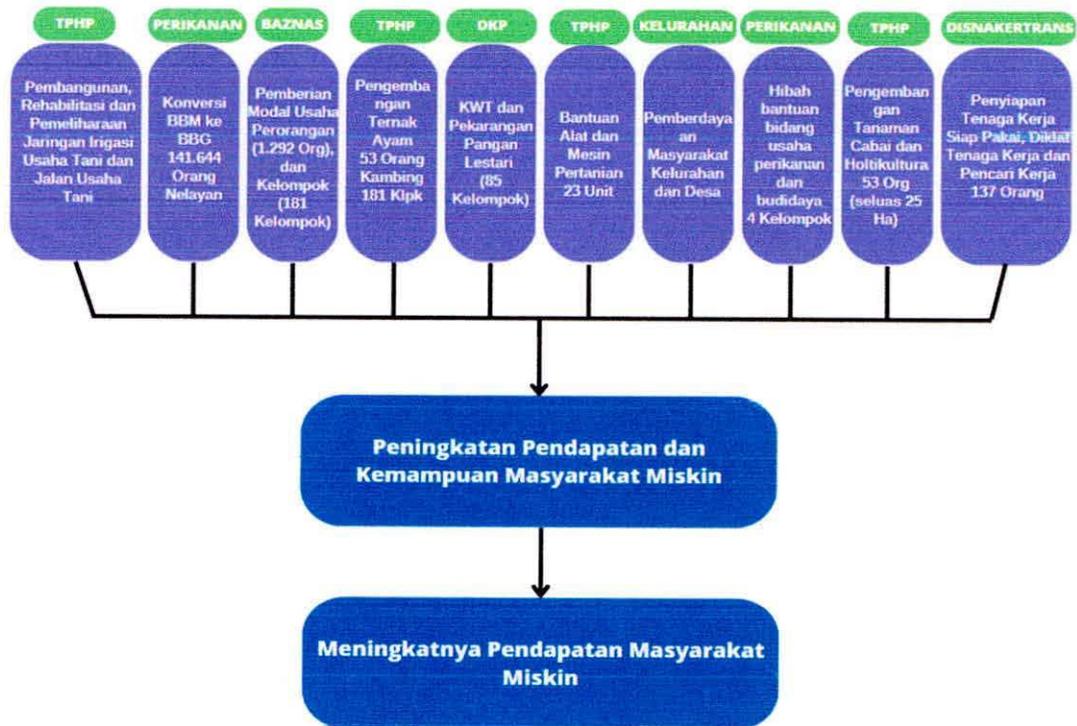
Tabel 4.1
Pemetaan Hasil ToC Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Perbaikan terhadap Akses Pelayanan Dasar

Sasaran Antara	Strategi/Program	Perangkat Daerah
Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin.	Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil , Bersalin dan Gizi Buruk Pada Anak	Dinas Kesehatan
	Bea Siswa Prestasi 409 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Santunan Kematian 141.644 Jiwa (3 Juta/Jiwa)	Dinas Sosial
	Santunan Fakir Miskin 1.400 Orang (1 juta/orang)	Badan Amil Zakat Nasional Musi Banyuasin
	UHC 587.089 Jiwa PBI APBD 266.361 (Rp. 37.800/jiwa/bulan)	Dinas Kesehatan
	Air Minum dan Sanitasi Layak (Sumur Bor 45 Unit, Jamban 1.591 Unit)	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Pasar Murah Sembako 5.645 Paket	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Sarana prasarana UEP 88 Unit (5.5Juta/orang) dan KUBE 87 Unit (20Juta/Kelompok)	Dinas Sosial
	Graduasi PKH 4.743 KPM	Dinas Sosial
	Bantuan Hukum Gratis 110 Kasus	Bagian Hukum Setda
	RTLH/Bedah Rumah/BSPS 329 Unit	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Sosial Badan Amil Zakat Nasional Musi Banyuasin
	Sembako Lanjut Usia sebanyak 350 Paket masing-masing Rp.438.000 dan Disabilitas 1.203 masing-masing Rp. 250.000/bulan selama 5 bulan.	Dinas Sosial
	Pelayanan Kependudukan (Seluruh warga Musi Banyuasin)	Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil
	BOSDA 448 SD, 108 SMP (seragam dan buku)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4.1.2 Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin

Untuk Program Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin telah mengakomodir bidang pangan dan sosial dapat dilihat pada grafik 4.2.

Grafik 4.2
ToC Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin



Agar tujuan peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat miskin dapat tercapai maka kondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC ini yaitu Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin seperti pada tabel 4.2. :

Tabel 4.2
Pemetaan hasil ToC Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin

Sasaran Antara	Strategi/Program	Perangkat Daerah
Peningkatan Pendapatan dan Kemampuan Masyarakat Miskin	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani dan Jalan Usaha Tani	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan
	Konversi BBM ke BBG 141.644 Orang Nelayan	Dinas Perikanan
	Pemberian Modal Usaha Perorangan (1.292 Org), dan Kelompok (181 Kelompok)	Baznas

Pengembangan Ternak Ayam 53 Orang Kambing 181 Kelompok	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
KWT dan Pekarangan Pangan Lestari (85 Kelompok)	Dinas Ketahanan Pangan
Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 23 Unit	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa	Kelurahan
Hibah bantuan bidang usaha perikanan dan budidaya 4 Kelompok	Dinas Perikanan
Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai, Diklat Tenaga Kerja dan Pencari Kerja 137 Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pengembangan Tanaman Cabai dan Holtikultura 53 Orang (seluas 25 Ha)	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan

4.1.3 Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro

Untuk program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro telah mengakomodir bidang ekonomi seperti yang terlihat pada grafik 4.3.

Grafik 4.3
ToC Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro



Agar tujuan Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro dapat tercapai maka kondisi yang harus dilakukan dan akan dicapai dalam ToC yang dapat dilihat pada table 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Pemetaan ToC Program Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro

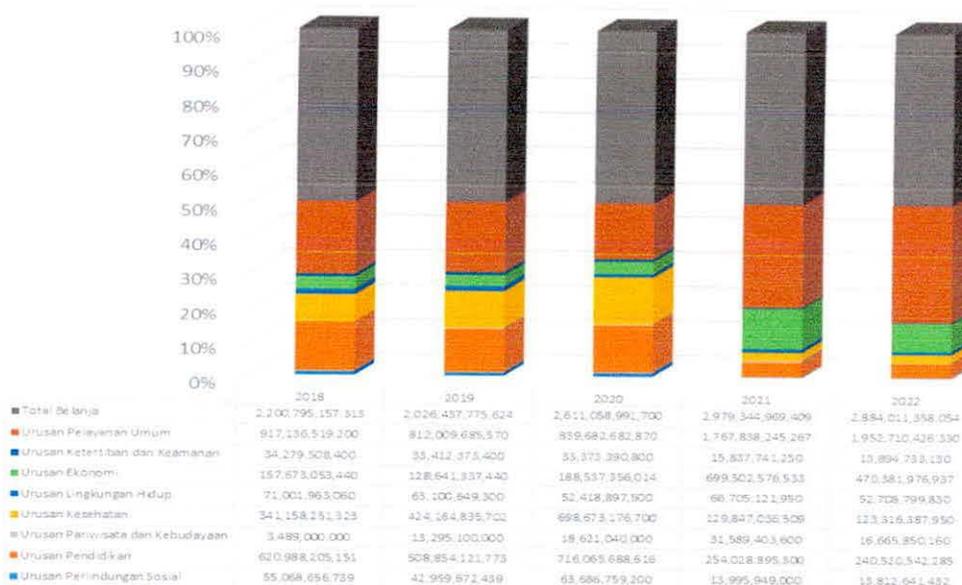
Sasaran Antara	Strategi/Program	Perangkat Daerah
Pengembangan Dan Penjaminan Keberlanjutan Usaha Kecil Dan Mikro	Pendampingan dan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) 1250 UMK	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Pengembangan Industri Kecil/Menengah untuk Komoditi Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Pengembangan Usaha Mikro (Bantuan Hibah Peralatan Produksi Usaha Mikro (22 UKM) dan Hibah Uang 39 Orang)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	Banpres Produktif Usaha Mikro (7.787 UMKM) @1.2 Jt/UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

4.2 Analisis Struktur APBD

Analisis APBD berisi penjelasan tentang komposisi APBD berdasarkan pendapatan dan belanja dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya perlu penjelasan tentang sumber pendapatan daerah, bagaimana perkembangan derajat otonomi fiskal dan ruang fiskal daerah.

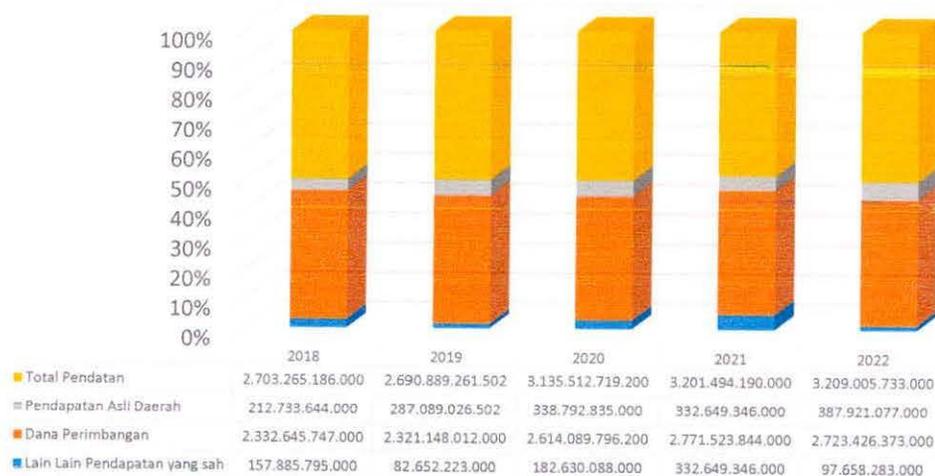
Dari sisi pendapatan daerah akan dijelaskan komposisi belanja langsung dan tidak langsung, untuk melihat apakah selama ini daerah telah membelanjakan anggaran sesuai dengan masalah dan prioritas intervensi pada setiap bidang. Setelah menjelaskan komposisi APBD akan dijelaskan sejauh mana relevansi dan efektivitas APBD terhadap kondisi kemiskinan daerah.

Grafik 4.4
Tren APBD Kabupaten Musi Banyuasin Per-Urusan Tahun 2018-2022



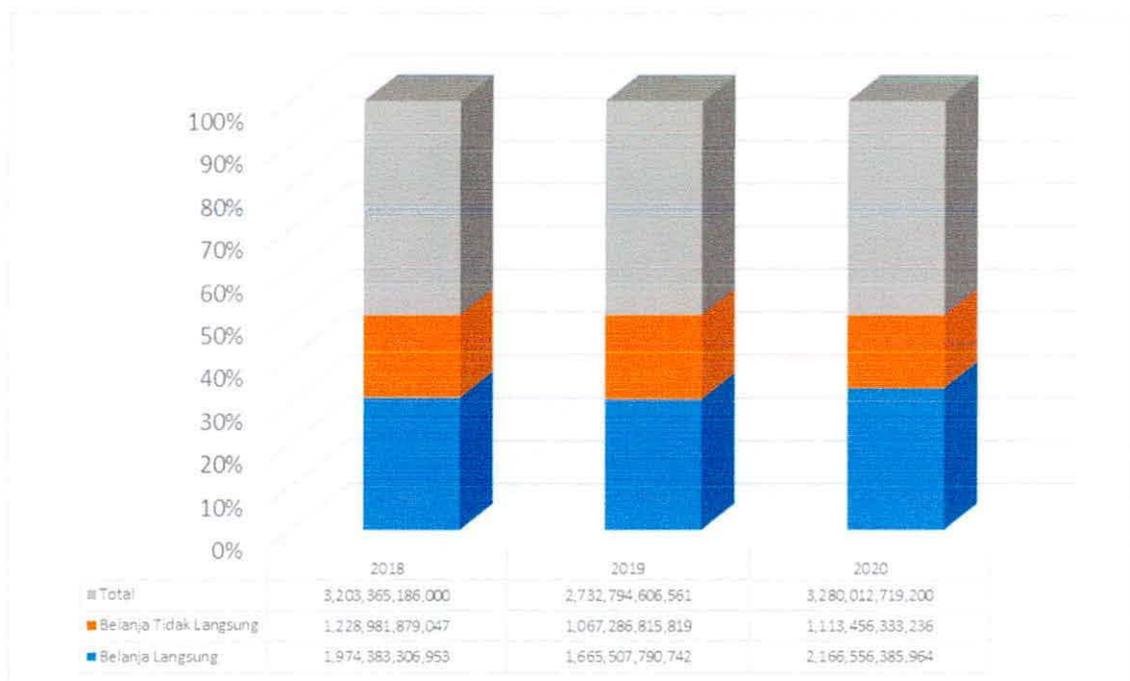
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun 2018-2022, secara umum tren APBD Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2,2 Triliun pada tahun 2018 menjadi 2,9 Triliun pada tahun 2021, namun menurun pada tahun 2022 menjadi 2,8 Triliun (Gambar 4.7). Penurunan ini dipengaruhi akibat berkurangnya Pendapatan Daerah dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi dan pendapatan lain-lain yang sah. Dengan berkurangnya pendapatan daerah tentunya akan mempengaruhi belanja daerah yang juga berkurang.

Grafik 4.5
Tren Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin



Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tertinggi masih bersumber dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan Kabupaten Musi Banyuasin yang tren nya terus mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2022. Dana Perimbangan setiap tahunnya selalu diatas 80% penyumbang pendapatan pada pos pendapatan APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2022 bagian Dana Perimbangan pada APBD tahun 2022 sebesar 85%, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 12% dan Lain-Lain Pendapatan yang sah sebesar 3% terendah.

Grafik 4.6
Tren Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020

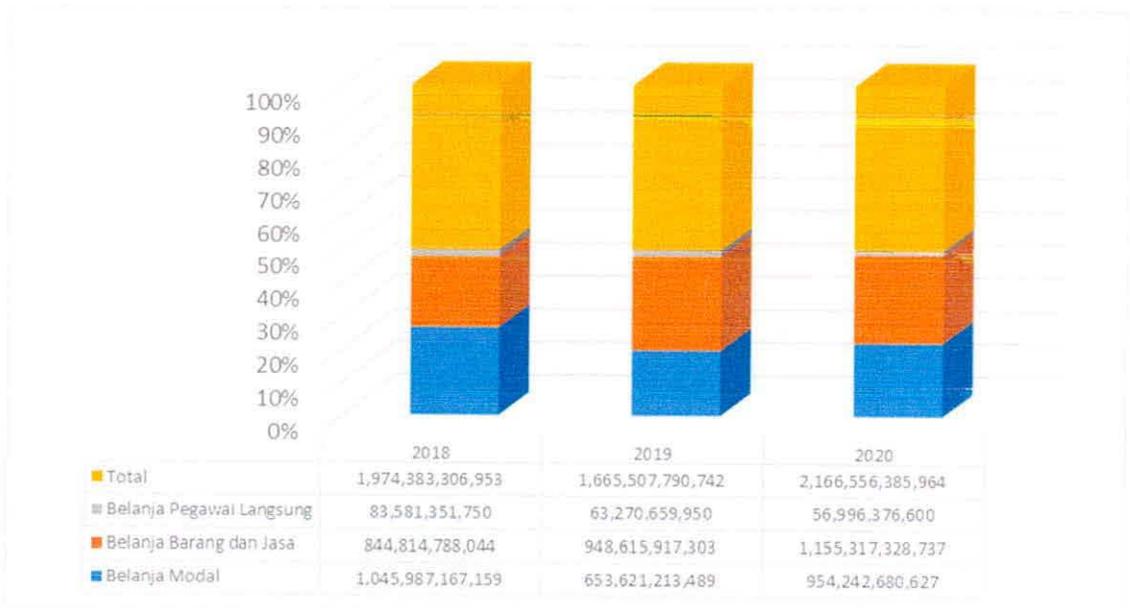


Tren Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Belanja Daerah meningkat sangat signifikan terjadi pada tahun 2019 – 2020, namun pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020, Komposisi Belanja Daerah Belanja Tidak Langsung sebesar 33,94% dan Belanja Langsung sebesar 66,06%

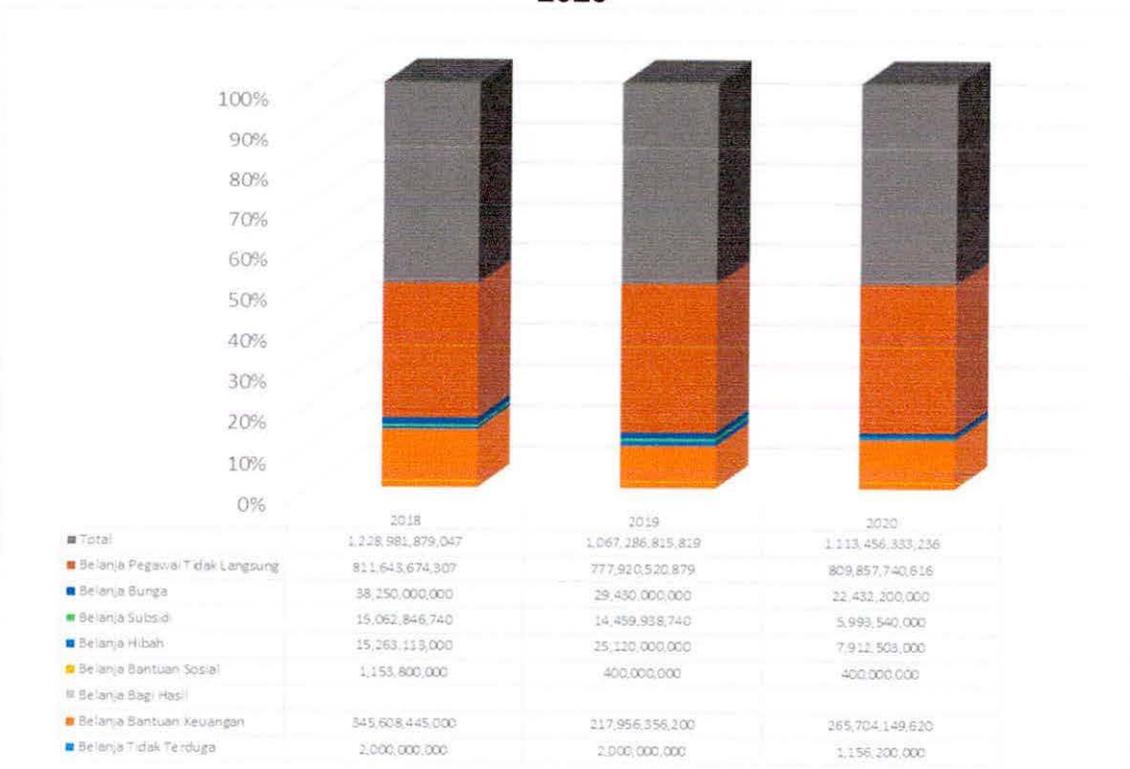
Pada Belanja Langsung (BL) untuk Belanja Modal memiliki persentase yang terbesar dari tahun 2018 – 2019, namun pada tahun 2020 telah bergeser pada Belanja Barang dan Jasa (Gambar 4.10). Sedangkan pada Belanja Tidak Langsung (BTL) yang memiliki share terbesar tentunya Belanja Pegawai. Namun

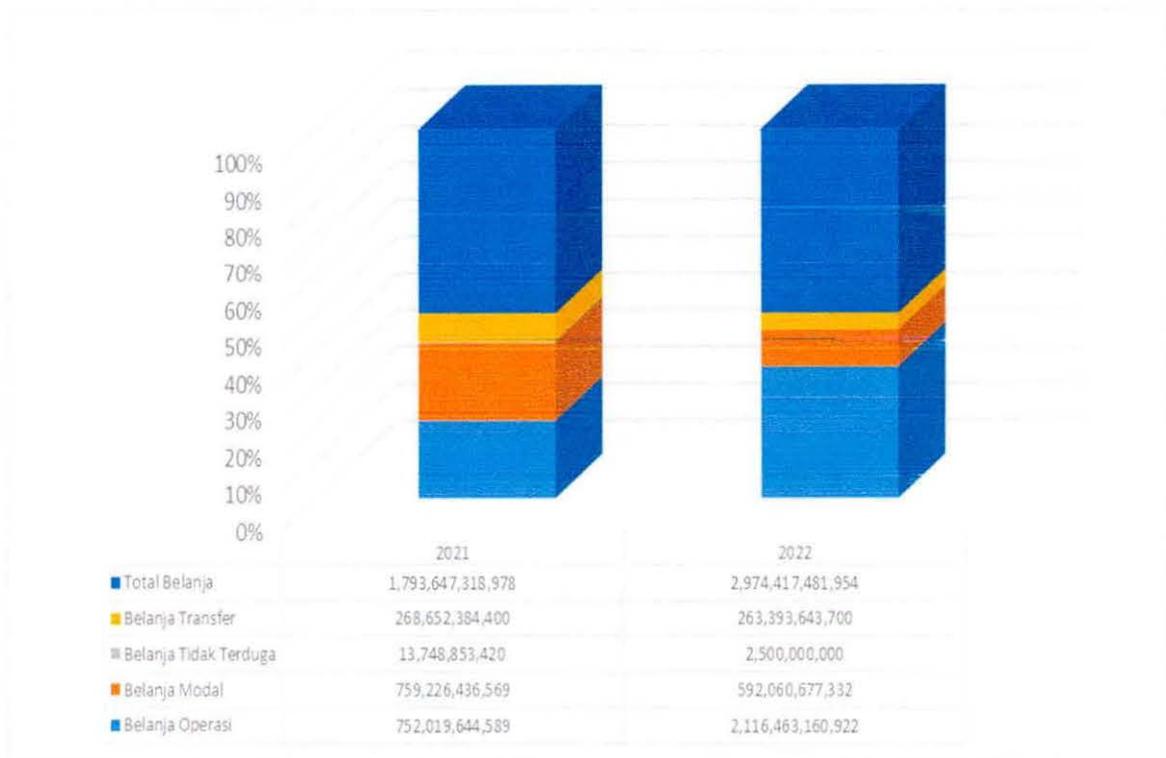
trennya share Belanja Pegawai setiap tahunnya mengalami penurunan dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa terjadi sebaliknya. Namun pada tahun 2020 Belanja tersebut berkurang dan sebaliknya Bantuan Hibah mengalami peningkatan

Grafik 4.7
Tren Belanja Langsung Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020



Grafik 4.8
Tren Belanja Tidak Langsung Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2020





4.3 Isu Strategis Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin

Isu strategis Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPD tahun 2023-2026 yaitu:

1. Belum optimalnya pendekatan integratif untuk penanggulangan kemiskinan daerah sehingga program – program dan penanganan kemiskinan yang diupayakan belum dapat dapat mendorong akselerasi dan efektifitas penurunan jumlah penduduk miskin, antara lain melalui pendekatan pembangunan kewilayahan dan fokus pada pemberdayaan masyarakat;
2. Belum adanya keterpaduan antar Perangkat Daerah dalam Upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan indikator capaian yang terukur;
3. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum fokus, masih ego sektoral dan belum terpadu;
4. Daya beli masyarakat yang rendah dikarenakan menurunnya harga komoditi pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber utama penghasilan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

5. Tingkat pengangguran terbuka yang relatif masih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk terus mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menciptakan tenaga kerja terampil, sesuai tuntutan kebutuhan pasar, (termasuk update skill dan wawasan pengajar).

Berdasarkan analisa pengolahan data, analisa ToC yang ada disetiap Perangkat Daerah terkait serta analisa anggaran pada beberapa perangkat daerah yang terkait, telah dirangkum menjadi sebuah isu strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah terbagi beberapa Dimensi/Bidang yang tertuang pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Isu Strategis

No.	Bidang	Isu Strategis
1.	Konsumsi	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Pengurangan Beban Kebutuhan Dasar Masyarakat yang didukung dengan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok, Peningkatan Jumlah Bantuan Sosial dan Pemuktahiran Data Penerima Sasaran
2.	Ketenagakerjaan	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kompetensi SDM yang didukung oleh infrastruktur berkualitas, penumbuhan wirausaha baru, Kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga kerja
3.	Pendidikan	Peningkatan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas melalui Peningkatan ketersediaan dan distribusi tenaga pendidik dan sarana prasarana sekolah yang didukung dengan memprioritaskan layanan bagi anak kurang mampu
4.	Kesehatan	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan peningkatan mutu dan akses pelayanan Kesehatan (SDM Kesehatan dan sarana prasarana)
5.	Infrastruktur Dasar	Peningkatan kawasan permukiman yang baik dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas permukiman, akses layanan air bersih
6.	Ketahanan Pangan	Pemantapan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Peningkatan ketersediaan pangan, luasan lahan pertanian dan non pertanian serta produksi ternak dan telur yang didukung dengan pengendalian harga pangan strategis, optimalisasi cadangan pangan, Peningkatan benih dan pupuk dan ternak betina yang produktif

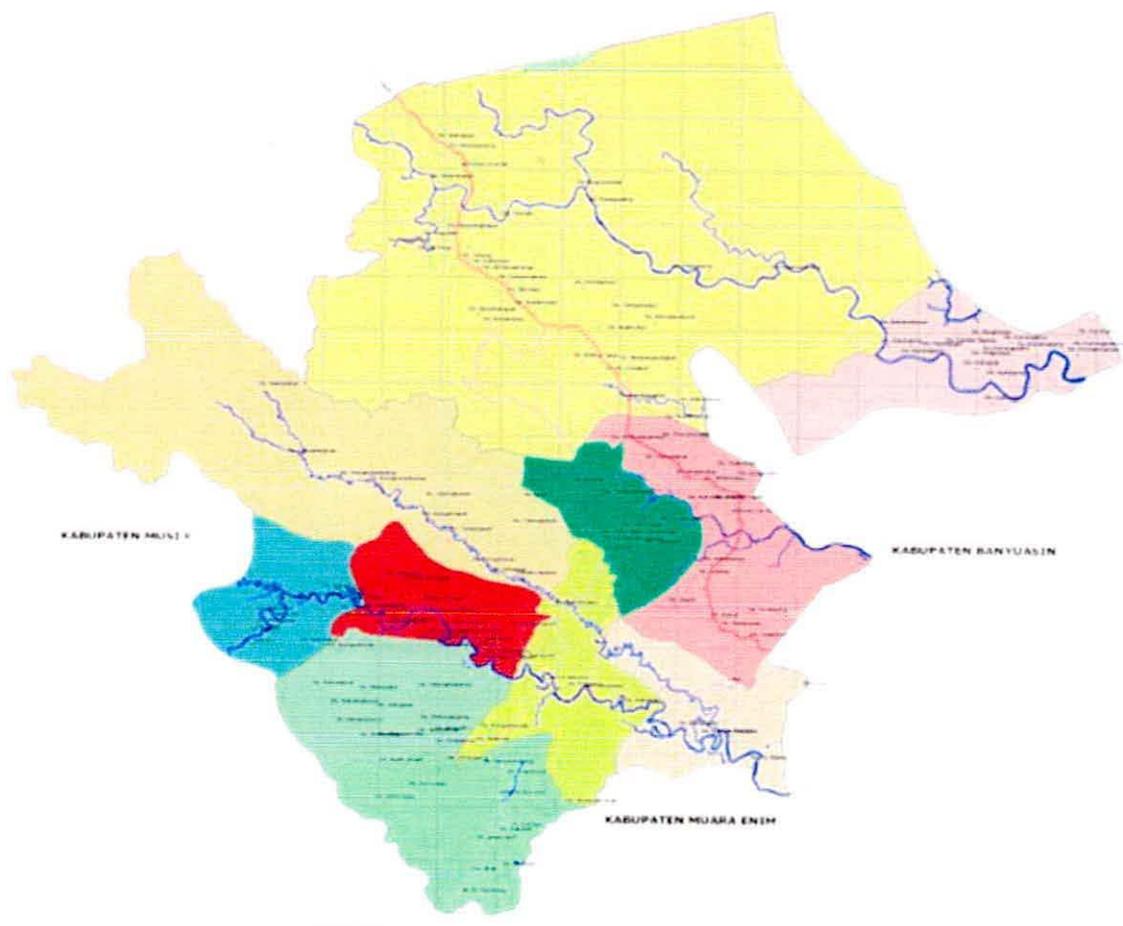
BAB V

PRIORITAS WILAYAH

Pada BAB V memuat prioritas wilayah untuk mengintervensi atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada *Theory of Change (ToC)* masing-masing bidang pada bab sebelumnya. Analisis prioritas wilayah didapatkan berdasarkan akses masyarakat terhadap prakondisi yang dirasa memiliki pengaruh terhadap tujuan dimaksud kedalam sebuah peta.

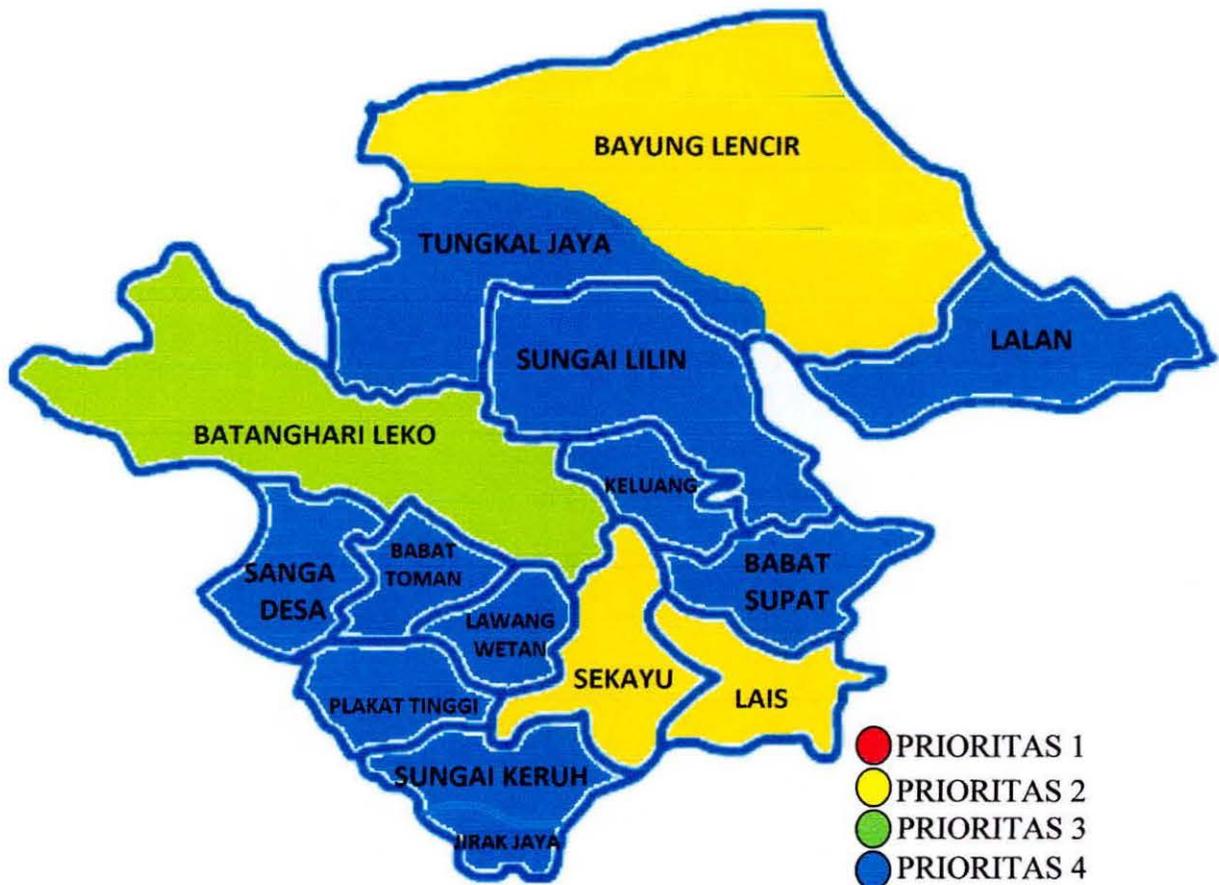
Dari peta ini, dapat dilihat wilayah Kabupaten/Kota mana yang capaian kedua indikatornya relatif buruk dibandingkan dengan capaian Provinsi sehingga harus menjadi wilayah yang diprioritaskan.

Gambar 5.1
Peta Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin



5.1 Akses ke Energi Listrik

Gambar 5.2
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Energi Listrik



Berdasarkan analisis wilayah seperti yang tertuang dipeta diatas, Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin sudah memiliki akses yang baik ke energi listrik, namun masih ada 3 kecamatan yang masuk kedalam prioritas ke 3. Tiga kecamatan itu adalah kecamatan Sekayu, kecamatan Bayung Lencir dan kecamatan Lais.

5.2 Akses Ke Pasar

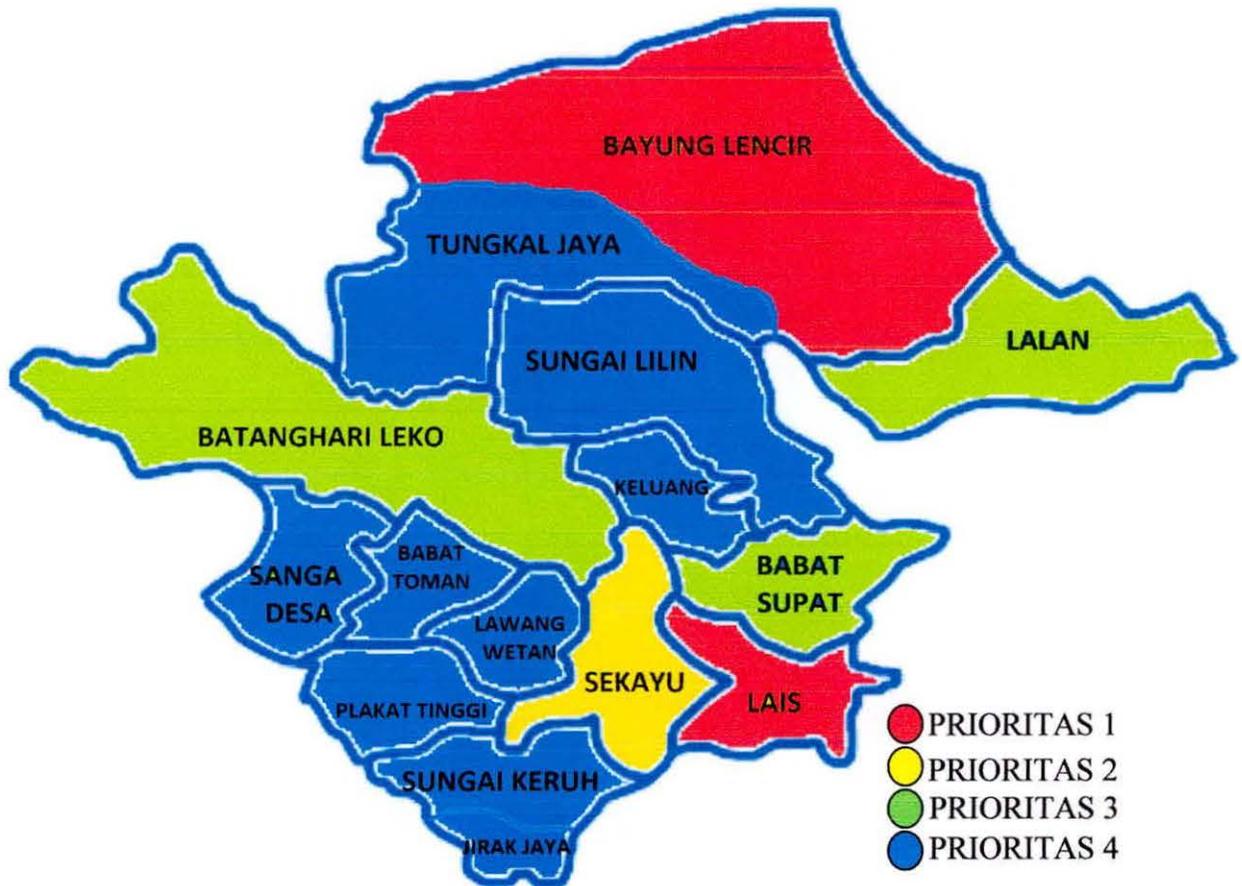
Gambar 5.3
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Pasar



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke pasar, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Bayung Lencir yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu dan Lais yang menjadi prioritas kedua. Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Sanga Desa dan Kecamatan Babat Supat di Prioritas ketiga.

5.3 Akses Ke Puskesmas

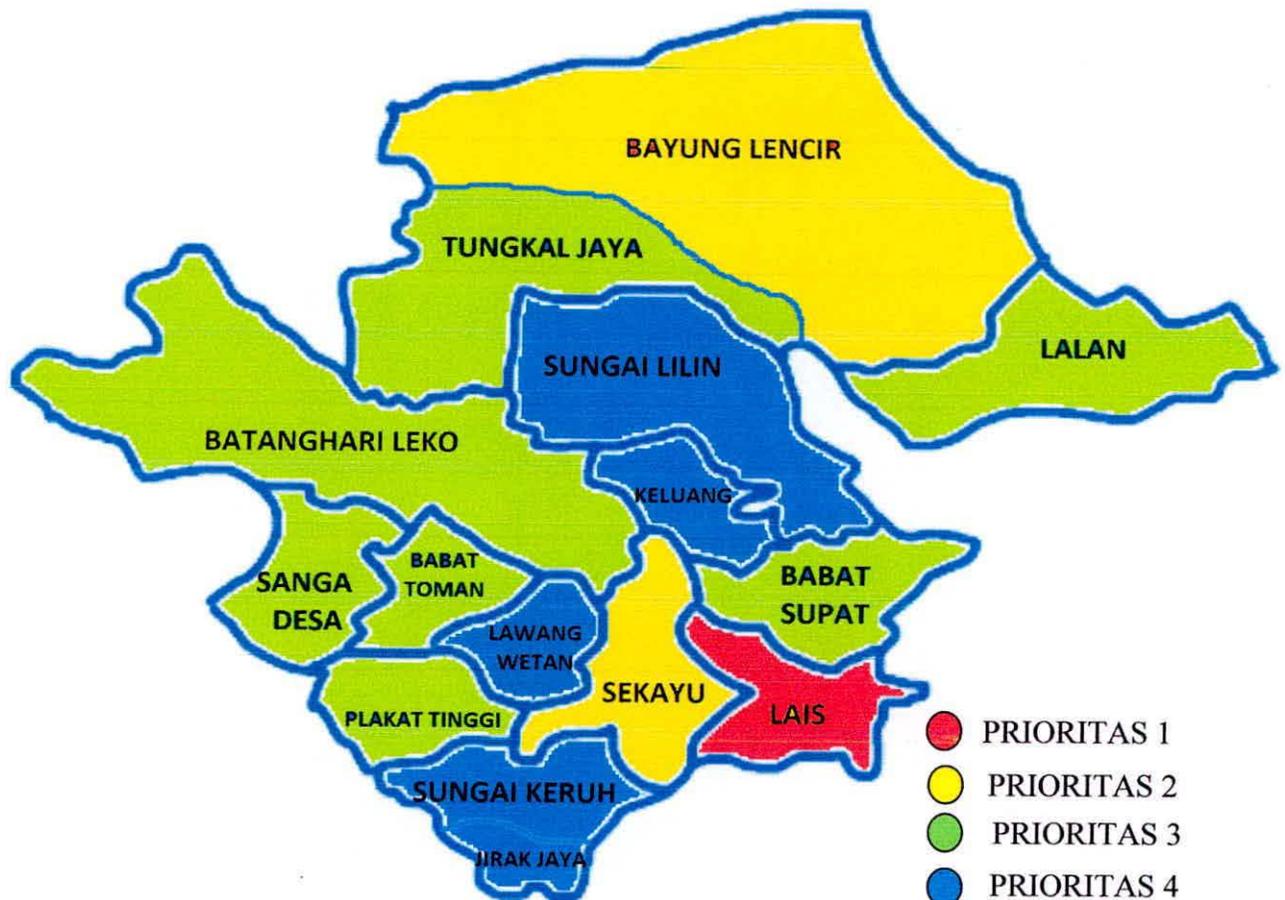
Gambar 5.4
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Puskesmas



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke Puskesmas terdekat, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Lais yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu yang menjadi prioritas kedua. Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Babat Supat di Prioritas ketiga.

5.4 Akses Ke Rumah Sakit

Gambar 5.5
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke Rumah Sakit



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke Rumah Sakit terdekat, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Lais yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir yang menjadi prioritas kedua. Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Tungal Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Babat Supat di Prioritas ketiga.

5.5 Akses Ke SD Sederajat

Gambar 5.6
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SD Sederajat

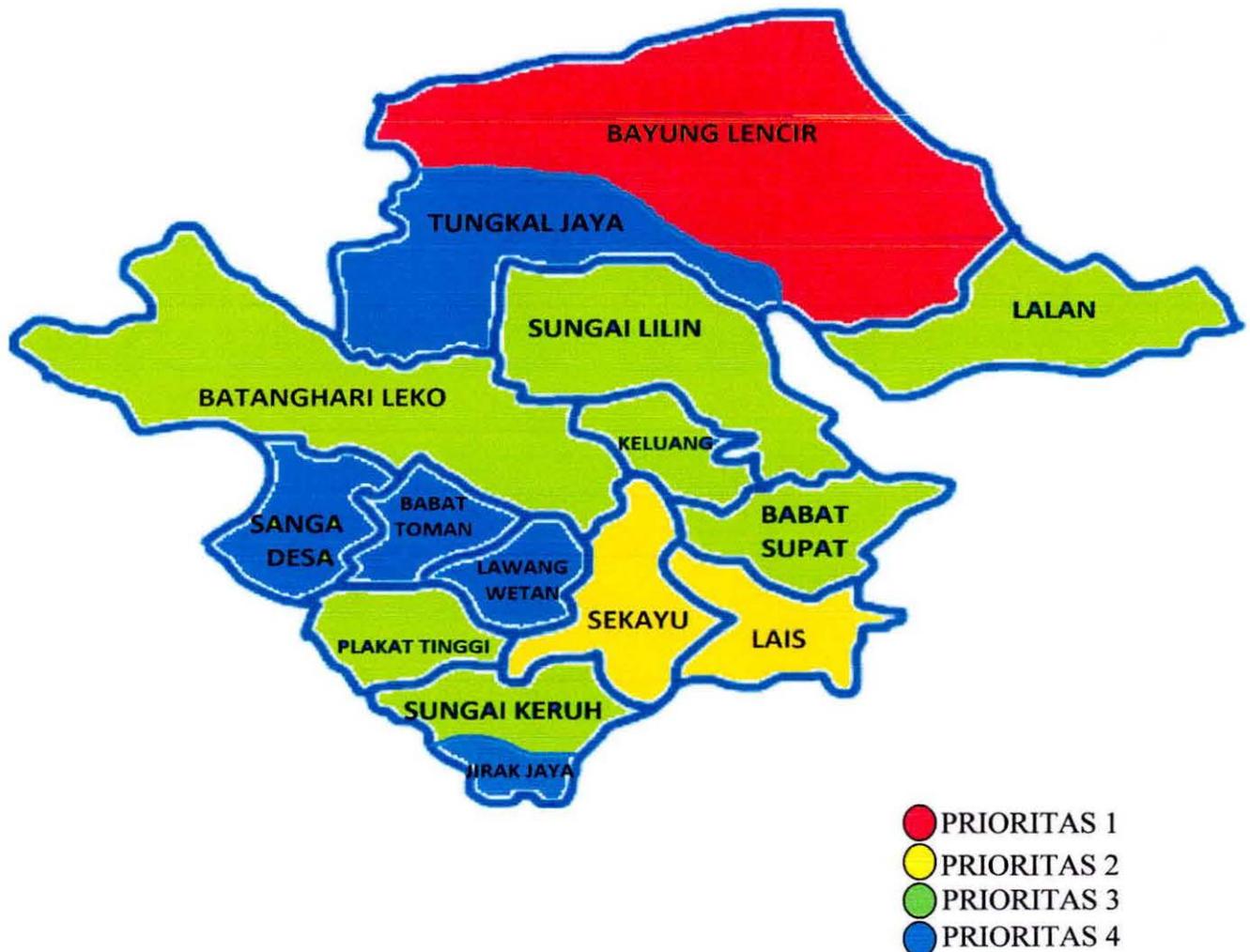


Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke SD Sederajat terdekat, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Lais, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir yang menjadi prioritas pertama, dan Seluruh kecamatan lain menjadi prioritas ketiga. Hal ini menandakan masih banyak nya masyarakat yang tidak mengakses fasilitas Pendidikan SD Sederajat.

5.6 Akses Ke SMP Sederajat

Gambar 5.7

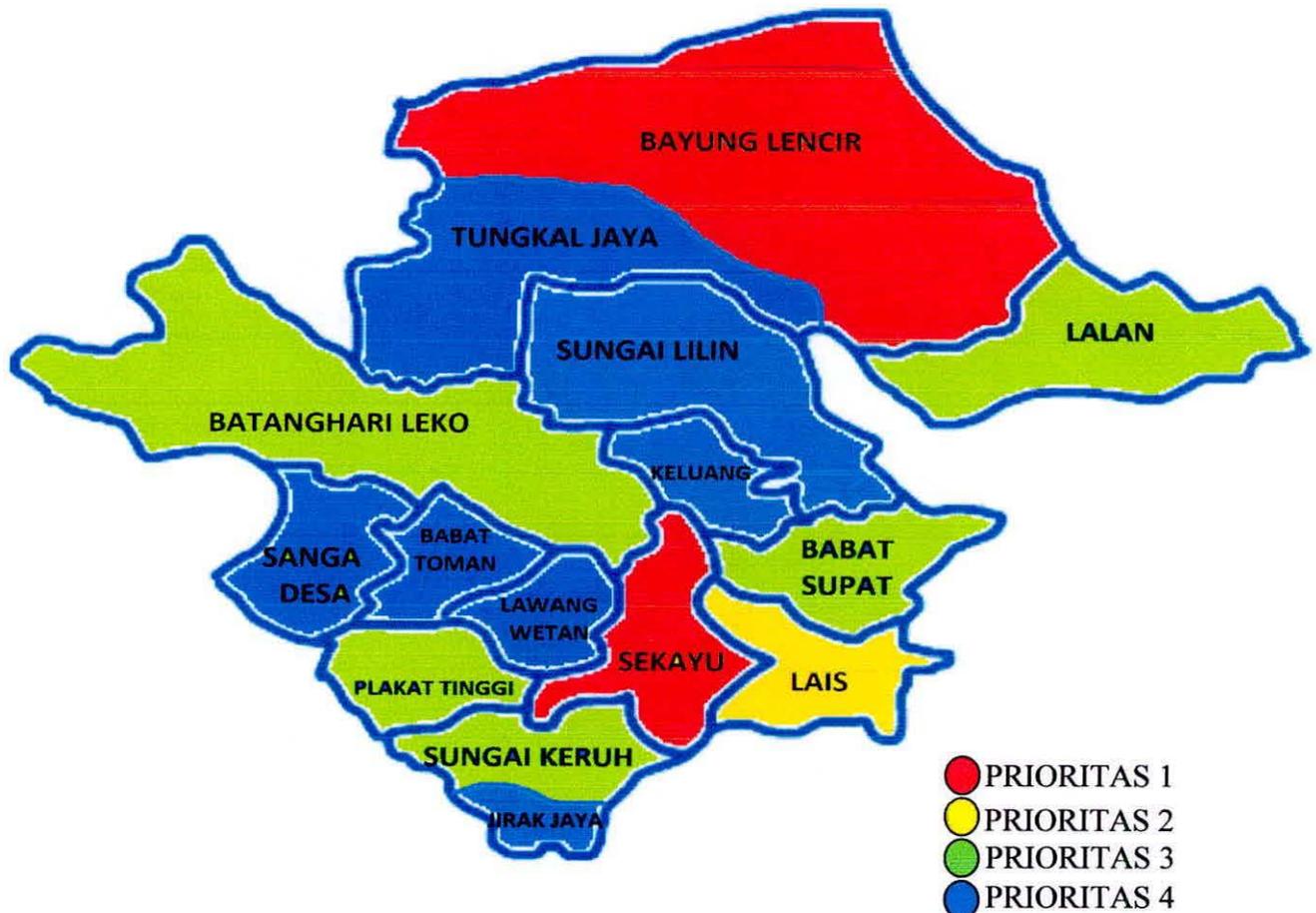
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SMP Sederajat



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke SMP Sederajat terdekat, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Bayung Lencir yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lais yang menjadi prioritas kedua. Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Lalan dan Kecamatan Babat Supat di Prioritas ketiga.

5.7 Akses Ke SMA Sederajat

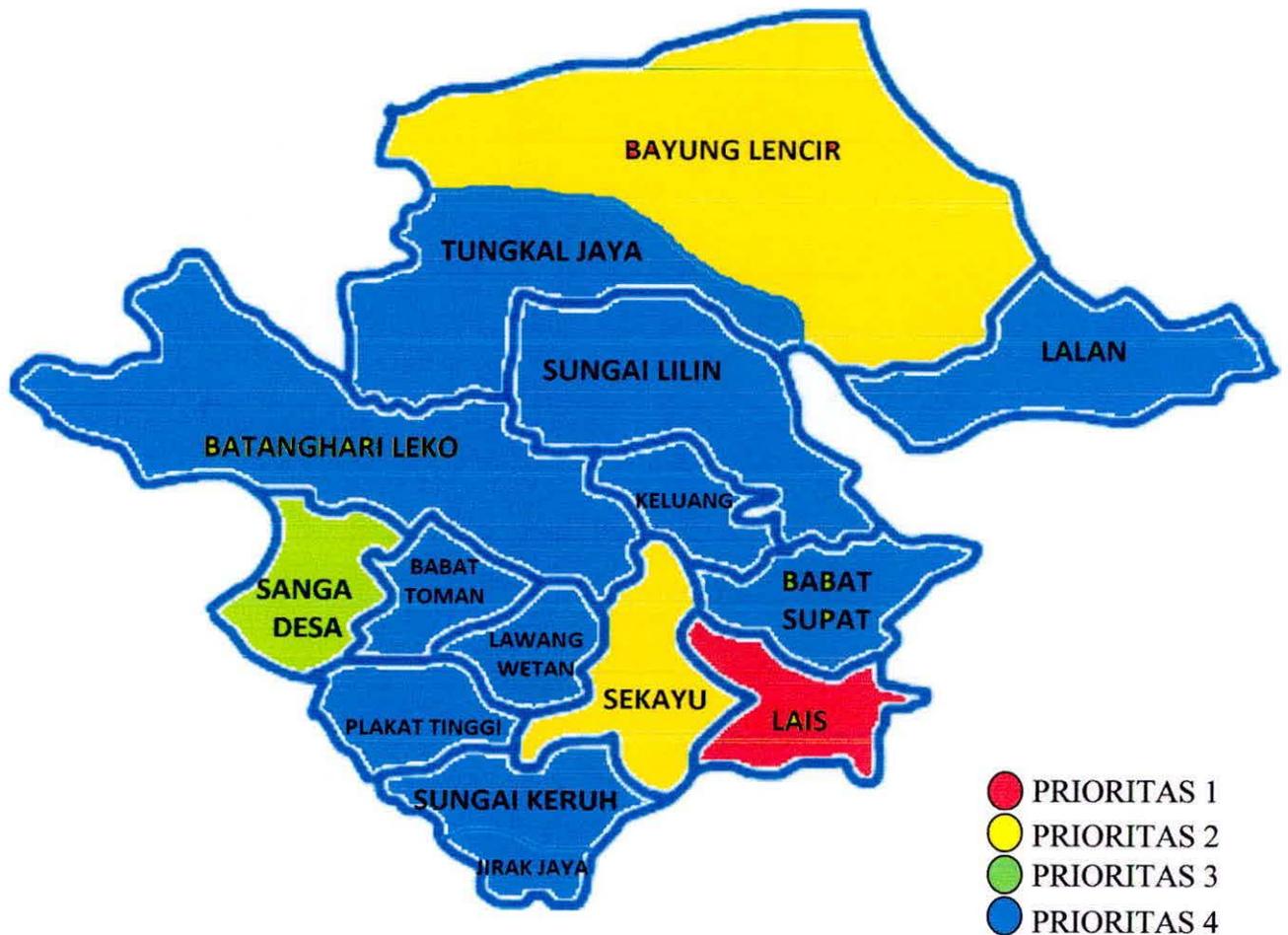
Gambar 5.8
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Akses Ke SMA Sederajat



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan akses masyarakat ke SMA Sederajat terdekat, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Bayung Lencir dan Sekayu yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Lais yang menjadi prioritas kedua. Kecamatan Lais di Prioritas kedua. Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Supat Kecamatan Plakat Tinggi dan Kecamatan Sungai Keruh yang menjadi prioritas ketiga.

5.8 Aksesibilitas Jalan

Gambar 5.9
Peta Prioritas Wilayah Terhadap Aksesibilitas Jalan



Berdasarkan analisis prioritas wilayah berdasarkan Aksesibilitas masyarakat terhadap jalan, maka dapat didapati bahwa lokasi Kecamatan yang menjadi wilayah prioritas penanganan untuk diintervensi secara berurut adalah Kecamatan Lais yang menjadi prioritas pertama, Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Bayung Lencir yang menjadi prioritas kedua. Dan Kecamatan Sanga Desa Menjadi Prioritas Ketiga.

Tabel 5.1
Rangkuman Lokasi Prioritas Kemiskinan

Kecamatan	PRIORITAS							
	Akses Ke Energi Listrik	Akses Ke Pasar	Akses Ke Puskesmas	Akses Ke Rumah Sakit	Akses Ke SD Sederajat	Akses Ke SMP Sederajat	Akses Ke SMA Sederajat	Aksesibilitas Jalan
Sekayu	2	2	2	2	1	2	1	2
Lais	2	2	1	1	1	2	2	1
Bayung Lencir	2	1	1	2	1	1	1	2
Batanghari Leko	3	3	3	3	3	3	3	4
Lawang Wetan	4	3	4	4	3	4	4	4
Keluang	4	4	4	4	3	3	4	4
Babat Supat	4	3	3	3	3	3	3	4
Tungkal Jaya	4	4	4	3	3	4	4	4
Sanga Desa	4	3	4	3	3	4	4	3
Babat Toman	4	4	4	3	3	4	4	4
Plakat Tinggi	4	4	4	3	3	3	3	4
Sungai Keruh	4	4	4	4	3	3	3	4
Jirak Jaya	4	4	4	4	3	4	4	4
Sungai Lilin	4	4	4	4	3	3	4	4
Lalan	4	3	3	3	3	3	3	4

Tabel 5.2
Realisasi dan Target Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Angka Kemiskinan	%	16.13%	15.84%	15,19	15,05	14,35	13,85	13,35	13,35

Tabel 5.3
Matriks Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

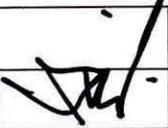
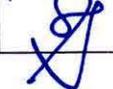
No.	Urusan/Bidang Pemerintahan	Kebijakan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Target							
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
							Kinerja	Rp (Ribu Rupiah)						
1	Pendidikan	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan	Pengeluaran Perkapita	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 4-6 tahun yang terlayani di PAUD	57.3	24.000	59.87	26.000	61.2	28.000	62.5	30.000
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	17.200	100	17.500	100	17.800	100	18.100
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	12.700	100	12.900	100	13.000	100	13.100
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	103.62	21.500	105.39	22.700	107.56	23.900	109.73	24.000
						Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI	0.75	6.500	0.7	7.000	0.65	7.500	0.6	8.000
						Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	99.7	88.800	99.8	88.900	99.9	89.000	100	89.500
						Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	45.200	100	51.400	100	57.500	100	26.000
						Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100	4.800	100	5.000	100	5.300	100	54.000
						Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	91.36	7.800	94.12	8.100	97.42	8.500	100	8.800
						Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs	1.2	4.000	1.1	4.500	1	5.000	0.8	5.500
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	99.7	31.500	99.8	32.000	99.9	32.500	100	33.000
						Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	2.100	100	2.200	100	2.300	100	2.400
						Persentase sekolah yang sudah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)	60.38	750	65.72	850	70.81	950	75.2	1.000
2	Kesehatan				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Prevalensi stunting pada balita	16	2.000	14	3.000	13	4.000	12	5.000
						Angka kematian ibu	70 / 100000	7.500	58 / 100000	8.000	52 / 100000	10.000	46 / 100000	11.000

					Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Bayi	8/100	3.000	6/100	4.000	5/100	5.000	4/100	6.000
						Jumlah FKTP Akreditasi Minimal Utama	2	1.450	3	1.500	4	1.700	5	2.000
						Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1	1.000	3	1.500	3	1.700	3	2.000
						Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat	95	60.000	95	70.000	95	70.000	95	70.000
						Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	29	685	29	750	29	850	29	1.000
						Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3	102.000	3	102.000	3	102.000	3	102.000
						Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Jaringan	40	2.000	40	2.000	40	2.000	40	2.000
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	100	10.000	100	10.000	10	10.000	10	10.000
						Jumlah Pelayanan Standard Minimal Kesehatan	12	12.000	12	12.000	12	12.000	12	12.000
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10	500	10	750	10	1.000	10	1.250
						Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	2	500	2	750	2	1.000	2	1.250
						Persentase Alat Kesehatan yang di lakukan pemeliharaan atau kalibrasi	100	1.000	100	1.000	100	1.000	10	1.000
						Persentase pemenuhan sarana dan prasarana (FKTP dan FKTR)	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000
						Persentase ketersediaan obat esensial	90	10.000	96	10.000	98	10.000	100	10.000
						Persentase ketersediaan BMHP	90	5.000	96	7.000	98	8.000	10	10.000
						Persentase Alat Kesehatan Memenuhi Syarat	85	20.000	90	20.000	95	20.000	100	20.000
3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Perencanaan yang Berbasis Satu Data MUBA untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar	Penyediaan Infrastruktur	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Bersih (Peripaan dan Non Peripaan)	80	5.000	85	15.000	90	15.000	100	15.000
				Persentase Rumah Tangga dengan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi yang layak (WC Individual, Komunal)	80	15.000	85	25.000	90	25.358	100	26.625

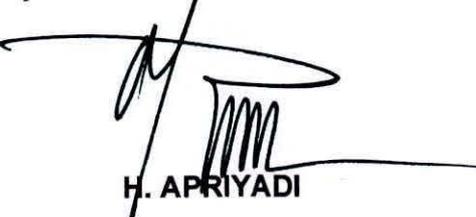
				Layanan Sanitasi (air limbah) yang layak										
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah di Luar Kawasan Kumuh yang dibangun / diperbaiki	25	30.000	50	85.000	75	120.000	100	200.000
4	Sosial	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapatan	Pengeluaran Perkapita	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Disabilitas yang mendapat layanan	93.26	4.642	95.76	5.106	98.25	5.106	100	5.106
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam bidang Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	4.454	100	4.899	100	4.899	100	4.4899
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang mendapat Layanan	77	7.784	78	8.563	79	8.563	90	8.563
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Menerapkan PUG melalui PPRG	26	700	28	700	30	700	32	700
						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66.7	650	66.8	650	66.9	650	67	650
5	Ketenagakerjaan	Pengembangan dan Optimalisasi BLK dan MVC	Penyediaan Lapangan Kerja Yang Didukung Oleh Tenaga Kerja Trampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terlatih	24.1	5.000	25.2	5.000	26.2	5.000	27	5.000
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja	50	5.000	80	5.000	90	5.000	100	5.000
6	Pangan	Meningkalkan Produktivitas dan Pendapatan	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapata	Pengeluaran Perkapita	Program Peningkatan\ Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Konsumsi Energi PerKapita/Hari	2.090	7.685	2.095	6.958	2.100	6.053	2.105	4.248
7	Pemberdayaan Masyarakat				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat yang dibina	15	2.200	15	2.200	15	2.200	15	2.200
						Jumlah Keluarga Inklusif yang dibina	150	400	150	400	150	400	150	400
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang dibina	100	4.400	100	4.400	100	4.400	100	4.400

8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapata	Pengeluaran Perkapita	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan	0.009	450	0.010	450	0.011	450	0.012	450
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap anak dan dampingan korban bagi anak memerlukan perlindungan khusus	0.013	1.000	0.014	1.000	0.015	1.000	0.016	1.000
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Kegiatan Yang Mendukung Kualitas Keluarga dan Hak Anak	1	400	1	400	1	400	1	400
						Jumlah Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE)	2	400	3	400	3	400	3	400
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Kecamatan Layak Anak	66.6	500	80	500	86.6	500	93.3	500
						Jumlah Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak (KLA)	4	500	4	500	4	500	4	500
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menenga	Penumbuhan Hilirisasi Komoditas Unggulan	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan PendapataN	Pengeluaran Perkapita	Program Pengembangan Umkm	Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil	13	3.500	18	4.000	25	4.500	35	5.000
10	Kelautan dan Perikanan	Peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat	Peningkatan Daya Beli dan Penurunan Ketimpangan Pendapata	Pengeluaran Perkapita	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	25.727	4.472	26.813	4.712	27.349	6.043	27.896	6.896
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	23.484	5.700	23.954	6.000	24.434	6.250	24.675	6.400
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	5	2.000	7	2.700	8	3.400	10	4.100
						Konsumsi Ikan	52.44	450	53.76	550	54.97	700	60.23	700
11	Pertanian				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1.55	3.300	1.7	3.400	1.85	3.470	2	4.000
					Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25	22.023	30	23.000	35	24.000	40	24.000	
12	Kependudukan Dan Catatan Sipil				Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000
					Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	100	700	100	700	100	700	100	700
13	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	65.69	244	66.10	246	66.51	248	67.03	250
					Persentase Kebutuhan KB Yang Tidak Terpenuhi	7.70	261	7.51	265	7.23	270	7.16	275	

					Persentase Penggerakan dan Wawasan Masyarakat Tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana	65	1.263	70	1.313	75	1.390	85	1.420	
14	Perkebunan				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Perkebunan	1.55	3.300	1.7	3.400	1.85	3.470	2	4.000
						Persentase ketersediaan sarana pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan)	25	22.023	30	23.000	35	24.000	40	24.000
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	11	4.587	14	4.350	20	4.600	22	4.700
						Persentase Penggunaan Teknologi yang diterapkan oleh Petani	2.35	425	2.55	600	2.75	625	2.95	725
15	Perdagangan Dan Industri				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase ketersediaan kebutuhan barang pokok dan penting terhadap kebutuhan	100	3.450	100	3.350	100	3.350	100	3.350
16	Sekretariat Daerah				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan Hukum	210	2.000	210	2.000	210	2.000	210	2.000

Paraf	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten II	
Plt. Kepala BAPPEDA	

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN


H. APRIYADI